

FIKIH SIYASAH

A. Pengertian Fikih Siyasa

Fikihi Siyasa (الفقه السياسي) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* (الفقه) dan *al-siyâsi* (السياسي). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.¹ Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fikihi secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci".²

Siyasa berasal dari kata bahasa Arab ساس- يسوس- سياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.³ *Siyasa* juga berarti pemerintahan dan

¹Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

²*Ibid.*, 19.

³Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108.

politik, atau menuntut kebijaksanaan. 4 *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *ya* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara

4Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fikihi siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iiyyah. *Siyâsah syar'iiyyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁵
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.⁶
3. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari

⁵ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178.

⁶ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁷

4. Ahmad Fathi, fikih *siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.⁸
5. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih *siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan

⁷ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1987), vol. 3, 147.

⁸Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jina'iyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt.

untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁹ Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹⁰ Jadi, politik adalah cara dan upaya

⁹Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.

¹⁰Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763. Lihat pula Tim

menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.¹¹

Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :

1. Ibnu Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.¹²
2. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi – melakukan muhasabah terhadap- pemerintah dalam melakukan tugasnya.¹³

Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 694.

¹¹ Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *politea* yang juga dikenal dengan Republik. Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 11-12. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *politea*. (*Ibid.*, h. 26). Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari kedua karya inilah dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat.

¹² Abd. Hamid al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan* (Cet. II; Jakarta: Era Intermedia, 2001), h. 187. Baca selengkapnya Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 17-19.

¹³ Abdul Qadim Zallum, *Al-Afkār al-Siyāsī* (Beirut: Dar al-Ummah, t.th.), h. 14. Lihat pula Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat ra.* (Cet. I; Bogor: Idea Pustaka, 2003), h. 134.

3. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara. Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.¹⁴
4. Deliar Noer mendefenisikan politik sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁵
5. Miriam Budiarjo memaknai politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).¹⁶

Para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat tentang terminologi politik, oleh karenanya digunakanlah pengertian politik dengan pendekatan holistik. Hasilnya ditemukan secara parsial dan implisit 3 unsur pokok, yaitu :

1. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan
2. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

¹⁴Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3.

¹⁵Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 6.

¹⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8.

3. Kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.¹⁷

Berdasarkan pendekatan itupula dapat dirangkum unsur-unsur politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim sebagai berikut :

1. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendiri-sendiri atau bersama, yang ditransfor-masikan menjadi ideologi politik).
2. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
3. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan.
4. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
5. Subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
6. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir.
7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktifitas-aktifitas politik.¹⁸

¹⁷ Lihat Andi Rasdiyanah, *Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*, "Makalah" disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998, h. 3.

Bertolak dari pengertian di atas, politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat didalamnya musuh perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara.

Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun -seperti rumah tangga. Politik atau *siyasah* adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

18Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 51-52.

B. Obyek Kajian Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.¹⁹ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan *pentadbiran* (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan *syariah amma*.²⁰ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.²¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fikih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat tekhnis. Di antaranya :

1. Al-Mawardi : Obyek kajian Fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah*

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 27.

²⁰ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), h. 28.

²¹ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), h. 4.

qadhaiyah), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).²²

2. Ibnu Taymiyah : Obyek kajian Fikih siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.²³
3. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu : Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).
4. Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian fikih siyasah pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (keuangan negara).²⁴

Secara garis besar, objek kajian fikih siyasah adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan

²²Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.tp), h.

²³Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp).

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari beberapa uraian ilmunan di atas, tampak obyek kajian fikih siyasah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf lebih sederhana.

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).²⁵
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

C. Manfaat Mempelajari Fikih Siyasah

Manfaat mempelajari fikih siyasah juga Abdul Wahab Khallaf, yaitu agar orang yang mempelajari fikih siyasah dapat memahami bagaimana menciptakan

²⁵ Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga Negara muslim dengan warga Negara lain. Sedangkan hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 13-14.

sebuah system pengaturan Negara yang islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat. Demikian pula, Abdurrahman Taj mengatakan bahwa manfaat mempelajari fikih siyasah adalah agar setiap orang yang mempelajarinya dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang politik Islam, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam, serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.²⁶

Manfaat mempelajari fikih siyasah dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5 dan Abdurrahman Taj, *al-Siyasat al-Syar'iyah wa al-Fikih al-Islamiy* (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953), h. 32.

DASAR HUKUM FIKIHI SIYASAH

A. Prinsip-Prinsip dari Al-Qur'an

1. Kedudukan Manusia di Atas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah : 30)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya :

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia

akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S An-Nuur : 55)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya :

Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingat (Nya). (Q.S. An-Naml : 62)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shaad : 26)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Ali ‘Imran : 26)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-An’am : 165)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S Yunus : 14)

2. Prinsip Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Terjemahnya :

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu

memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S Al-Baqarah : 213)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Hujurat : 13)

3. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Al-Nisa’/4:58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Nisa/4:135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S Al-Maidah/5.6)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. Al-nisa/4:105)

4. Prinsip Kepemimpinan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang

yang di luar kalanganmu (karena), mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." (Q.S Ali Imran/3:118).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-nisa/4:59).

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢)

Terjemahnya :

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".(Q.S Al-Syu'ara : 150-152)

5. Prinsip Musyawarah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran : 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S As-Syuura : 38)

6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni' mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni' mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Ali Imran : 103)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat : 10)

7. Prinsip Persamaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa : 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujurat : 13)

8. Prinsip Hidup Bertetangga atau Hubungan antar Negara Bertetangga

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya :

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S An-Nisa :36)

9. Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah : 2)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا
ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.(Q.S Al-Balad : 12-16)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُخْصُ عَلَى طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.(Q.S Al-Maun : 1-3)

10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan atau Hubungan Internasional

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ حَرَّمُوا وَاقْتُلُوهُمْ حَبِثٌ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (Q.S An-Nisa : 89-90)

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Anfal : 61)

11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya :

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٨٥﴾

Terjemahnya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan atau Muamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah : 282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah : 283)

13. Prinsip Membela Negara

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُم إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (Q.S At-Taubah : 38)

14. Prinsip Hak-Hak Asasi Manusia

a) Hak untuk Hidup

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra' :33)

b) Hak Atas Milik Pribadi dan Mencari Nafkah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 188)

c) Hak Atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (Q.S An-Nur : 27)

d) Hak Berpendapat dan Berserikat

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran : 104)

e) Hak Kebebasan Beragama, Toleransi Atas

Agama dan Hubungan antar Pemeluk Agama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 256)

f) Hak Persamaan di depan Hukum dan Membela Diri

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa : 58)

g) Hak Kebebasan dari Penganiayaan

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S Al-A'raf : 33)

h) Hak Kebebasan dari Rasa Takut

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.(Q.S Al-Maidah : 32)

i) Prinsip Amal Makruf dan Nahi Mungkar

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.(Q.S Ali- Imran : 110)

j) Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksana Suatu Urusan.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S Al-Qashash : 26).

B. Prinsip-Prinsip dari Hadis

1. Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin.

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin. (H.R Abu Daud)

2. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. 27

Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuannya (majikan)nya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

3. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai.

خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu." (H.R Ahmad)

4. Prinsip Ketaatan.

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia

diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.

5. Pemimpin yang Tidak Konsisten dan Tidak Bertanggungjawab.

Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kezaliman mereka, maa ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya.” (H.R Ahmad)

6. Prinsip Tolong-Menolong oleh yang Kuat atas yang Lemah dan yang Kaya atas yang Miskin.

Barangsiapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membant dengan kelebihanannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan, dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikan kelebihanannya itu kepada orang yang kekurangan bekal. (HR. Abu Daud).

Barangsiapa memiliki makanan cukup untuk dimakan dua orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan tiga orang. Dan barangsiapa memiliki makanan untuk jatah empat orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan lima atau enam orang. (HR. Ahmad)

7. Prinsip Kebebasan Berpendapat.

Siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.”(H.R Ahmad)

8. Prinsip Persamaan di depan Hukum

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah,

seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya.”(H.R Ahmad)

9. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau Pelaksana Suatu Urusan

Rasulullah bersabda : jika kamu menghilangkan amanah maka tunggulah masa kehancuran. Beliau ditanya: bagaimana yang dimaksud menghilang (H.R Ahmad)

10. Prinsip Musyawarah

Orang yang dimintakan nasehatnya adalah orang yang terpercaya.”(H.R Ibnu Majah)

11. Prinsip Persaudaraan.

Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya di atas tiga hari.” (H.R Bukhari)

PEMERINTAHAN ISLAM DALAM SEJARAH

A. Pemerintahan Islam Masa Rasulullah saw.

1. Kepemimpinan Rasulullah di Mekkah

Sejak Muhammad saw belum menjadi nabi, beliau adalah orang yang tidak pernah cacat (tercela) di tengah masyarakatnya. Selain karena terlahir dari keluarga mulia, Muhammad juga selalu dikenal hanya sebagai seorang pemuda tampan yang berkahlak mulia. Dia mendapat gelar *al-amin* ketika beliau mampu menjadi pemersatu umat dalam peletakan kembali Hajar Aswad.

Di usianya yang semakin menanjak dewasa, Muhammad sering bertafakkur dan berkontemplasi terkait kemungkarannya masyarakatnya terutama dalam penyembahan berhala. Pada usia 40 tahun, Muhammad mendapatkan wahyu pertama (QS. Al-Alaq : 1-5) sekaligus sebagai pertanda bahwa Allah telah memilihnya menjadi seorang Nabi dan Rasul.

Fadil SJ mengemukakan ada tiga tahapan yang merupakan dakwah Rasulullah untuk membersihkan tauhid dari unsur-unsur kemusyrikan.

1. Secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dalam arti batas keluarga terdekat dan para sahabat, melalui pendekatan pribadi. Seperti mula-mula

istri beliau sendiri yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau.

2. Dilakukan secara semi rahasia, artinya mengajak keluarga yang lebih luas dibanding pada tahap pertama, terutama keluarga yang tergabung dalam rumpun Bani Abdul Muthalib.
3. Dilakukan secara terang-terangan dan terbuka dihadapan masyarakat umum. 28 Namun, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi beratnya tantangan dakwah yang dilakukan Nabi saw. di Makkah :29

1. Secara politis, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap dengan tunduknya kepada

28Fadil SJ. *Pasang Surut Peradaban Islam* , 96.

29 Tantangan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah semakin gencar. Ahmad Syalabi menyatakan bahwa ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu :

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang terakhir ini (tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib) sangat tidak mereka inginkan.
2. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy.
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezki.

Muhammad dan menerima ajarannya berarti tunduk pula kepada Bani Abdul Muthallib.

2. Secara sosial, mereka menganggap bahwa ajaran Muhammad sangat bertentangan dengan realitas orang Arab. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Secara religius, apa yang dibawa Muhammad khususnya tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di hari akhir, disamping bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini, juga telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi mereka, akibat perilaku mereka yang tidak kenal dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Secara ideologis, taklid kepada nenek moyang sudah berakar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam.
5. Secara ekonomi, mereka merasa dirugikan, karena dalam ajaran Islam dikenalkan istilah halal dan haram yang selama ini mereka tidak mengenalnya. Seperti kebiasaan riba (rentenir) dan merengkuh keuntungan dari orang yang tak berdaya.

Pada bulan Rajab tahun kesepuluh kenabian, enam orang dari suku Aus dan Khajraz mengunjungi Mekkah. Tahun berikutnya 12 orang lelaki Yatsrib datang untuk memeluk Islam. Mereka mengucapkan ikrar di 'Aqabah. Ikrar ini dikenal dengan ikrar 'Aqabah pertama.³⁰

³⁰Baiat Aqabah pertama :

Kami tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, kami tidak akan mencuri tidak pula berzina. Kami tidak akan membunuh

Pada tahun keduabelas kenabian datang 73 orang Muslim dari Yatsrib di musim haji dan menerima Islam. Atas nama penduduk Yatsrib mereka meminta pada Nabi agar berkenan pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Nabi pun menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini inilah yang dikenal dengan perjanjian 'Aqabah kedua.³¹

Intimidasi kepada Muhammad dan pengikutnya pun semakin menjadi-jadi. Lalu Nabi mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib terlebih dahulu. Dalam waktu dua bulan, hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekkah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal di Mekkah bersama Nabi. Keduanya membela dan menemani Nabi sampai ia pun hijrah ke Yatsrib.³²

anak-anak kami, dan kami akan hindari fitnah dalam segala bentuknya. Kami selalu taat kepada Nabi untuk melakukan segala sesuatu yang haq dan selalu beriman kepadanya baik dalam keadaan gembira maupun sengsara. Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.tp.), h. 40-41.

³¹Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.tp.), h. 47.

³²Dalam perjalanan ke Yatsrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya lima kilometer dari Yatsrib, Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi. Tak lama kemudian Ali menggabungkan diri dengan Nabi, setelah menyelesaikan segala urusan di Mekkah. Sementara itu, penduduk Yatsrib menunggu-nunggu kedatangannya. Waktu yang mereka tunggu-tunggu itu tiba. Nabi memasuki Yatsrib dan penduduk kota ini mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan.

Sejak itu, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama kota Yatsrib diubah menjadi *Madinatun Nabi* (kota Nabi) atau sering pula disebut *Madinatul Munawwarah* (kota yang bercahaya), karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Dalam istilah sehari-hari, kota ini cukup disebut *Madinah* saja.

Dari beberapa uraian diatas telah mencerminkan bahwa dalam kepemimpinan Nabi Muhammad pada periode Mekkah ini adalah sebagai Rasul yang mengajak dan berdakwah kepada masyarakat untuk memeluk agama Islam.

2. Kepemimpinan Rasulullah di Madinah

Babak sejarah dalam dunia Islam pun dimulai sejak Nabi Muhammad saw. hijrah ke Yatsrib. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala atau pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara.

Negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah itu terkenal dengan Negara Madinah. Madinah awalnya bernama Yatsrib. Nama Yatsrib diubah menjadi *Madinatun Nabi* (Kota Nabi) atau sering pula disebut *Madinatul Munawwarah* (Kota yang Bercahaya). Nama ini merupakan sebuah bentuk penghormatan dari penduduk Mekah kepada Nabi Muhammad saw. Dalam istilah sehari-hari, kota ini cukup disebut Madinah saja.

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Pada periode Mekah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di

bawah kekuasaan Quraisy. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi Muhammad saw. dan umatnya mengalami perubahan besar.

Dua peristiwa bersejarah (ba'iat aqabah pertama dan kedua) telah merubah arah perjalanan Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya dari kelompok tertindas menjadi kekuatan politik yang kokoh, solid dan disegani. Kedua peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Madinah.³³

Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi Muhammad saw. sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara.

Di Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah ada tiga golongan, yaitu kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar), kaum musyrikin (suku Aus dan Kharaj yang belum masuk Islam) dan kaum Yahudi (terdiri dari empat kelompok : Banu Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah, Banu Nadhir, Banu Quaraidhah, dan Yahudi Khibar tinggal di luar kota Madinah. Jadi Madinah adalah masyarakat majemuk. Setelah sekitar dua tahun berhijrah Rasulullah memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Piagam (*Watsiqah*) Madinah. Inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam.

³³Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 32.

Peletakan Dasar-Dasar Kehidupan bermasyarakat di Kota Madinah

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara yang baru dibentuk ini, Nabi Muhammad saw. segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan masjid. Selain untuk tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi Muhammad saw. juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
- b. *Ukhuwah Islamiyah*. Nabi Muhammad saw. mempersaudarakan antara golongan *Muhajirin*, (orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah), dan *Anshar* (penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum *Muajjirin*) tersebut. Dengan demikian, diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah.
- c. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan,

Nabi Muhammad saw. mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini, dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut Konstitusi Madinah/Piagam Madinah.³⁴

Sistem-Sistem yang Dibangun Nabi Muhammad saw.

a. Sistem Ekonomi

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus berlian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat

³⁴Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan agama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. menjadi kepala pemerintahan karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, dia juga meletakkan dasar-dasar persamaan antar sesama manusia. Perjanjian ini, dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut Konstitusi Madinah/Piagam Madinah. Sebuah negara dikatakan ada jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut :Adanya wilayah, Wilayahnya adalah Kota Madinah dan sekitarnya, Adanya penduduk. Kaum *Muhajirin* dan *Anshar* juga orang-orang Arab lainnya baik Muslim maupun non Islam merupakan masyarakatnya, Adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad saw. dan dibantu oleh para sahabatnya. Undang-undangnya berdasarkan *Syariat* Islam yang diwahyukan oleh Allah dan *Sunnah* Rasul, termasuk Piagam Madinah.

berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani.

b. Sistem Keuangan dan Pajak

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara bergotong royong dan sukarela. Mereka memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sendiri. Mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat.

Tidak hanya masa sekarang saja adanya sumber anggaran negara semisal pajak, zakat, *kharaj*, dsb. tetapi di Madinah juga pada masa Nabi Muhammad saw. sudah ada yang namanya sumber anggaran pendapatan negara semisal pajak, zakat, *kharaj*, dsb. Pajak dipungut semata berdasarkan standar cukup dan dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara.

Konsep Ketatanegaraan Pada Masa Nabi Muhammad saw.

Pemegang otoritas peradilan di zaman Nabi Muhammad saw. adalah Nabi Muhammad saw. sendiri. Dilihat dari ketatanegaraan modern (*trias politica*), yakni fungsi yudikatif (kehakiman), eksekutif (pemerintahan), dan legislatif (pembuat undang-undang), Nabi Muhammad saw. menjalankan ketiga fungsi institusi sekaligus.

Di masa Nabi Muhammad saw., ketiga konsep ketatanegaraan itu disebut dengan:

a. *Sultah Tashriiyah (Fungsi Legislatif)*

Fungsi legislatif yang dijalankan Nabi saw., dikarenakan beliau sebagai seorang utusan Allah saw. yang menerima wahyu (perintah) dari Allah. Karena itu, segala yang diperintahkan Rasul saw. bersumber dari Al-Quran (Al-Najm : 3-4), dan umat harus mengikutinya.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥)

Terjemahnya :

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

b. *Sultah Tanfidziyah (Eksekutif)*

Kapasitas Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam berbagai literatur. Diantaranya adalah menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau bertugas keluar dan melaksanakan musyawarah.

c. *Sultah Qadlaiyah (Yudikatif)*

Nabi Muhammad saw. juga menjalankan fungsi yudikatif dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga hak masyarakat yang memerlukan sebuah resolusi lantaran dihantam oleh perselisihan dan konflik. Selanjutnya, pelaksanaan dan eksekusi dari hukum tersebut, juga dipegang oleh Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk aplikasi dari fungsi eksekutif.

Untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum, Nabi saw. membentuk lembaga hisbah. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan

penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar. Bahkan dalam kondisi tertentu, Nabi saw. langsung mengadakan inspeksi mendadak ke pasar-pasar.³⁵

Dalam hubungan internasional, kebijakan politik yang ditempuh Muhammad saw. adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat.³⁶

Muhammad saw, juga mengangkat duta-duta sahabat dan menerima duta-duta negara lain dan melayaninya dengan baik.

B. Pemerintah Islam Masa Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

a. Biografi

Beliau termasuk dalam golongan *as saabiqun al-awwalun* (golongan pertama yang masuk Islam). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at-Tamimi. Pada masa kecilnya beliau bernama *Abdul Ka'bah*. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi *zadzar* ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi saw. menjadi Abdullah. Sedangkan gelar *as-Shiddiq* diberikan oleh Nabi Saw. karena keteguhan imannya dan pembenarannya pada peristiwa *isra'* dan *mi'raj* Nabi Saw.. Ayahnya bernama Utsman bin Amr bin Sa'ad bin Taim bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Talib bin Fihr bin Nadr bin Malik. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakr yang

³⁵ 'Athiyah Musthafa Masyrifah, *Al-Qadha fi al-Islam* (beirut: Al-Syaq Ausath, 1966), h. 181.

³⁶ Muhammad mengirim surat ke beberapa kepala negara yang diperkirakan sebanyak 30 pucuk surat. Haykal, h. 361.

berasal dari keturunan Quraisy. Garis keturunan ayah rnama Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murra.³⁷

Sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang baik, sabar, jujur dan lemah lembut. Beliau menjadi sahabat Nabi Saw. sejak keduanya masih remaja.

Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khalifah dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk di masa Nabi saw.. Pengangkatannya untuk memangku jabatan tersebut, merupakan hasil kesepakatan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin dalam musyawarah mereka di Tsaqifah Bani Saidah. Musyawarah itu sendiri diprakarsai oleh kaum Anshar secara spontan sehari setelah wafat Rasulullah saw. Sikap spontanitas mereka ini menunjukkan mereka lebih memiliki kesadaran politik daripada kaum Muhajirin untuk memikirkan siapa pengganti Rasul dalam memimpin umat Islam.³⁸

³⁷ Muhammad Husaen Haekal, *Abu Bakar As-Shiddiq* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa), h. 1.

³⁸Ketika Nabi Muhammad Saw. wafat, tidak ada pesan siapa yang akan menggantikan beliau. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. tidak tegas menyatakan siapa yang akan menggantikan beliau setelah wafat, cara membangun sistem, dan struktur sosial kenegaraan. Pengangkatan ini menggunakan metode ijtihad. Ijtihadlah yang dilakukan para sahabat tentang mekanisme khalifah pengganti Rasulullah Saw. Tidak adanya petunjuk yang jelas setelah Rasulullah wafat dan menimbulkan krisis dikalangan umat Islam, terutama yang tinggal di Madinah, karena jika tidak ada penggantinya, Madinah akan menghadapi ancaman. Ketegangan ini berakhir ketika Ummar bin Khattab memelopori pambaiatan Abu Bakar Shiddiq sebagai pengganti Rasulullah.

b. Masa Pemerintahan

1). Kebijakan pelaksanaan pengurusan terhadap agama

Pada awal pemerintahannya, beliau diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Diantaranya perbuatan makar tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah.

Di samping itu, ancaman dari luar pun cukup rawan, yaitu dari kaisar Romawi, Hiraclius, yang menguasai Syria dan Palestina, dan Kisra, kerajaan Persia yang menguasai Irak. Dua kerajaan besar ini selalu bersekongkol dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.³⁹

2). Kebijakan kenegaraan

Di antara kebijakan beliau pada bidang kenegaraan antara lain:

a). Bidang eksekutif

Sebelum pembai'atan Abu Bakar terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Kaum Anshar menginginkan pengganti Rasulullah berasal dari kaum mereka, begitu pula kaum Muhajirin. Perdebatan itu terjadi di Tsaqifah Banu Sa'idah. Walaupun perdebatan itu sangat alot tapi pada akhirnya terjadi mufakat. Atas kehendak kaum Muslimin serta sahabat-sahabat dekat Rasulullah maka Abu Bakar di bai'at oleh kaum Muslimin, dan yang pertama kali membai'at Abu Bakar adalah Umar Ibn Khattab. Pertimbangan Umar adalah Abu Bakarlah yang ditunjuk Rasulullah saw. untuk menjadi imam shalat ketika beliau sakit. Menyusul Abu Ubaidillah memberi baiat. Disusul Basyir Ibn Sa'ad, Hubab Ibn al-Munzir, dan sahabat lainnya, tidak ketinggalah pula Usaid Ibn Hudair, pemimpin Bani Aus yang diikuti pula oleh suku Khazraj. Sulasman dan Suparman, *Sejarah Islam di Asia & Eropa* (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 62.

39J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. 15; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 109.

Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara dan Abu Ubaidah bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah provinsi-provinsi, dan untuk setiap provinsi ditunjuk seorang amir.

b). Pertahanan dan keamanan

Dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabiilitas di dalam maupun di luar negeri. Diantara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Haritsah, Amr bin Ash, Zaid bin Abi Sufyan, dan lain-lain.

c). Yudikatif

Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti perpecahan. Hal ini karena kemampuan dan sifat Umar sendiri, dan masyarakat pada waktu itu dikenal *'alim*.

d). Sosial ekonomi

Sebuah lembaga mirip *Bait Al Mal*, didalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infaq, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada.

c. Peradaban pada Masa Abu Bakar

Bentuk peradaban paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Qur'an. Abu Bakar As-Shiddiq memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit untuk menghimpun Al-Qur'an dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hapalan

kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian Al-Qur'an setelah syahidnya beberapa penghapal Al-Qur'an pada perang Yamamah. Umarlah yang mengusulkan pertama kali penghimpunan Al-Qur'an ini. Sejak itulah Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf. Inilah untuk pertama kalinya Al-Qur'an dihimpun.

Selain itu peradaban Islam yang terjadi pada praktik pemerintahan Abu Bakar terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

1). Dalam bidang pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini ia mengelola zakat, infaq dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah harta rampasan perang dan *jizyah* dari warga negara non muslim, sebagai sumber pendapatan *Baitul Mal*. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.

2). Praktek pemerintahan Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya.⁴⁰ Penunjukkan itu sendiri terjadi ketika Abu Bakar mendadak jatuh sakit pada tahun ketiga masa jabatannya. Selama 15 (lima belas) hari ia tidak dapat keluar untuk shalat di mesjid, karena itu ia menyuruh Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi imam sholat.

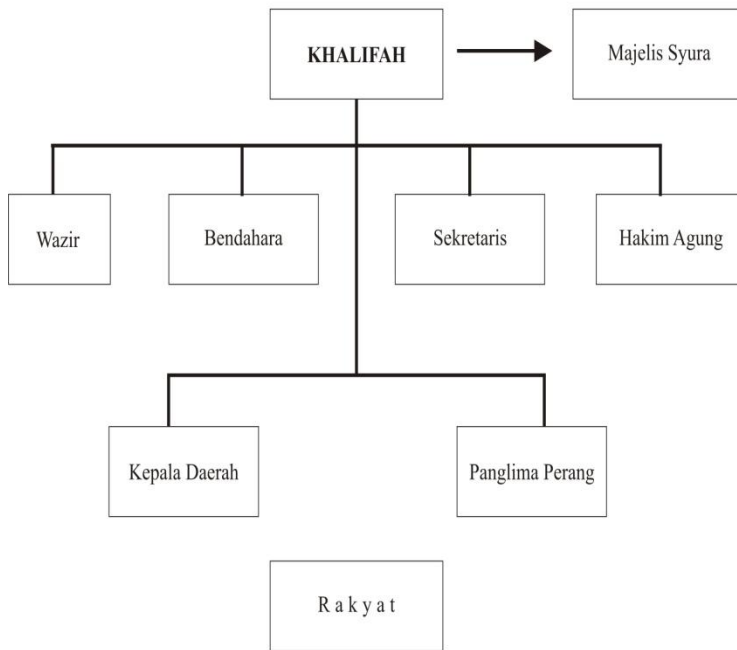
⁴⁰Faktor utama yang mendorong Abu Bakar menunjuk atau mencalonkan Umar bin Khattab adalah karena kekhawatirannya akan terulangnya peristiwa yang menegangkan di Tsaqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan.



Setelah Abu Bakar mendapat persetujuan kaum muslimin atas pilihannya, maka ia memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan pengangkatan Umar. Dari penunjukan Umar tersebut ada beberapa hal yang perlu dicatat :

1. Bahwa Abu Bakar dalam menunjuk Umar tidak meninggalkan asas musyawarah. Ia lebih dulu mengadakan konsultasi untuk mengetahui aspirasi rakyat melalui tokoh-tokoh kaum muslimin (dihadiri oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asid bin Hadhir tokoh Anshar).
2. Bahwa Abu Bakar tidak menunjuk salah seorang putranya atau kerabatnya melainkan memilih seorang yang punya nama dan mendapat tempat di hati masyarakat serta disegangi oleh rakyat karena sifat-sifat terpuji yang dimilikinya .
3. Bahwa pengukuhan Umar menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar berjalan dengan baik dalam satu baiat umum dan terbuka tanpa ada pertentangan di kalangan kaum muslimin, sehingga obsesi Abu Bakar untuk mempertahankan keutuhan umat Islam dengan cara penunjukan itu tercermin.

Setelah pembai'atan Umar beberapa hari kemudian Abu Bakar wafat, yaitu pada hari Senin, 23 Agustus 624 M.

STRUKTUR PEMERINTAHAN KHALIFAH ABU BAKAR



Keterangan:  Jalur Konsultatif
 Garis Komando

Fatmawati Hilal

2. Umar bin Khattab (13-24 H/634-644 M)

a. Biografi

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qart bin Razail bin 'adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dilahirkan di kota Mekah, empat tahun sebelum Perang Fijar sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Al-Khudari Bek, tiga belas tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Saw.. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraishi dari suku Adi dan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim. Suku Adi

merupakan salah satu suku terpandang di kalangan Arab dan termasuk rumpun Quraisy.⁴¹

Umar memiliki kecerdasan dan kekuatan tubuh yang luar biasa. Pada tingkat kecerdasannya, ia mampu memprediksi dan memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maka iapun ditunjuk oleh Kabilahnya untuk mewakili setiap diplomasi antar kabilah di Arab. Diplomasinya diakui oleh bangsa Arab saat itu. Namun diapun diakui sebagai pribadi yang gagah berani dan perkasa, tidak sedikit orang-orang Quraisy yang jatuh tersungkur dikalahkan oleh Umar dalam setiap laga pertandingan gulat dan adu otot antar kabilah.

Peran Umar dalam penyebaran agama Islam sangat besar, hal ini telah diperkirakan sebelumnya oleh Nabi Saw.. Maka saat itu beliau berdo'a pada Allah Swt, "*Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hasyim atau Umar bin Khattab*". Do'a Nabi ini diijabah oleh Allah Swt., dan akhirnya Umar masuk Islam pada tahun 616 M. Masuknya Umar ini kemudian diikuti oleh putera sulungnya Abdullah dan Isterinya Zainab binti Ma'zun. Selain itu keIslaman Umar membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam.

b. Ide Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an

Umar adalah orang pertama dari kalangan sahabat yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika itu ayat-ayat Al-Qur'an yaang telah ditulis oleh para sahabat tersebar diberbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang-tulang dan sebagainya. Tempatnyapun

⁴¹Abd. Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa al-Rasyidun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 106.

berserakan ditangan para sahabat, tidak terkumpul dalam satu tempat.

Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi banyak peperangan yang didalamnya gugur banyak sahabat penghafal Al-Qur'an. Diantaranya dalam perang Yamamah saja 70 orang penghafal Al-Qur'an gugur. Oleh karena itu Umar khawatir para penghafal Al-Qur'an akan habis. Dengan alasan itu ia mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera dikumpulkan semua tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Pada mulanya Abu Bakar keberatan menerima usul Umar itu, karena Nabi Saw. tidak pernah melakukan hal serupa. Namun atas desakan Umar usul itupun disetujuinya. Abu Bakar lalu mempercayakan tugas pengumpulan itu kepada Zaid bin Tsabit, karena dia adalah penulis wahyu pada masa Rasulullah Saw..

c. Pengangkatan Umar sebagai Khalifah

Abu Bakar sebelum meninggal pada tahun 13 H/634 M., menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kendatipun hal ini merupakan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampaknya penunjukkan ini bagi Abu Bakar merupakan hal yang wajar untuk dilakukan guna menghindari perselisihan di antara umat Islam.

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi penunjukkan Umar sebagai Khalifah adalah sebagai berikut :⁴²

Pertama, kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali.

⁴²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyat fi al-Siyasat wa al-Aqidah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyyah, t.t.), h. 95.

Kedua, kaum Anshar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah.

Ketiga, umat Islam saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang. Sementara sebagian pasukan mujahidin sedang bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lain.

Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar yang dilakukan saat ia mendadak jatuh sakit pada masa jabatannya merupakan suatu yang baru, tetapi harus dicatat bahwa penunjukan itu dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan umat. Abu Bakar dalam menunjuk Umar sebagai pengganti tetap mengadakan musyawarah atau konsultasi terbatas dengan beberapa orang sahabat senior, antara lain Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asid bin Hадhir seorang tokoh Anshar.⁴³

d. Masa pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan

1.) Penaklukan wilayah-wilayah di luar Islam

Selama sepuluh tahun pemerintahan Umar sebagaimana besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Sejarah mencatat, Umar telah berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan Imperium Romawi dan Persia yang dimulai dari awal pemerintahannya, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya (Khalifah Abu Bakar). Pada masanya terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran sehingga periode ini lebih dikenal dengan

⁴³Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah pada hari wafatnya Abu Bakar, Selasa, 21 Djumadil Akhir Tahun 13 Hijriyah. Sulaiman Muhammad al-Thamawi, *Umar bin Khattab wa Ushul al-Siyasah wa al-Idarah al-Haditsah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, t.tp), h. 242.

nama periode *Futuh al-Islamiyyah* (perluasan wilayah Islam). Berturut-turut Islam berhasil menduduki Suriah, Irak, Mesir, Palestina dan Persia.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya konflik antara umat Islam dengan bangsa Romawi dan Persia yang pada akhirnya mendorong umat Islam mengadakan penaklukan negeri Romawi dan Persia, serta negeri-negeri jajahannya karena:

Pertama, bangsa Romawi dan Persia tidak menaruh hormat terhadap maksud baik Islam.

Kedua, semenjak Islam masih lemah, Romawi dan Persia selalu berusaha menghancurkan Islam.

Ketiga, bangsa Romawi dan Persia sebagai negara yang subur dan terkenal kemakmurannya, tidak berkenan menjalin hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Arab.

Keempat, bangsa Romawi dan Persia bersikap ceroboh menghasut suku-suku Badui untuk menentang pemerintahan Islam dan mendukung musuh-musuh Islam.

Kelima, letak geografis kekuasaan Romawi dan Persia sangat setrategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Islam.

2). Madinah sebagai Negara Adikuasa

Semenjak penaklukan Romawi dan Persia, pemerintahan Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan luas, meliputi semenanjung Arabia, Siria, Irak, Persia dan Mesir. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai negarawan, administrator terampil dan pandai, dan seorang pembaharu membuat berbagai kebijakan mengenai pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas, ia menata struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan negara Madinah berdasarkan semangat demokrasi.

Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan, antara lain:

- a). *Dewan al-Kharraj* (Jawatan Pajak)
- b). *Dewan al-Addats* (Jawatan Kepolisian)
- c). *Nazar al-Nafiat* (Jawatan Pekerjaan Umum)
- d). *Dewan al-Jund* (Jawatan Militer)
- e). *Bai'at al-Mal* (Lembaga Pembendaharaan Negara).

e. Peradaban Pada Masa Khalifah Umar

Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar, selain pola administratif pemerintahan, peperangan dan sebagainya adalah pedoman dalam peradilan. Umar melakukan pembenahan dalam peradilan Islam. Dialah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah itu disebut dengan *Risalah al-Qada'*.

Di samping itu pemikiran Khalifah Umar bin Khattab khususnya dalam peradilan yang masih berlaku sampai sekarang dikutip M. Fauzan, sebagai berikut:

Naskah asas-asas Hukum Acara

Dari Umar Amirul Mu'minin kepada Abdullah bin Qais, mudah-mudahan Allah swt. melimpahkan kesejahteraan dan rahmatNya kepada engkau.

1). Kedudukan lembaga peradilan

Kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib (sangat urgent) dan sunnah yang harus diikuti/dipatuhi.

2). Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya

Pahami suatu persoalan kasus gugatan yang diajukan kepada Anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah.

Karena sesungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.

3). Samakan pandangan Anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah

Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandangan mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan Anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.

4). Kewajiban pembuktian

Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.

5). Lembaga damai

Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan, sepanjang tidak mengahalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

6). Penundaan persidangan

Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah Anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, Anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya (tidak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

7). Kebenaran dan keadilan

Janganlah Anda dihalangi oleh suatu putusan yang telah Anda putuskan pada hari ini, kemudian Anda tinjau kembali putusan itu lalu Anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.

8). Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melaksanakan penalaran logis

Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada Anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

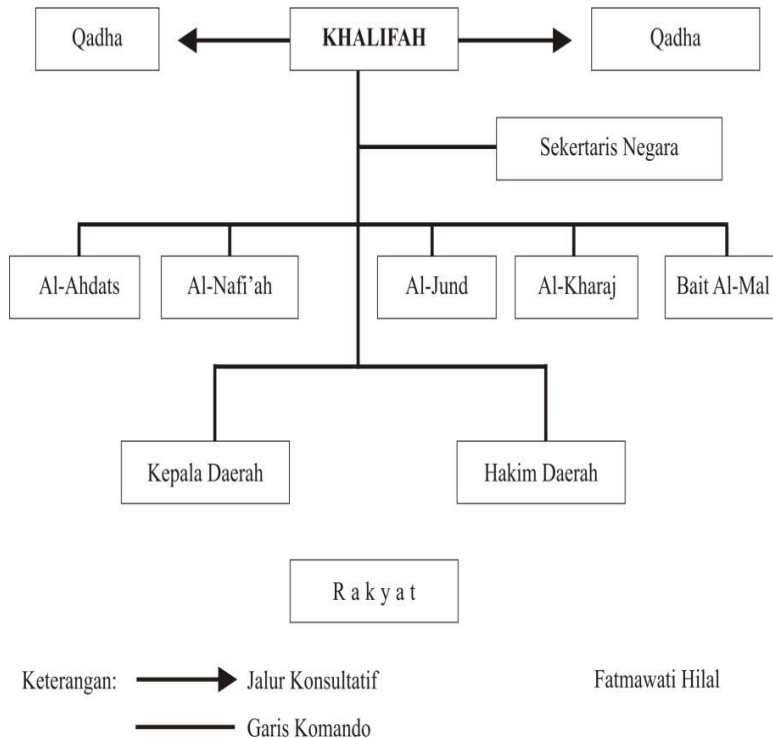
9). Orang Islam haruslah berlaku adil

Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah Swt yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan adanya keterangan dan sumpah.

10). Larangan bersidang ketika sedang emosional

Jauhilah diri Anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

STRUKTUR PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR



3. *Utsman bin Affan (24-36 H/644-656 M)*

a. Biografi

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushai. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakeknya yang keenam. Ayahnya adalah Affan bin Ash yang meninggal pada masa Jahiliyyah sebelum diutusnya Nabi. Dan Ibunya bernama Arwa binti Kuraib bin Rabi'ah. Dia telah masuk Islam dan hidup di Madinah. Rasulullah telah membaikatnya dan ia meninggal pada masa kekhalifahan puteranya.

Sedangkan neneknya bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad saw.

Putera-puteri Utsman antara lain: Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Ashghar, Amru, Khalid, Al-Walid, Sa'id, Abdul Malik, Maryam, Ummu Sa'id, Aisyah, Ummu Amru, dan Ummul Banin. Semua putera-puterinya tersebut merupakan hasil pernikahan beliau dengan dua puteri Nabi yakni Ruqayyah dan Ummi Kultsum. Maka saat itu beliau dijuluki *Dzun-Nurain* (*Pemilik Dua Cahaya*).

Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kesemua anak Utsman tersebut berasal dari pernikahan beliau dengan beberapa wanita muslimah lain pasca isteri-isteri terdahulu meninggal, seperti beliau menikahi Sakhithah binti Ghazwan sepeninggal Ummi Kulstum. Lalu Fathimah binti Walid, Ummul Banin binti Uyainah bin Hisham dan Nailah binti Al-Farafishah (*seorang wanita Nasrani yang masuk Islam*).

b. Periode Kehidupan Utsman yang Paling Menonjol

Beliau dilahirkan enam tahun setelah tahun gajah (*artinya lebih muda enam tahun dari Nabi saw.*). Berhijrah tatkala berusia 47 tahun dan diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun, yang saat itu menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Beliau meninggal saat berusia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 H.

Semasa hidup beliau di Zaman Nabi, Utsman bin Affan mengikuti beberapa peperangan diantaranya, Perang Uhud, Khaibar, Pembebasan kota Mekah, Perang Thaif, Hawazin, dan Perang Tabuk. Beliau tidak ikut perang Badar karena diperintah Rasulullah saw. untuk menunggu isterinya yang sedang sakit, sampai akhirnya meninggal.

Kesalehan sosialnya begitu tinggi, sehingga suatu ketika beliau pernah membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kaum muslimin seharga 12.000 dirham dan menghibahkannya kepada Kaum muslimin pada saat hijrah ke Yatsrib (Madinah). Mewakafkan tanah seharga 15.000 dirham untuk perluasan Masjid Nabawi. Menyerahkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, 10.000 dinar untuk keperluan Jaisyul Ushrah pada Perang Tabuk. Dan setiap hari Jum'at beliau membebaskan seorang budak laki-laki dan perempuan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq.

c. Keadaan Umat Islam tatkala Utsman diangkat menjadi Khalifah

- 1). Menguasai Negara Persia secara sempurna
- 2). Tentara Romawi berhasil diusir dari Syam dan Mesir
- 3). Menghukum segala bentuk kezaliman dan membedakan bentuk masyarakat
- 4). Kaum Muslim dan Non Muslim dapat hidup dengan tenang karena Islam menjamin kebebasan beragama mereka
- 5). Hilangnya sifat mengutamakan kelompok (kabilah) dan golongan serta membangga-banggakan kabilah
- 6). Kaum muslimin menjadi Umat yang gemar membantu, karena Utsman telah mencontohkannya demikian.

d. Masa Pemerintahan

Beliau menjadi Khalifah menggantikan Umar bin Khattab, yakni 24-36 H./644-656 M. Pada masa pemerintahannya perluasan Islam telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Heart, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia.

Roda pemerintahan Utsman tidak jauh berbeda dengan Umar. Dalam pidato pembai'atannya ia tegaskan akan meneruskan keiasaan yang dibuat pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan Khalifah dan pelaksanaan tugas eksekutif dipemerintahan pusat di bantu oleh pejabat sekretaris Negara yakni Marwan bin Hakam. Selain itu dalam pemerintahannya ia dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan atau *Bitul Mal*. Sedangkan untuk urusan di daerah Utsman mempercayakan seorang Gubernur sebagai pengatur di daerah.

Adapun kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura, tempat Khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat terkemuka. Majelis ini memberikan saran, usul dan nasehat kepada Khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi Negara. Akan tetapi pengambilan keputusan ada di tangan Khalifah.

e. Peradaban Pada Masa Utsman bin Affan

Karya monumental Khalifah Utsman selama menjabat sebagai pemimpin umat Islam waktu itu adalah pembukuan Mushaf Al-Qur'an, yang kemudian di kenal dengan nama Mushaf Utsmani. Pembukuan itu didasari oleh munculnya berbagai perbedaan dari cara baca Al-Qur'an sehingga terjadi perpecahan di kalangan sahabat. Pembukuan itu diketuai oleh Zaid bin Tsabit, dengan kepanitiaan tersendiri.

Adapun pembangunan yang dilakukan pada masanya meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Semua jalan menuju Madinah dilengkapi dengan khfilah dan fasilitas bagi para pendatang. Masjid Nabawi diperluas, tempat persediaan air di bangun di

Madinah, di kota-kota padang pasir dan di lading-ladang peternakan unta serta kuda.

f. Usaha Pengumpulan Al-Qur'an

- 1). Penumpulan Al-Qur'an merupakan usaha yang sangat berpengaruh guna menghindari konflik diantara umat Islam. Sahabat Utsman mengirim seorang sahabat untuk menemui *Ummu Hafsa binti Umar* untuk meminta mushaf yang disimpannya. Beliau juga meminta empat orang sahabat untuk menyalin mushaf ini.
- 2). Utsman menyalin mushaf yang sudah ditulis menjadi tujuh salinan dan mengirimkannya ke Syam, Kufah, Bashrah, Yaman dan Madinah. Dan beliau menyuruh untuk membakar salinan mushaf yang tidak sama dengan salinan tersebut, untuk menghindari perselisihan.

4. *Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M)*

a. Biografi

Ali adalah putera Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad saw. yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi puteri Nabi saw. yakni Fatimatuz Zahra. Ali ikut dengan Nabi saw. sejak kelaparan melanda kota Mekah untuk menghindari ancaman kelaparan tersebut.

Beliau masuk Islam saat masih berusia 13 tahun, hal ini menurut A.M. Saban. Sedangkan menurut Mahmudunnasir, Ali masuk Islam saat berusia 9 tahun. Beliau memiliki beberapa saudara antaralain Thalib, Uqail, Ja'far dan Ummu Hani'.

Mahmudunnasir selanjutnya menulis bahwa Ali termasuk salah seorang yang sangat lihai dalam memainkan pedang dan pena, bahkan ia dikenal sebagai seorang orator. Ia juga seorang yang pandai dan bijaksana, sehingga menjadi penasihat pada jaman

Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.

b. Keadaan Umat Muslim Pada Masa Ali

Menurut Ali Mufrodi, setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan yang diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam.

Peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perpecahan dikalangan umat Islam menjadi empat, yaitu :

- 1). Pengikut Utsman, yaitu yang menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan mengajukan Mu'awiyah sebagai Khalifah.
- 2). Pengikut Ali, yakni yang mengajukan Ali sebagai Khalifah.
- 3). Kaum Moderat, tidak mengajukan calon, menyerahkan urusannya pada Allah.
- 4). Golongan yang berpegang pada prinsip Jama'ah, diantara Sa'ad bin Abi Waqas, Abu Ayub Al-Anshari, Usamah bin Zaid, dan Muhammad bin Maslamah yang diikuti oleh 10.000 sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin.

c. Periode kehidupan Ali yang paling menonjol

Ali merupakan seorang pemuda yang pandai, maka pada masa Nabi saw. beliau mendapat julukan *Baabul 'Ilmi (pintunya Ilmu)*, selain itu Ali memiliki gelar *Karrmallhu Wajhah*, dikarenakan sifat beliau yang selalu menjaga harga diri dan marwah (kehormatan) nya. Seumur hidup beliau belum pernah melihat kemaluannya sendiri.

Suatu hari Ali diuji oleh beberapa orang sahabat, yang meragukan keilmuannya. Mereka menanyakan satu persoalan yang sama, namun Ali mampu

menjawabnya dengan berbagai macam jawaban. Pertanyaan itu adalah tentang perbedaan antara Ilmu dan Harta. Salah satu kutipan jawaban beliau adalah, *“bahwa perbedaan Ilmu dan harta adalah, harta perlu di jaga tapi ilmu justru yang menjaga kita. Ilmu membuat pemiliknya tenang, tapi harta membuat pemiliknya gusar. Ilmu ketika diberikan pada orang lain akan mengalir dan bertambah, sedangkan harta ketika diberikan pada orang lain akan berkurang, dll.”.*

d. Pengangkatan Ali Menjadi Khalifah

Ali adalah calon terkuat untuk menjadi Khalifah setelah kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada saat itu Ali banyak mendapatkan dukungan dari para sahabat senior dan bahkan para pemberontak pada masa Khalifah Utsman, seperti Abdullah bin Saba’.

Sedangkan Sa’ad bin Abi Waqash dan Abdullah bin Umar tidak mendukungnya, walaupun dikemudian hari Sa’ad ikut mendukung Ali. Orang yang pertama kali membai’at Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah, kemudian diikuti oleh Zubair bin Awwam dan Sa’ad bin Abi Waqash. Kemudian diikuti oleh banyak sahabat dari Muhajirin dan Anshor. Asal mulanya Ali menolak mencalonkan diri, namun karena untuk kepentingan Islam maka iapun mau, hal itu terjadi pada tanggal 23 Juni 656 M.

e. Usaha-usaha yang dilakukan selama memerintah

Adapun usaha-usaha beliau selama memerintah antara lain :

- 1). Menarik kembali semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya, lalu mengembalikannya ke Negara.
- 2). Mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, diantaranya; Ibnu Amir penguasa Bashrah, diganti oleh Utsman bin Hanif. Abdullah gubernur

Mesir, diganti oleh Qays. Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sebagai gubernur Suriah diminta meletakkan jabatan tetapi ia menolak, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahan Ali

- 3). Penumpasan para pemberontak seperti apa yang dilakukan oleh Thalhah dan Zubair tahun 36 H.
- 4). Memindahkan pusat pemerintahan ke kufah untuk menghindari hasutan dari Mu'awiyah. Dan setelah itu Madinah tidak pernah lagi dijadikan pusat Ibu Kota
- 5). Melakukan usaha penumpasan pemberontakan oleh Mu'awiyah yang akhirnya terjadi perang Siffin pada tahun 37 H. Namun dalam peperangan ini Ali mengalami kekalahan karena kecerdikan Mu'awiyah dalam menyusun strategi, yang dimotori oleh Amr bin Ash dengan mengacungkan tombak yang menusuk Al-Qu'an sebagai symbol perdamaian. Berawal dari peristiwa ini akhirnya menucul peristiwa *Tahkim*.

Dengan mengamati pola keberagaman pembangunan dasar-dasar pemerintahan Islam dari masa Rasulullah Saw. sampai dengan masa Khulafaurrasyidin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Nabi saw. merupakan seorang yang dilahirkan dari keturunan para pemimpin, maka pantaslah jika beliau menjadi pemimpin yang handal dalam mengatur dan mengarahkan umatnya.
2. Bahwa Nabi saw. telah meletakkan pola dasar pembangunan peradaban manusia diawali dengan pembangunan masjid Kuba.
3. Nabi saw. telah membuat sistem perundang-undangan dalam menata kemasyarakatan di Madinah dalam upaya menegakkan sendi-sendi kenegaraan, yakni dengan membuat

kesepakatan tidak saling mengganggu dan Nabi saw. melindungi penduduk Mekah dan menjamin hak-haknya meskipun mereka beragama Yahudi dan Nasrani.

4. Nabi saw. mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar mempunyai peran strategis dalam upaya membangun Negara yang kokoh dan kuat. Dan hal ini merupakan satu contoh langkah politik yang berlandaskan agama.
5. Berakhirnya pemerintahan Nabi saw., Khulafaurrasyidin menggantikan peran beliau. Abu Bakar adalah Khalifah pertama yang meneruskan kepemimpinan Nabi Saw. dengan sistem yang diwarisi dari Nabi saw.
6. Peran Abu Bakar sebagai Khalifah sangat besar, beliau berupaya mengumpulkan Al-Qur'an agar tidak punah, membangun baitul Mal, menumpas Nabi-Nabi palsu dan pembangkang zakat dan lain-lain.
7. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, yang merupakan seorang yang gagah berani dan cerdas juga diplomatis. Maka pantaslah beliau menjadi pemimpin yang adil dan gemilang.
8. Umar menjadi khalifah ke dua atas dasar penunjukkan Abu Bakar yang diwarnai dengan musyawarah antar para sahabat. Maka ini merupakan satu bentuk demokrasi yang dicontohkan dalam pemerintahan Islam.
9. Pola kepemimpinan Umar yang adil dan tidak memihak menjadi contoh nyata bahwa sebagai pemimpin selayaknya kita berlaku demikian, adil tidak memandang pangkat dan golongan, status dan usia, agama dan ras budayanya.
10. Umar bin Khattab membangun kantor-kantor perwakilan pemerintahan dan menunjuk

gubernur-gubernur serta mendirikan jawatan pos dan perpajakan, merupakan gambaran umum bahwa dalam pemerintahannya sudah semakin lengkap dan teratur.

11. Usaha perluasan pemerintahan Islam terjadi kemajuan yang signifikan, sehingga daerah-daerah di Afrika dan sebagian Eropa mampu dikuasai terutama Romawi.
12. Utsman bin Affan sebagai Khalifah ke tiga membawa perubahan cukup banyak dalam pemerintahan Islam dan peradaban Islam. Pada masa pemerintahannya armada angkatan laut dibangun sebagai bentuk gambaran akan kuat dan lengkapnya militer dan pemerintahan pada masanya sehingga disegani musuh.
13. Utsman berperan sangat besar dalam upaya menyatukan umat Islam, dengan mengambil kebijakan penulisan kembali Al-Qur'an dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan cara baca yang menuju arah perpecahan umat. Maka dikenallah Mushaf Utsmani yang ditulis dalam tujuh bagian mushaf dan disebarkan ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sebagai patokan dalam pembacaan Al-Qur'an.
14. Khalifah Ali bin Abi Thalib menggantikan kekhalifahan Umar dengan sebuah proses yang panjang, dalam pemerintahannya banyak ditemukan ganjalan-ganjalan sehingga roda pemerintahannya tidak berjalan lancar. Akan tetapi beliau tetap mengemban amanah kekhalifahan dengan baik.
15. Pada masa pemerintahan Ali upaya-upaya penumpasan pemberontakan atas pemerintahan gencar dilakukan. Hal itu dilakukan agar pemerintahan tetap berjalan baik dan dinamis.

Pada masanya terjadi perang Jamal, Perang Siffin dan peristiwa Tahkim. Yang dalam sejarah peristiwa tahkim tersebut menjadi satu pemicu terjadinya perpecahan diantara umat Islam. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya golongan Khawarij, Syi'ah, Qodariyah, Jabariyah dan lain sebagainya.

16. Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan yang baik untuk pemerintahannya, yakni mengambil kembali hak rakyat yang dikuasai oleh beberapa orang yang pernah memerintah sebelumnya. Gambaran itu tercermin dengan pengambilan tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa kerabat Utsman untuk kemudian dikembalikan pada Negara.
17. Sebagai Khalifah Ali merupakan pribadi yang cerdas dan tegas, beliau mengganti beberapa gubernur yang dianggap tidak layak menjadi pemimpin karena sikap arogansi atau otoriter dan merugikan Negara. Dan salah satu yang menonjol adalah penggantian Mu'awiyah sebagai gubernur Damaskus yang akhirnya terjadilah peperangan berkepanjangan.
18. Usainya pemerintahan Ali merupakan tanda berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian sistem pemerintahan setelah itu memiliki corak yang beragam pula sesuai dengan kondisi yang dihadapi waktu itu.

Secara umum mengenai beberapa hal yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam memimpin Negara Madinah.

Pertama, mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi terkemuka itu menjadi khalifah dipilih dan diangkat dengan cara yang berbeda.

Kedua, pemerintahan Khulafaur Rasyidin tidak mempunyai konstitusi yang dibuat secara khusus sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, pemerintahan Khulafaur Rasyidin juga tidak mempunyai ketentuan mengenai masa jabatan bagi setiap khalifah.

Keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Madinah Khulafaur Rasyidin telah melaksanakan prinsip musyawarah prinsip persamaan bagi semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, prinsip kebebasan berpendapat prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Kelima, dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negara Madinah adalah Al-Qur'an dan sunnah, hasil ijtihad, penguasa, dan hasil keputusan majelis syura.

C. Pemerintahan Islam Pasca Khulafaur Rasyidin

1. Dinasti Umayyah (41-132 H.)

Pada umumnya pasca *Khulafaur Rasyidin*, pemerintahan Islam seringkali dipandang tidak sesuai lagi dengan syariat Islam. Peristiwa pemberontakan (*bughat*) Wali Syam Mu'awiyah bin Abi Sufyan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diperangi dalam Perang *Siffin*, kemudian berlanjut dengan kekisruhan negara pada masa kekhalifahan Ali yang diakhiri dengan terbunuhnya sang Khalifah oleh Kaum *Khawarij*, menunjukkan betapa jauh tuntunan Rasul saw. dalam hal perpolitikan pada masa itu, bahkan masih di masa adanya para Sahabat. Inilah fakta sejarah yang terjadi. Namun apakah benar, tuntunan Islam dalam perpolitikan (sistem negara dan pemerintahan) sudah tidak sesuai lagi dengan syariat Islam setelah masa itu? Terutama dalam masalah pergantian elit politik (khalifah).

Walaupun agak enggan menyebut dengan nama keluarga Umayyah dalam masa ini, namun fakta yang terjadi adalah pada masa ini khalifah-khalifah yang *dibai'at* kebanyakan berasal dari keluarga tersebut. Diawali oleh Khalifah Mu'awiyah yang pernah membantu Rasulullah saw. untuk menjadi sekretaris negara di masanya, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, karena kecakapannya diamanahi menjadi Wali di daerah Syam, yang terus berlanjut sampai Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya dengan terbunuhnya Ali. Mu'awiyah karena pengaruhnya yang besar kemudian *diba'iat* menjadi khalifah berikutnya pada tahun 41H/661M. Penguasaan keluarga ini berakhir pada tahun 132H/750M, dengan terbunuhnya Khalifah keempat belas Marwan bin Muhammad Al-Ja'di oleh pemberontakan yang dilakukan Abu Muslim Khurasai.

Muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar Bin Khattab menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur. Ia juga dikenal sebagai negarawan yang ahli bersiasat, piawai dalam merancang taktik dan strategi, di samping kegigihan dan keuletan serta kesediaannya menempuh segala cara dalam berjuang untuk mencapai cita-citanya karena pertimbangan politik dan tuntutan situasi. Dan kemampuan tersebut dan bakat kepemimpinan yang dimilikinya, Muawiyah dinilai berhasil merekrut para pemuka masyarakat, politikus dan administrator bergabung kedalam sistemnya pada jamannya, untuk memperkuat posisinya di pimpinan. Muawiyah juga dikenal dengan berwatak keras dan tegas, tapi juga bisa bersifat toleran dan lapang dada.

Sejalan dengan watak dan prinsip Muawiyah tersebut serta pemikirannya yang perspektif dan

inovatif, ia membuat berbagai kebijaksanaan dan keputusan politik dalam dan luar negeri, dan jejak ini diteruskan oleh para penggantinya dengan menyempurnakannya.

Pertama, pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini didasarkan pertimbangan politis dan alasan keamanan. Karena letaknya jauh dari Kufah pusat kaum Syiah pendukung Ali, dan jauh dari Hijaz tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umayyah, sehingga bisa terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua bani itu dalam memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu Damaskus yang terletak di Wilayah Syam(suria) adalah daerah yang berada di bawah genggaman pengaruh Muawiyah selama 20 Tahun sejak ia diangkat menjadi Gubernur di distrik itu sejak zaman Khalifah Umar Bin Khattab.

Kedua, Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangannya mencapai puncak kekuasaan. Seperti Amr bin Ash ia angkat kembali menjadi Gubernur di Mesir, al-Mughirah bin Syu'bah juga ia angkat menjadi Gubernur di wilayah Persi. Ia juga memperlakukan dengan baik dan mengambil hati para sahabat terkemuka yang bersikap netral terhadap berbagai kasus yang timbul waktu itu, sehingga mereka berpihak kepadanya.

Ketiga, menumpas orang-orang yang berposisi dan dianggap berbahaya jika tidak di bujuk dengan harta dan menumpas kaum pemberontak. Ia menumpas kaum Khawarij yang merongrong wibawa kekuasaannya dan mengkafirkannya. Golongan ini menuduhnya tidak mau berhukum kepada Al-Qur'an dalam mewujudkan perdamaian dengan Ali di perang

Shiffin melainkan ia mengikuti ambisi hawa nafsu politiknya.

Keempat, membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, darat, laut dan kepolisian yang bertanggungjawab dan loyal.

Kelima, meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke Timur maupun ke Barat. Perluasan Wilayah ini diteruskan oleh para penerus Muawiyah, seperti Khalifah Abd al-Malik ke Timur, Khalifah al-Wlid ke Barat, dan ke Perancis di zaman Khalifah Umar bin Abd Al-Aziz. Perluasan wilayah di zaman dinasti ini merupakan ekspansi besar kedua setelah ekspansi besar pertama di zaman Umar bin Khattab. Daerah-daerah yang dikuasai umat Islam di zaman dinasti ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabiyah, Irak, sebagian dari Asia kecil Persia, Afganistan, daerah yang sekarang di sebut Pakistan Rumania, Uzbek dan Kirgis di Asia Tengah dan pulau-pulau yang terdapat di laut tengah, sehingga dinasti ini berhasil membangun negara besar di zamannya. Bersatunya berbagai suku bangsa di bawah naungan Islam melahirkan benih-benih peradaban baru yang bercorak Islam, sekalipun Bani Umayyah lebih memusatkan perhatiannya kepada pengembangan kebudayaan Arab. Benih-benih peradaban baru itu kelak berkembang pesat di zaman dinasti Abbasiyah sehingga dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia selama berabad-abad.

Keenam, Bagi Muawiyah maupun para penggantinya membuat kebijaksanaan yang berbeda dari zaman Khulafa al-Rasyidin. Mereka merekrut orang-orang non Muslim sebagai pejabat-pejabat pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokter dan di kesatuan-kesatuan tentara. Tapi di zaman

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kebijaksanaan itu dihapuskan. Karena orang-orang non Muslim (Yahudi, Nasrani dan Majusi) yang memperoleh privilege di dalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam bahkan menganggap rendah mereka. Di dalam Al-Qur'an memang terdapat peringatan peringatan yang tidak membolehkan orang-orang mukmin merekrut orang-orang non Muslim sebagai teman kepercayaan dalam mengatur urusan orang-orang mukmin. Tapi ada ayat lain yang membolehkannya.

Ketujuh, Muawiyah mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru yang dipengaruhi oleh kebudayaan Byzantium

Kedelapan, kebijaksanaan dan keputusan politik penting yang di buat oleh Khalifah Muawiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk Khilafah yang bercorak demokratis menjadi sitem monarki dengan mengangkat putranya, Yazid menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai Khalifah sepeninggalnya nanti. Ini berarti sukses kepemimpinan berlangsung secara seksama secara turun temurun yang diikuti oleh para pengganti Muawiyah. Dengan demikian, ia mempelopori meninggalkan tradisi di zaman Khulafa al-Rasyidin dimana Khalifah ditetapkan melalui umat. Lebih dari itu Muawiyah telah melanggar asas musyawarah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an agar segala urusan diputuskan melalui musyawarah.

Karena itu keputusan politik Muawiyah itu mendapat protes dari umat Islam golongan Syiah, pendukung Ali Abdul Rahman bin Abu Bakar, Husain Bin Ali, dan Abdullah Bin Zubair. Bahkan kalangan tokoh masyarakat Madinah mengadakan dialog

dengan Muawiyah. Mereka menyarankan agar ia mengikuti jejak Rasulullah atau Abu Bakar atau Umar dalam urusan Khalifah tidak mendahulukan kabilah dari umat. Muawiyah tidak menggubris saran ini. Alasan yang dikemukakan karena ia khawatir akan timbul kekacauan, dan akan mengancam stabilitas keamanan kalau ia tidak mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya.

Walaupun Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki namun dinasti ini tetap memakai gelar Khalifah. Bahkan Muawiyah menyebut dirinya sebagai *Amir al-Mukminin*. Status jabatan Khalifah diartikan sebagai wakil Allah dalam memimpin umat dengan mengaitkannya kepada Al-Qur'an (QS. al-Baqarah 30) atas dasar ini dinasti menyatakan bahwa keputusan-keputusan Khalifah di dasarkan atas perkenan Allah. Siapa yang menentangnya adalah kafir.

Pengelolaan administrasi pemerintahan dan struktur pemerintahan dinasti Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Wilayah kekuasaan itu, sebagaimana pada periode negara Madinah, dibagi menjadi beberapa wilayah propinsi. Setiap propinsi dikepalai oleh gubernur dengan gelar atau Wali atau Amir yang diangkat oleh Khalifah. Gubernur didampingi oleh seseorang atau beberapa *katib* (sekretaris), seorang *hajib* (pengawal dan pejabat-pejabat penting lain, yaitu *sahib Al-kharaj* (pejabat pendapatan). Pejabat pendapatan dan qhadi diangkat oleh Khalifah dan bertanggung jawab kepadanya.

Di tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen *al-khatib*, *al-khajib*, dan *diwan*. Lembaga *al-katib* terdiri dari *katib al-rasail*

(sekertaris negara), *katib al-kharaj* (sekretaris pendapatan negara), *katib al-jund* (sekretaris militer), *katib al-syurthath* (sekretaris kepolisian) dan *katib al-qadhi* (panitera). *Katib al-rasail* dianggap paling penting posisinya. Karena itu pejabatnya selalu orang terpercaya dan pandai dari keluarga kerajaan.

Para *katib* bertugas mengurus administrasi negara sbaik dan rapih untuk mewujudkan kemasalahatan negara. *Hajib* (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan Khalifah. Lembaga ini belum dikenal di zaman negara Madinah. Karenanya siapa saja boleh bertemu dan berbicara langsung dengan Khalifah tanpa melalui birokrasi. Tapi ada tiga orang yang boleh langsung bertemu dengan Khalifah tanpa *hajib*, yaitu Muadzin untuk memberitahukan waktu shalat kepada Khalifah, *sahib al-barid* (pejabat pos) yang membawa berita penting untuk Khalifah, dan *shahib al-tha'am* (petugas yang mengurus makanan istana).

Lembaga lain adalah di bidang pelaksanaan hukum, yaitu *al-nizham al-qadha'i* terdiri dari tiga bagian yaitu *al-qadha* *Al-hisbat* dan *al-mazhlím*. Badan *al-qadha* dipimpin oleh seorang *qadhi* yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul, atau ijma atau berdasarkan ijtihad. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum terhadap para pejabat pegawai negara yang melakukan pelanggaran. Pejabat badan *al-hisbat* disebut *al-muhtasib*, tugasnya menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera. Pejabat badan *al-mazhalim* di sebut *qadhi al-mazhalim* atau *shahib al-mazhalim*. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari *al-qadha* dan *al-Hisab*. Karena badan ini bertugas meninjau kembali akan kebenaran dan

keadilan keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh *qhadi* dan *muhtasib*. Bila ada suatu kasus perkara yang keputusannya dianggap perlu ditinjau kembali baik perkara seorang rakyat maupun pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, badan ini menyelenggarakan *Mahkamat al-Mazhalim* yang mengambil tempat di masjid. Sidang ini di hadiri oleh lima unsur lengkap, yaitu para pembantu sebagai juri, para hakim, para fukaha, para katib dan para saksi yang dipimpin oleh *Qhadi al-Mazhalim*. Berarti pemerintahan dinasti Umayyah, sebagai mana para periode Negara Madinah peradilan bebas tetap di laksanakan.

Dalam tubuh oraganisasi pemerintahan dinasti Umayyah juga dibentuk beberapa diwan atau departemen.

1. *Diwan Al-Rasail*, departemen yang mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada para Gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Departemen ini memiliki dua sekretariat untuk pusat menggunakan bahasa Arab, dan untuk daerah menggunakan bahasa Persia. Tapi pada masa khalifah Abdul al-Malik diadakan arabisasi, yaitu hanya menggunakan bahasa arab dalam surat-surat negara. Politik arabisasi ini berlanjut pada masa putranya, Khalifah al-Walid, yaitu penggunaan bahasa Arab sebagai linguafranca dan bahasa ilmu pengetahuan untuk seluruh wilayah pemerintahan.
2. *Diwan al-Khatim*, departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan untuk dikirim kepada pemerintahan di daerah.

3. *Diwan al-Kharaj*, departemen pendapatan negara yang diperoleh dari *Al-Kharaj*, usyur, zakat, *jizyah*, *fai'* dan ghanimah dan sumber lain. Semua pemasukan keuangan yang di peroleh dari sumber sumber itu di simpan di baitulmal (kantor pembendaharaan negara).
4. *Diwan Al-Barid*, departemen pelayanan pos bertugas melayani informasi tentang berita-berita penting di daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya, sehingga Khalifah mengetahui apa yang terjadi di daerah dan memudahkannya untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.
5. *Diwan Al-Jund*, departemen pertahanan yang bertugas mengorganisir militer. Personilnya mayoritas orang-orang Arab.

Para khalifah Bani Umayyah adalah :

1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 41-61 H / 661-680 M
2. Yazid I bin Muawiyah, 61-64 H / 680-683 M
3. Muawiyah II bin Yazid, 64-65 H / 683-684 M
4. Marwan I bin al-Hakam, 65-66 H / 684-685 M
5. Abdullah bin Zubair bin Awwam, (peralihan pemerintahan, bukan Bani Umayyah).
6. Abdul-Malik bin Marwan, 66-86 H / 685-705 M
7. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 86-97 H / 705-715 M
8. Sulaiman bin Abdul-Malik, 97-99 H / 715-717 M
9. Umar II bin Abdul-Aziz, 99-102 H / 717-720 M
10. Yazid II bin Abdul-Malik, 102-106 H / 720-724 M
11. Hisyam bin Abdul-Malik, 106-126 H / 724-743 M
12. Al-Walid II bin Yazid II, 126-127 H / 743-744 M
13. Yazid III bin al-Walid, 127 H / 744 M
14. Ibrahim bin al-Walid, 127 H / 744 M
15. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira), 127-133 H / 744-750 M.

Pada masa Daulah Bani Umayyah perkembangan kebudayaan mengalami kemajuan dan juga bidang seni, terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni bangunan (arsitektur).

1. Seni Bahasa

Kemajuan seni bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan bahasa. Sedangkan kemajuan bahasa mengikuti kemajuan bangsa. Pada masa Daulah Bani Umayyah kaum muslimin sudah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Dengan sendirinya kosakata bahasa menjadi bertambah dengan kata-kata dan istilah-istilah baru yang tidak terdapat pada zaman sebelumnya.

Kota Basrah dan Kufah pada zaman itu merupakan pusat perkembangan ilmu dan sastra (adab). Di kedua kota itu orang-orang Arab muslim bertukar pikiran dalam diskusi-diskusi ilmiah dengan orang-orang dari bangsa yang telah mengalami kemajuan terlebih dahulu. Di kota itu pula banyak kaum muslimin yang aktif menyusun dan menuangkan karya mereka dalam berbagai bidang ilmu. Maka dengan demikian berkembanglah ilmu tata bahasa (Ilmu Nahwu dan sharaf) dan Ilmu Balaghah, serta banyak pula lahir-lahir penyair-penyair terkenal.

2. Seni Rupa

Seni rupa yang berkembang pada zaman Daulah Bani Umayyah hanyalah seni ukir, seni pahat, sama halnya dengan zaman permulaan, seni ukir yang berkembang pesat pada zaman itu ialah penggunaan khat arab (kaligrafi) sebagai motif ukiran.

Yang terkenal dan maju ialah seni ukir di dinding tembok. Banyak Al-Qur'an, Hadits Nabi dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok dinding bangunan masjid, istana dan gedung-gedung.

3. Seni Suara

Perkembangan seni suara pada zaman pemerintahan Daulat Bani Umayyah yang terpenting ialah Qira'atul Qur'an, Qasidah, Musik dan lagu-lagu lainnya yang bertema cinta kasih.

4. Seni Bangunan (Arsitektur)

Seni bangunan atau Arsitektur pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah pada umumnya masih berpusat pada seni bangunan sipil, seperti bangunan kota Damaskus, kota Kairuwan, kota Al-Zahra. Adapun seni bangunan agama antara lain bangunan Masjid Damaskus dan Masjid Kairuwan, begitu juga seni bangunan yang terdapat pada benteng-benteng pertahanan masa itu.

Adapun kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, berkembangnya dilakukan dengan jalan memberikan dorongan atau motivasi dari para khalifah. Para khalifah selaku memberikan hadiah-hadiah cukup besar bagi para ulama, ilmuwan serta para seniman yang berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan di sediakan anggaran oleh negara, itulah sebabnya ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat.

Pusat penyebaran ilmu pengetahuan pada masa itu terdapat di masjid-masjid. Di masjid-masjid itulah terdapat kelompok belajar dengan masing-masing gurunya yang mengajar ilmu pengetahuan agama dan umum ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada saat itu antara lain ialah, ilmu Qira'at, Tafsir, Hadits Fikih, Nahwu, Balaqhah dan lain-lain.

Untuk perkembangan ilmu Hadits sendiri terjadi setelah ditemukan banyak penyimpangan dan penyelewengan dalam meriwayatkan hadits atau setelah diketahui banyaknya hadits-hadits palsu yang

dibuat oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik.

Karena itulah dirasakan adanya keperluan untuk menyusun buku hadits. Di antara para ahli Hadits (Muhaddits) yang terkenal masa itu ialah Muhammad bin Syihab A-Zuhri, beliau pula yang mula-mula menyusun ilmu hadits dan mula-mula membukukan perkataan, perbuatan, ketepatan ataupun sifat-sifat Nabi saw. yang.

Daulah Umayyah memegang tampuk kekhalifahan selama dua periode, di Suriah hampir satu abad, yaitu sejak 30-132 H atau 660-750 M dan di Spanyol selama 275 tahun, yaitu 756-1031 M. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Daulah Umayyah telah memasuki benua Eropa bahkan telah mencapai wilayah Byzantium.

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah dilakukan berbagai perubahan dalam pemerintahan. Mengingat berbagai pengamalannya yang pernah menjadi Gubernur di Syam, Mu'awiyah melakukan perubahan pemerintahan, yaitu membentuk jawatan perhubungan (jawatan pos) dan jawatan pendaftaran. Mu'awiyah menduduki jabatan sebagai Khalifah selama hampir 20 tahun.

Penyebaran Islam pada kekhalifahan Bani Umayyah meliputi wilayah Asia Kecil, yaitu kerajaan Romawi (Konstantinopel), Asia Utara sampai ke wilayah Spanyol, dan Selat Jabal Tarik, hingga mencapai Asia Tengah sampai perbatasan Tiongkok (China).

Kekhalifahan Islam saat ini telah lenyap, namun masih tergambar jelas sisa-sisa kejayaannya sampai kini. Masa Bani Umayyah hanyalah bagian kecil dari goresan sejarah yang telah ditorehkan. Sejarah hanya menceritakan fakta dan interpretasi. Setiap masa

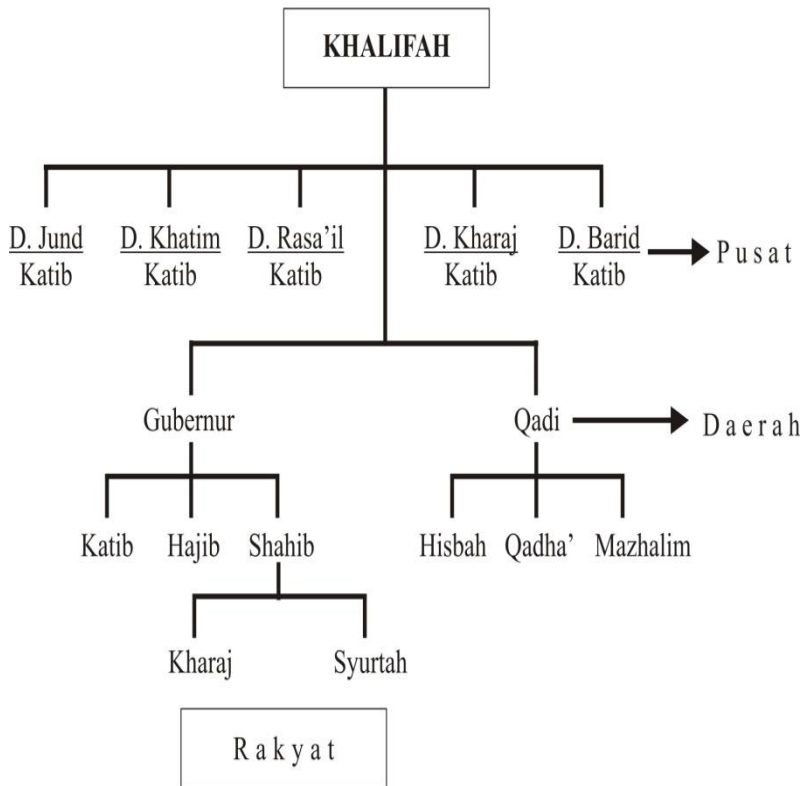
manusia ada kelebihan dan kekurangannya, namun apabila al Islam masih ditegakkan maka itulah hal yang pokok, karena tegaknya syariat Islam di muka bumi adalah suatu keharusan. Dengan kesinambungannya melanjutkan kehidupan Islam sejak ditegakkannya oleh Rasulullah Muhammad saw. di Madinah al-Munawarah, kekhilafahan ini meluaskan dakwah Islam sampai ke sepertiga bumi. Di saat bangsa-bangsa lain masih tidur pulas, maka ummat Islam membangun kejayaannya dan membangkitkan manusia serta menjadikan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri khusus dari praktek pemerintahan Dinasti Umayyah :

1. Unsur pengikat bangsa ditekankan pada kesatuan politik dan ekonomi
2. Khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif
3. Kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi kedudukan syaikh (kepala suku) Arab, karenanya siapa saja boleh bertemu langsung dengan khalifah untuk mengadakan haknya.
4. Dinasti Umayyah lebih banyak mengarahkan kebijaksanaan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan Negara
5. Dinasti Umayyah bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab duduk dalam pemerintahan
6. Qadhi (hakim) mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara
7. Dinasti Umayyah kurang melaksanakan musyawarah, karenanya kekuasaan khalifah mulai bersifat absolut meski belum menonjol

8. Bentuk pemerintahan monarki, tetapi tetap menggunakan istilah khalifah

STRUKTUR PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH



Fatmawati Hilal

2. Dinasti Abbasiyah (132-656 H./750-1258 M.)

Setelah Dinasti Umayyah runtuh, kekuasaan khilafah jatuh ke tangan Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al- Abbas, paman Rasulullah, sementara Khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah Ash-Sahffah bin Muhammad bin Ali bin Abdulah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berdirinya Dinasti Abbasiyah merupakan hasil perjuangan gerakan politik yang dipimpin oleh Abu al-Abbas dibantu oleh kaum Syi'ah dan orang-orang Persi.

Kebijakan terpenting yang dilakukan Al-Manshur adalah memindahkan ibukota kerajaan ke Baghdad (762 M.), yang mulanya di pindahkan ke Kufah dan Hasyimiyah, namun tidak aman karena dekat dengan pendukung Syi'ah yang sangat pro Ali.

Sistem pemerintahan yang dikembangkan Bani Abbas merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahan. Bani Abbas mengembangkan system pemerintahan dengan mengacu pada empat aspek, yaitu aspek *khilafah*, *wizarah*, *hijabah* dan *kitabah*.

1. Apek Khilafah

Berbeda dengan pemerintahan Bani Umayyah sebelumnya, Bani Abbas menyatukan kekuasaan agama dan politik. Perhatian Bani Abbasiyah terhadap agama juga dikarenakan pertimbangan politis, yaitu untuk memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan mereka terhadap rakyat. Pemanfaatan bahasa agama pertama kali dalam pemerintahan ini terlihat dalam pernyataan Al-Manshur bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi. Pengertian ini telah menggeser pengertian khalifah dalam Islam. Pada masa Khulafaur

Rasyidin, para sahabat hanya mengakui bahwa mereka adalah khalifah Rasulullah sebagai pemimpin politik dan agama, bukan sebagai Rasul. Karenanya, Khulafaur Rasyidin tidak meyakini diri mereka mutlak benar dan harus diikuti.

Pernyataan Al-Manshur menunjukkan bahwa khalifah Bani Abbasiyah memerintah berdasarkan mandate Tuhan, bukan pilihan rakyat. Oleh karenanya, kekuasaannya adalah suci dan mutlak serta harus dipatuhi oleh umat. Para khalifah Bani Abbasiyah mengakui bahwa diri mereka adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi (*The shadow of God on the Earth*) dan khalifah Tuhan, bukan khalifah Rasul. Berdasarkan prinsip ini, kekuasaan khalifah bersifat absolut dan tidak boleh digantikan kecuali setelah meninggal.

2. Aspek Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala Negara. Sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa sebelumnya wizarah telah ada, tetapi belum terlembagakan. Rasulullah saw. dibantu oleh Abu Bakar dalam menyelesaikan urusan-urusan kenegaraan. Masa Abu Bakar ia dibantu oleh Umar bin Khattab, dan masa Bani Umayyah, wazir hanya berfungsi sebagai penasihat.

Di masa Bani Abbasiyah ini, wazir mulai dilembagakan. Wazir memiliki tugas sebagai tangan kanan khalifah. Wazir berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah bahkan hakim. Wazir juga berperan mengkoordinir departemen-departemen (*diwan*), seperti *diwan al-kharaj* (departemen perpajakan), *diwan al-jaisy* (departemen pertahanan), *diwan baitul mal* (departemen keuangan).

Al-Mawardi, ahli tata Negara pada masa Bani Abbas membagi wazir ke dalam dua bentuk : *Pertama, wazir tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan Negara. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen (perdana menteri). Demikian besarnya peranan wazir tafwidh ini, maka yang menduduki jabatan adalah orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua, wazir tanfidz*, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijakan yang digariskan oleh *wazir tafwidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

3. Aspek Kitabah

Besarnya pengaruh wazir dalam pemerintahan membutuhkan tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinir masing-masing departemen. Untuk itu, wazirpun mengangkat para katib untuk menempati pos-posnya. Di antara jabatan katib ini adalah *katib al-rasa'il*, *katib al-kharaj*, *katib al-jund*, *katib al-syurthah* dan *katib al-qadhi*. Posisi paling strategis dan penting adalah jabatan *katib al-rasa'il*. Ia bertugas mengumumkan keputusan atau undang-undang, menyusun dan mengkonsep surat-surat politik dengan bahasa yang baik dan indah sebelum disahkan oleh khalifah serta mengeluarkan surat-surat resmi negara. Itulah sebabnya khalifah memilih *katib al-rasa'il* ini dari kalangan ahli sastra. *Katib al-rasa'il* ini dapat disebut juga asisten pribadi khalifah atau Menteri Sekertaris Negara, karena dia duduk berdampingan dengan khalifah dalam menentukan kebijaksanaan negara dan mengumumkannya dalam masyarakat.

4. Aspek Hijabah (pengawal khalifah)

Dalam sistem politik Bani Abbasiyah, hajib adalah pengawal khalifah yang bertugas dan berwenang menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu dengan khalifah Bani

Abbasiyah. Mereka bertugas menjaga keselamatan dan keamanan khalifah. Hajib nampaknya menjadi suatu kebutuhan dalam pemerintahan. Kompleksnya permasalahan kenegaraan dan kemasyarakatan serta luasnya daerah pemerintahan Bani Abbas menuntut perlunya khalifah bersikap ekstra hati-hati terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat menimpa diri mereka. Jadi dapat dipahami bahwa hajib ini kurang lebih sama dengan pasukan pengawal pengamanan presiden pada masa sekarang.

Para khalifah Bani Abbasiyah berjumlah 37 khalifah, mereka adalah:

1. Abul Abbas As-Shaffah (Pendiri) 749-754 M.
 2. Abu Ja'far Al-Manshur 754-775 M.
 3. Abu Abdullah Muhammad Al Mahdi 775-785 M
 4. Abu Muhammad Musa Al-Hadi 785-786 M.
 5. Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid 786-809 M.
 6. Abu Musa Muhammad Al-Amin 809-813 M.
- ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya.
- Interaksi
7. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun 813-833 M.
 8. Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tashim 833-842 M.
 9. Abu Ja'far Harun Al-Watsiq 842-847 M.
 10. Abu Fadl Ja'far Al-Mutawakil 847-861 M.
 11. Abu Ja'far Muhammad Al-Muntashir 861-862 M.
 12. Abul Abbas Ahmad Al-Musta'in 862-866 M.
 13. Abu Abdullah Muhammad Al-Mu'taz 866-869 M.
 14. Abu Ishaq Muhammad Al-Muhtadi 869-870 M.
 15. Abu Abbas Ahmad Al-Mu'tamid 870-892 M.
 16. Abul Abbas Ahmad Al-Mu'tadid 892-902 M.
 17. Abul Muhammad Ali Al-Muktafi 902-905 M.
 18. Abul Fadl Ja'far Al-Muqtadir 905-932 M.
 19. Abu Mansur Muhammad Al-Qahir 932-934 M.
 20. Abul Abbas Ahmad Ar-Radi 934-940 M.

21. Abu Ishaq Ibrahim Al-Muttaqi 940-944 M.
22. Abul Qasim Abdullah Al-Mustaqfi 944-946 M.
23. Abul Qasim Al-Fadl Al-Mu'ti 946-974 M.
24. Abul Fadl Abdul Karim At-Thai 974-991 M.
25. Abul Abbas Ahmad Al-Qadir 991-1031 M.
26. Abu Ja'far Abdullah Al-Qaim 1031-1075 M.
27. Abul Qasim Abdullah Al-Muqtadi 1075-1094 M.
28. Abul Abbas Ahmad Al-Mustadzir 1094-1118 M.
29. Abu Manshur Al-Fadl Al-Mustarsyid 1118-1135 M.
30. Abu Ja'far Al-Mansur Ar-Rasyid 1135-1136 M.
31. Abu Abdullah Muhammad Al-Muqtafi 1136-1160 M.
32. Abu Mudzafar Al-Mustanjid 1160-1170 M.
33. Abu Muhammad Al-Hasan Al-Mustadi 1170-1180 M.
34. Abu Al-Abbas Ahmad An-Nasir 1180-1225 M.
35. Abu Muhammad Az-Zahir 1225-1226 M.
36. Abu Ja'far Al-Mansur Al-Mustansir 1226-1242 M.
37. Abu Ahmad Abdullah Al-Mu'tashim Billah 1242-1258 M.

Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari Timur ke Barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Iraq, Persi sampai ke Cina. Kondisi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi trend dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendengarkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan pada masa ini diantaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al Mosuly dan anaknya Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa Borjuis mulai dari pakaian, makanan, dan

hadirnya pelayan-memiliki seribu pelayan wanita di istananya dengan berbagai keahlian.

Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Mawalli dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistim administrasi dari tradisi setempat (Persia) mengambil beberapa pegawai dan Menteri dari bangsa Persia dan meletakan ibu kota kerajaannya di Baghdad, wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Aria dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi.

Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan, melainkan berdasarkan jabatan seseorang seperti menurut Jarzid Zaidan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam 2 kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah (Bani Hasyim), para pembesar negara (Menteri, gubernur dan panglima), kaum bangsawan non Bani Hasyim (Quraisy) pada umumnya, para petugas khusus, tentara dan pembantu Istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar dan penguasa buruh dan petani.

Sistem pemerintahan pada masa daulah Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode, yaitu:

1. Periode I atau periode pengaruh Arab dan Persia I, terjadi pada tahun 132-232 H/750-847 M. Berakhirnya tahap (periode) ini seiring meninggalnya khalifah Al-Wasiq.
2. Periode II atau periode pegaruh Turki I, yakni tahun 232-334 H /847-945 M dimana Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan.

3. Periode III atau periode pengaruh Persia II (334-447 H /945-1055 M), yakni kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah.
4. Periode IV atau periode pengaruh Turki II (447-590 H/1055-1194 M), yakni masa kekuasaan daulat Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah sampai datangnya pengaruh lain seperti invasi dari bangsa Tartar dan ekspansi bani Utsmani.

Adapun perpolitikan yang dijalankan dalam sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah periode I adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah yang mempertahankan keturunan Arab murni dibantu oleh Wazir, Menteri, Gubernur dan para Panglima beserta pegawai-pegawai yang berasal dari berbagai bangsa dan pada masa ini yang sedang banyak di angkat dari golongan Mawali turunan Persia.
- b. Kota Bagdad sebagai ibukota negara, menjadi pusat kegiatan politik, sosial dan kebudayaan, dijadikan kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa dan keyakinan sehingga terkumpul di sana bangsa-bangsa Arab, Turki, Persia, Rumawi, Qibthi, Hindi, Barbani, Kurdi, dan sebagainya.
- c. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan para pembesar lainnya membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Pada waktu itu akal dan pikiran dibebaskan benar-benar dari belenggu taqlid, hal mana menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan

pendapat dalam segala bidang termasuk bidang aqidah, filsafat, ibadah dan sebagainya.

- e. Para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam.

Adapun perpolitikan yang dijalankan dalam sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah periode II-III-IV adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan khalifah sudah lemah bahkan kadang-kadang hanya sebagai lambang saja. Kekuasaan sebenarnya ditangan wazir atau panglima atau sultan yang berkuasa di Bagdad sehingga kadang-kadang nasib khalifah tergantung pada selera penguasa di angkat, diturunkan atau bahkan dibunuh.
- b. Kota Bagdad bukan satu-satunya kota internasional dan terbesar, sebab masing-masing kerajaan berlomba-lomba untuk mendirikan kota yang menyaingi Bagdad. Di Barat tumbuh kota Cordón, Toledo, Sevilla. Di Afrika kota Koiruan, Tunisisa dan Kairo. Di Syiria kota Mush dan Halab, di Timur tumbuh kota Bukhara.
- c. Keadaan politik dan militer merosot, ilmu pengetahuan tambah maju dengan pesatnya. Hal itu disebabkan masing-masing kerajaan, masing-masing amir atau khalifah atau sultan berlomba-lomba untuk memajukan ilmu pengetahuan, berlomba-lomba untuk mendirikan perpustakaan, mengumpulkan para ilmuwan para pengarang, penterjemah, memberi kedudukan terhormat kepada ulama dan pujangga.

Perundangan dan Hukum

Pada periode Abbasiyah, lembaga hukum disebut juga dengan *al-nidham al-madhalim*, yaitu

lembaga yang diberi tugas memberikan penjelasan dan pembinaan dalam hukum, menegakkan ketertiban hukum yang berada dalam wilayah pemerintahan ataupun yang berada dalam lingkungan masyarakat serta memutuskan perkara-perkara hukum.

Lembaga ini terdiri dari tiga macam bagian, antara lain:

a. *Al-Qadha*

Badan ini bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari al-Qur'an, sunnah Rasul, atau *ijma'* dan atau berdasarkan *ijtihad*. Badan ini juga dipimpin oleh *qadhi*, yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan bahkan sampai dengan masalah *waqaf*. Pada masa ini, di setiap wilayah diangkat beberapa hakim, dan setiap perkara diselesaikan sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat.

b. *Wilayatul Hisbah*

Pejabat badan *al-hisbat* disebut juga dengan *al-muhtasib*, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mengawasi hukum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang butuh penanganan segera. Mereka juga bertugas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi ketertiban pasar, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syari'at.

c. *Wilayatul Madhalim*

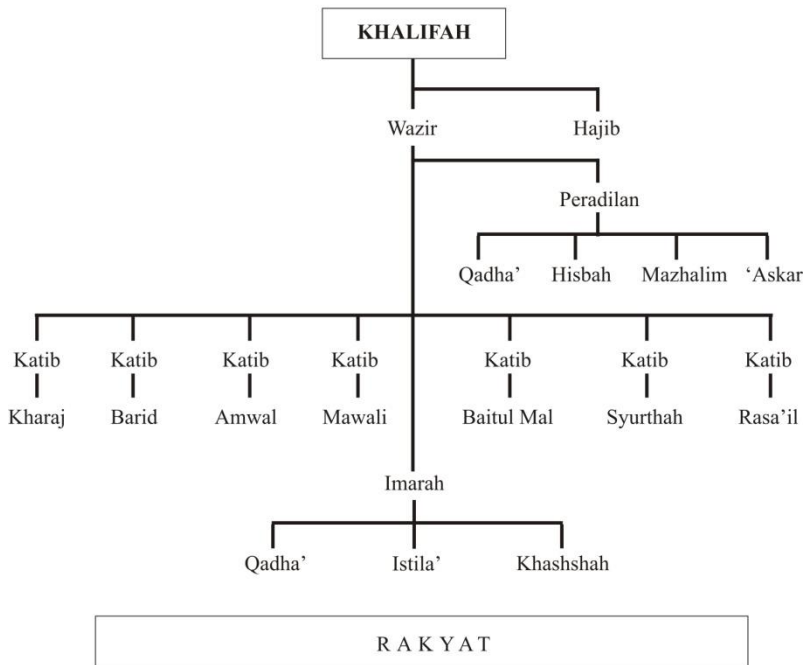
Pejabat badan *al-madhalim* disebut dengan *qadhi al-madhalim* atau *shahib al-madhalim*. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari pada *al-qadha* dan *al-hisbat*, karena disini *qadhi al-madhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* dan *muhtasib*, meninjau kembali beberapa putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan

perkara banding. Dapat dikatakan pula bahwa lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Yaitu, memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa dan hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ciri khas pemerintahan Dinasti Abbasiyah antara lain :

1. Unsur pengikat bangsa adalah agama
2. Jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak dipisahkan dari Negara
3. Kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh seorang wazir
4. Dinasti Abbasiyah lebih menekankan kebijaksanaannya pada konsolidasi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan memanfaatkannya untuk pengembangan penelitian-penelitian ilmiah di berbagai bidang, sehingga mencapai prestasi gemilang.
5. Dinasti Abbasiyah bersifat universal, karena muslim Arab dan non Arab adalah sama
6. Corak pemerintahannya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia.
7. Kekuasaan khalifah yang bersifat absolut sangat menonjol
8. Penerangan dan pembinaan hukum digalakkan, serta pembinaan akhlak masyarakat sangat diperhatikan.

STRUKTUR PEMERINTAHAN ABBASIYAH



Fatmawati Hilal

D. Pemerintahan Islam Pasca Khilafah

Betapa beragamnya sistem dan bentuk pemerintahan di kalangan umat Islam di zaman modern ini, antara lain :

1. Turki

Babak ke empat atau perubahan terakhir dari praktek pemerintahan di Dunia Islam terjadi di abad XX yang dipelopori oleh Mushthafa Kemal Attaturk di tubuh Kerajaan Turki Usmani. Kerajaan ini menjadi pemerintahan berbentuk republik dan disusun pula konstitusinya pada tahun 1921, dan ditegaskan bahwa

kedaulatan terletak di tangan rakyat. Perubahan ini terjadi atas usul Mushthafa Kemal kepada Dewan Nasional Turki (dibentuk tahun 1920) untuk menghapuskan lembaga kesultanan yang disetujui Dewan di tahun 1922, dan sebagai gantinya dibentuk Republik Turki pada bulan Oktober 1923 dan Mushthafa Kemal dipilih sebagai Presidennya yang berkedudukan di kota Ankara.

Sebagai imbalan atas penghapusan lembaga itu, usul golongan Islam agar satu artikel ditambahkan dalam konstitusi yang menyatakan agama resmi negara Republik Turki adalah Islam, diterima oleh Dewan. Dalam pada itu Khalifah di Istanbul dibiarkan tetap memegang kekuasaan sucinya. Tapi karna kedua penguasa ini, Khalifah dan Presiders Baling bersaing dan sama-sama bersikap sebagai Kepala Negara, maka akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924 lembaga kekhalifahan` pun dihapuskan oleh Dewan Nasional sekaligus berakhirnya pernerintahan bentuk khilafah di Dunia Islam. Sejak itu Turki menjadi negara republik yang murni.

Tampaknya baik Mushthafa Kemal maupun Dewan Nasional belum puas dengan terobosan itu. Mereka ingin membebaskan Negara Turki dari label agama. Untuk itu, di tahun 1928 artikel 2 konstitusi tentang agama negara dihapuskan, dan di tahun 1937 prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam konstitusi. Dengan perubahan itu, Konstitusi Turki Pasal 1 menyatakan bahwa negara Turki adalah negara republik, nasionalis, kerakyatan, kenegaraan, sekularis dan revolusionis. Kedaulatan negara menurut Pasal 3 tanpa syarat berada di tangan bangsa, dan semua warga negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki (Pasal 88).

Sebelum penghapusan artikel 2 itu, Mushthafa Kemal telah menghapuskan institusi agama, seperti Biro Syaikh al-Islam, Kementerian Syariat, dan Mahkamah Syariat di tahun 1924. Perkawinan tidak lagi menurut syariat tetapi menurut hukum sipil. Demikian juga sekolah-sekolah agama ditutup, dan pendidikan agama ditiadakan di sekolah-sekolah. Sebagai gantinya didirikan sekolah yang khusus membina imam dan khatib, dan di Universitas Istanbul didirikan Fakultas Ilahiyat. Semua lembaga pendidikan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Berbagai kebijaksanaan dan keputusan politik Mushthafa Kemal yang selalu didukung oleh Dewan Nasional tersebut, bertujuan untuk membawa Republik Turki menjadi negara sekuler murni dan negara moden yang maju. Mushthafa Kemal dengan paham sekularismenya, menurut Harun Nasution, tidak bermaksud menghilangkan Islam dari masyarakat Turki. Tujuannya adalah menghilangkan kekuasaan agama di lapangan politik dan pemerintahan.

Bersamaan dengan semangat sekularisme Mushthafa Kemal dan Para pengikutnya untuk membawa Negara Turki mengikuti pola hidup dan budaya Barat, semangat keIslaman rakyat tetap hidup. Fenomena ini mendapat tanggapan dari pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan baru terhadap Islam. Pelajaran agama di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, sekolah imam dan khatib, dan Fakultas Teologi yang sejak tahun 1935 ditutup dan dihapuskan, sejak tahun 1946 dihidupkan kembali sebagai sikap konsesi pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang tak dapat dibendung.

2. Mesir

Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik sejak tahun 1952 dengan nama resmi Republik Arab Mesir. Sebelumnya, sejak tahun 1952 setelah merdeka dari Inggris, Mesir adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Pada tahun 1952, pemerintahan monarki itu dijatuhkan oleh Gamal Abdul Nasser, dan mengubahnya menjadi negara republik. Konstitusi 1971 dan diamandemen tahun 1980 tetap bertahan dan berlaku secara efektif. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden dengan masa jabatan 6 tahun. Presiden dipilih oleh Dewan Rakyat yang beranggotakan 458 orang. Sejumlah 448 orang dipilih langsung oleh rakyat, dan 10 orang anggota lagi dipilih oleh presiden. Presiden diberi hak menunjuk wakil presiden, memilihi anggota kabinet, membubarkannya dan membentuk anggota kabinet baru .

Konstitusi 1980 menyatakan Republik Arab Mesir adalah negara demokrasi dan sosialis. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyat adalah sumber kekuasaan negara. Semua warga negara memperoleh status persamaan di depan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, asal keturunan, agama atau keyakinan. Kepada warga negara diberikan hak kebebasan menyatakan pendapat, membentuk dan memasuki partai politik.

Ditetapkan pula Islam adalah agama negara, bahasa Arab bahasa resmi negara, dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang. Tapi dalam prakteknya hukum Islam yang berlaku secara utuh hanya di bidang-bidang pembagian warisan, perkawinan dan wakaf. Sedangkan bidang-bidang

perdata lain dan pidana, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama satu-satunya. Ia hanya sebagai salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir.

3. Irak.

Irak adalah negara republik di bagian barat daya Asia. Nama resmi Republik Irak. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden. Konstitusi 22 September 1968 menyatakan, Republik Irak adalah negara demokrasi rakyat dan negara berdaulat. Politik ekonomi negara didasarkan pada sosialisme. Karma itu negara Irak disebut juga negara sosialis demokratis. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Dewan Komando Revolusioner. Anggota Dewan ini adalah para pemimpin penting partai Ba'th, Partai Politik Sosialis Arab. Para pemimpin Dewan dan Partai adalah para pejabat teras militer. Dewan Komando Revolusioner dikepalai oleh presiden, yang juga komandan angkatan bersenjata. Dewan Komando ini bertugas membuat dan menetapkan kebijaksanaan umum pemerintah, mengumumkan undang-undang hingga pemilihan Dewan Nasional. Administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Menteri yang diangkat oleh presiden. Anggota lembaga legislatif beranggotakan 250 orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sistem peradilan disamping peradilan lain, juga ada peradilan agama menurut syariat Islam. Peradilan ini hanya menangani masalah-masalah status perorangan dan masalah-masalah agama berdasarkan hukum Islam tradisional. Demikian juga penganut agama lain, seperti Kristen dan Yahudi masing-masing memiliki peradilan agama.

4. Syria

Syiria adalah negara republik yang merdeka sejak tahun 1948. Nama resmi Republik Arab Syria. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden, yang paling berkuasa di negara itu. Konstitusi 1973 menyatakan bahwa Syria adalah negara "demokrasi rakyat sosialis". Presiden dipilih oleh rakyat sekali dalam tujuh tahun. Dewan Rakyat yang beranggotakan 195 orang adalah pembuat undang-undang dan dipilih sekali empat tahun.

Di bawah Konstitusi Syria, presiden juga adalah pemimpin Partai Bath yang mengontrol mekanisme politik pemerintahan Syria. Partai Politik Sosialis Arab ini bersama empat partai lain membentuk organisasi sosialis yang disebut Front Progresif Nasional untuk memperjuangkan cita-cita paham sosialisme.

Disamping peradilan umum, di tubuh organisasi pemerintahan Republik Arab Syria terdapat juga peradilan agama. Setiap komunitas agama mempunyai peradilan untuk mengurus masalah-masalah perkawinan, perceraian dan harta warisan.

5. Arab Saudi

Negara ini adalah berbentuk monarki atau kerajaan. Nama resmi, Kerajaan Arab Saudi (*Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah*). Negara kerajaan ini dibentuk pada tahun 1932 oleh Abdul Aziz al-Saud. Kepala negara dan pemerintahan adalah raja. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh para pembantu raja yaitu dewan menteri dan bertanggung jawab kepada raja. Para menteri yang memimpin departemen masing-masing berhak memberikan usulan dan saran kepada raja. Raja juga berkedudukan sebagai pembuat undang-undang, sebagai pemimpin politik dan imam atau

pemimpin agama. Raja dipilih adalah dan dari keluarga besar Saudi. Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki konstitusi tertulis. Sistem hukum yang dipakai adalah syariat Islam yang berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum Kerajaan. Artinya baik Al-Qur'an maupun produk hukum hasil ijtihad para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan Undang-Undang Dasar Kerajaan Arab Saudi. Syariat Islam dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syariah bersama para ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat kerajaan.

Walaupun Arab Saudi negara monarki dan ber hukum syariat Islam, namun tidak berarti menganut "monarki absolut" dan "monarki theokrasi". Sebab, kekuasaan raja dibatasi oleh Syariat itu sendiri dan ia harus tunduk kepadanya, dan di tubuh organisasi Kerajaan itu terdapat pula Majelis Syura yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh raja.

6. *Jordan*

Negara ini memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris di tahun 1946. Negara ini juga berbentuk monarki, tapi monarki yang berkonstitusi. Nama resmi adalah Kerajaan Jordania Hasyimiyah, dan diperintah oleh seorang raja.

Menurut Konstitusi 1952, raja juga sebagai panglima angkatan bersenjata, mengangkat perdana menteri dan anggota kabinet sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang terdiri dari Senat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Raja. Senat beranggotakan 60 orang yang diangkat oleh Raja. Anggota DPR sebanyak 60 orang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan yudikatif berada pada berbagai mahkamah yang bebas.

Islam adalah agama negara dan bahasa Arab bahasa resmi. Semua warga negara memperoleh

persamaan di depan hukum, dan memperoleh hak kebebasan menyatakan pendapat. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum utama dalam pembuatan hukum dan undang-undang.

Negara lain yang mengambil bentuk monarki berkonstitusi adalah Maroko. Undang-undang Dasarnya menyatakan bahwa Maroko adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis. Kedaulatan berada di tangan bangsa, dan Islam adalah agama negara. Semua warga negara bebas menyatakan pendapat. Negara Kerajaan ini menganut sistem banyak partai. Hukum Islam hanya berlaku di bidang-bidang tertentu, yaitu perkawinan, pembagian harta warisan dan wakaf menurut mazhab Maliki.

7. *Uni Emirat Arab*

Negara ini merdeka pada tahun 1971 dari Inggris yang terletak di pantai timur Semenanjung Arab. Nama resmi adalah *Al-Imarah al-'Arabiyah al-Muttahidah* (United Arab Emirates). Uni Emirat Arab adalah negara federasi Islam dari tujuh keemiran, yaitu Abu Dhabi, Al-Fujairah, Dubai, Sharjah, Umm al-Qaiwain, Ajman dan Ras al-Khaimah. Kepala negara serikat atau federasi tujuh keemiran ini adalah presiden. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Konstitusi 2 Desember 1971 menyebutkan setup keemiran diperintah oleh seorang *emir* yang mengontrol urusan dalam negeri. Pemerintah federal Emirat mengawasi urusan luar negeri. Ketujuh emir membentuk Dewan Pemerintahan Tertinggi yang bertugas memilih presiden dan wakilnya, salah seorang dari mereka, sebagai kepala negara federal, mengangkat perdana menteri yang memimpin pemerintahan dan dibantu oleh Deputy menteri dan kabinet yang disebut Dewan Menteri.

Lembaga legislatif disebut Dewan Federal Nasional yang beranggotakan 40 orang, wakil-wakil terpilih dari tujuh keemiran. Abu Dhabi dan Dhubai masing-masing mendapat 8 kursi, Sharjah dan Ras al-Khaimah masing-masing 6 kursi, dan tiga emirat lain masing-masing 4 kursi. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Dewan Pemerintahan Tertinggi yang memegang kekuasaan eksekutif, hak inisiatif dan implementasi hukum federal. Perdana menteri dan menteri-menteri lain diangkat oleh presiden atas dasar konsultasi. Hukum Islam diberlakukan bagi semua warga negara. Sistem hukum terdiri dari undang-undang sipil dan hukum Syariat Islam.

SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).⁴⁴ Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Dari dua definisi ini disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 153 yang dikutip dari Bernard Lewis, et. Al, *The Encyclopedia of Islam* (Vol. 2; Leiden: E.J. Brill, 1978), h. 638.

tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian Fikih *Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fikih *Siyasah* akan tercapai.

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.⁴⁵

⁴⁵45 Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 25-40.

Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan :

- a). Imamah, hak dan kewajibannya
- b). Rakyat, hak dan kewajibannya
- c). Bai'at
- d). *Waliyu al-'ahdi*
- e). Perwakilan
- f). *Ahlu halli wa al-'aqdi* dan
- g). *Wuzarah* dan perbandingannya.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang *siyasah dusturiyah* itu dibagi kepada empat macam;

1. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya UUD 1945.

2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sulthah al-tasyri'iyyah*; maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam

mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif).

Di Indonesia menggunakan model *trias politica* (istilah ini dipopulerkan oleh Montesquieu- Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh J. J Rousseau Swiss; suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam fikih siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- b). Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
- c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

3. Ummah

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu :

- a). Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan
- b). Penganut suatu agama atau pengikut Nabi
- c). Khalayak ramai dan
- d). Umum, seluruh umat manusia.

Orientalis Barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas).

Akan tetapi Abdul Rasyid Meton, guru besar dari Malaysia tetap menganggap bahwa komunitas dengan ummah tidak sama. *Community* merupakan

sekelompok masyarakat yang komunal memiliki persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa, sedangkan ummah berlaku universal yang didasarkan persamaan agama, sehingga menembus ras, suku, bahasa maupun batas-batas geografis. Ummah diaktualisasikan melalui kesamaan ideologis yang disandarkan pada ke-Esaan Allah yang terarah pada pencapaian kebahagiaan dunia akhirat.

Menurut 'Ali Syari'ati; ummah memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas.⁴⁶ Jika dikontekstualisasikan dengan makna ummah dalam terminologi makiyyah dan madaniyyah mempunyai arti sekelompok agama tawhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya. Quraishy Shihab mengartikan ummah, sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya.⁴⁷

Dalam jangkauannya makna ummah juga berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasar atas persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku-bangsa) dan primordialisme (paling diutamakan).

⁴⁶ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, diterjemahkan oleh Muhammad Faishol Hasanuddin (Bandar Lampung-Jakarta: YAPI, 1990), h. 36.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an :Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 327.

Abdul Rasyid Meton membandingkan antara nasionalisme dan ummah.⁴⁸

- a). Ummah menekankan kesetiaan manusia karena sisi kemanusiannya, sedangkan nasionalisme hanya kepada negara saja.
- b). Legitimasi nasionalisme adalah negara dan institusi-institusinya, sedangkan ummah adalah syari'ah.
- c). Ummah diikat dengan tawhid (keesaan Allah), adapun nasionalisme berbasis etnik, bahasa, ras dll.
- d). Ummah bersifat universal, sedangkan nasionalisme membatasi manusia berdasarkan teritorial.
- e). Ummah berkonsep persaudaraan kemanusiaan, adapun nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan.
- f). Ummah menyatukan ummat seluruh dunia Islam, sedangkan nasionalisme memisahkan manusia pada bentuk negara-negara kebangsaan.

4. Syura atau demokrasi

Kata syura berasal dari akar kata *syawara-musyawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁴⁹ Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Format musyawarah dan obyeknya yang bersifat teknis,

⁴⁸Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* h. 178. Abdul Rashid Meton, *Political Science: An Islamic Perspective* (USA: St. Martin Inc, 1996), h. 79.

⁴⁹Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid I (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 434.

diserahkan kepada ummat Islam untuk merekayasa hal tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan.

Etika bermusyawarah bila berpedoman kepada QS. Ali-'Imran [3]: 159 dapat disimpulkan; a) bersikap lemah lembut b) mudah memberi maaf, jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat dan c) tawakkal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan, yang dilakukan secara optimal, sedangkan hasilnya diserahkan kepada kekuasaan Allah swt.

Cara bermusyawarah tidak ditentukan secara rinci oleh Allah. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, tidak berarti bahwa suara terbanyak itu mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas, kalau ternyata pendapat minoritas itu lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.⁵⁰

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat, *kratein* berarti pemerintahan. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.

⁵⁰ Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkan zakat. Sebagian besar sahabat senior yang dimotori Umar bin Khattab berpendapat bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat tetap Muslim dan tidak usah diperangi. Sementara sebagian kecil sahabat berpendapat supaya mereka diperangi, Abu Bakar memilih pendapat kedua. Pendapat ini akhirnya disetujui forum dan Abu Bakar pun memerangi mereka. Pada pemerintahan Umar, beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang pembagian harta rampasan perang berupa tanah Sawad (Irak), Sebagian besar sahabat yang dijurubicarai Bilal bin Rabah dan Abd. Rahman bin Auf berpendapat supaya tanah tersebut dibagi-bagi. Sedangkan sebagian kecil sahabat berpendapat supaya tanah tersebut dibiarkan tetap pada pemiliknya dan umat Islam hanya memungut pajaknya saja. Akhirnya, melalui dialog yang cukup alot, Umar bin Khattab memilih pendapat minoritas. Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 189.

Abraham Lincoln selanjutnya mengartikan demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ciri ini mensyaratkan adanya partisipasi rakyat untuk memutuskan masalah serta mengontrol pemerintah yang berkuasa. Menurut Sadek J. Sulaiman demokrasi memiliki prinsip kesamaan antara seluruh manusia, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras- suku, gender, agama ataupun status sosial.⁵¹

Namun demikian, bila dilihat lebih jauh pada praktek-praktek demokrasi yang dilakukan oleh Negara-negara Barat –yang dipandang sebagai daerah asal demokrasi-, maka ada beberapa catatan penting yang harus digaris bawahi untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan akhir bahwa syura dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, meski memiliki kesamaan.

Menurut Iqbal, demokrasi modern Barat telah kehilangan sisi-sisi spiritualnya. Akibatnya kemudian melahirkan praktik-praktik demokrasi Barat yang jauh dari etika, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Lebih lanjut Iqbal mengatakan bahwa demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat mengabaikan keberadaan agama. Parlemen yang merupakan salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan suatu hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, jikalau anggotanya menghendaki. Demokrasi hanya mengakui

⁵¹ Sadek J. Sulaiman, "Shura and Democracy", dalam Charles Khurzan, *Liberal Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 97.

rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dan tidak mengakui nilai-nilai wahyu.⁵²

Muhammad Iqbal misalnya, menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa disejajarkan dengan syura dalam Islam. *Pertama*, Tauhid sebagai landasan azasi; *Kedua*, Kepatuhan kepada hukum; *Ketiga*, Toleransi sesama warga; *Keempat*, Demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; *Kelima*, Penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.⁵³

Lebih jauh Quraish Shihab membuat perbedaan antara syura dan demokrasi. *Pertama*, Syura tidak memutlakkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas. *Kedua*, Perjanjian atau kontrak social antara pemimpin dan rakyat dalam syura mengacu kepada perjanjian Ilahi, sehingga terhindar dari praktik-praktik eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Sementara demokrasi tidak mempunyai landasan Ilahiyah. *Ketiga*, Karena tidak punya landasan Ilahiyah, demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan syura sudah tegas member batasan-batasan apa yang bisa dimusyawarahkan dan apa yang tidak.⁵⁴

Oleh karenanya, Jikalau umat Islam ingin menerapkan demokrasi, maka ia harus membuang noda sekularisme dan individualisme dari dalam demokrasi itu sendiri, karena bertentangan dengan

52Sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 192-194 yang Dikutip dari Parveen Feroze Hassan dari syair Iqbal "Bal-I Jibril." Lihat Parveen Feroze Hassan, *The Political Philosophy of Iqbal* (Lahore: Publisher United, 1978), h. 268.

53H. H. Bilgrimi, *Iqbal: Sekilas Tentang Hidup dan Pikiran-Pikirannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 81-84.

54M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (), h. 483-484.

nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas agama. Demokrasi dan syura memang bukanlah dua hal yang identik, tapi bukan pula dua hal yang harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan system nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

55

B. Hukum Mendirikan Negara

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya. Dimana Islam telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah berdasarkan hukum Islam. Dan telah berpuluh-puluh ayat yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan itu diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menjalankan pemerintahan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah swt. Allah berfirman :

...فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...

Terjemahnya :

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu”. (Q.S. Al-Maidah :48)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

•

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah : 188)

Mengingat pentingnya sebuah kepemimpinan dalam Islam, maka sebagian besar ulama menghukumi pendirian negara sebagai sebuah *Fardlu kifayah*. Karena negara adalah sebuah *thatiqah* (tuntunan operasional) satu-satunya yang secara syar'i dijadika oleh Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh.

C. Sebab-Sebab Timbulnya Aliran Politik Dalam Islam

Pemikiran tokoh-tokoh dalam politik Islam dapat dikategorikan menjadi dua periode yakni periode pra modern dan modern. Kedua masa itu pada hakikatnya para pemikir politik Islam bergulat pada upaya untuk mencari basis intelektual dari hubungan politik dan Islam. Pada masa pra modern pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh pemikiran yunani, melalui kajian filsafat. Sedangkan pada masa modern pengaruh politik barat terhadap politik Islamsudah masuk melalui imperialisme. Upaya-upaya dalam pencarian basis intelektual tersebut bertujuan untuk mendapatkan aspek-aspek yang baru dari relasi antara Islam dan politik diantaranya. *Pertama*, upaya untuk mencari sistem (*the nature of authority*). *Kedua*, upaya untuk mencari format pemerintahan. *Ketiga*, mencari rekonsiliasi atau titik temu antara realitas Islam dan realitas politik.

Di kalangan Umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan politik. *Aliran pertama* berpendapat bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh utama aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridla dan Abul A'la Maududi.

Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-Rasul yang lain, dengan tugas utama mengajak (dakwah) manusia kepada jalan Tuhannya dengan menjunjung tinggi nilai moral, dan Nabi tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Pendapat ini dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer diwakili oleh seorang ulama Mesir, Ali Abd al-Raziq, dalam risalahnya yang sangat ramai diperdebatkan, *al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Islam dan Dasar-Dasar Kekuasaan), pernah mengemukakan bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul dan juru dakwah, bukan seorang pemimpin negara.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Tetapi aliran ini pula menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian sekuler yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Salah satu tokoh yang

mendukung pendapat ini diantaranya adalah Mohammad Husein Haekal, Fazlur Rahman dan di Indonesia tokohnya Nurcholish Madjid.

Konsekuensi dari aliran ketiga itu, melahirkan pemahaman bahwa istilah *Islamic State* atau Negara Islam tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam. Yang ada adalah khilafah, yaitu suatu misi kaum Muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah swt., maupun Rasul-Nya. Adapun cara pelaksanaannya, Al-Qur'an tidak menunjukkan secara terperinci, tetapi dalam bentuk global saja.

D. Imamah, Khilafah, dan Syarat-Syaratnya

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti "pemimpin", ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan aimmah (pemimpin-pemimpin), sebagaimana dalam Al-Quran :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِذِينَ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan

hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,” (Q.S. Al-Anbiyaa : 73)
 وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya :

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".(Q.S. Al-Baqarah : 124)

Dengan demikian, (berdasarkan tinjauan arti imamah secara epistimologi), kata imam berarti “pemegang kekuasaan atas umat Islam”. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa “imamah itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat”.

Dalam arti lain khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’. Oleh karena itu tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia di bai’at oleh umat. Dan pengangkatan jabatan khalifah untuk seorang khalifah dengan bai’at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib mentaatinya.

Bai’at yang dilakukan terhadap seorang khalifah mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu syarat *in’iqad* dan syarat *afdhaliyah*. syarat *in’iqad* diantaranya mencakup; a) Muslim. b) Laki-laki. c) Baligh. d) Berakal. e) Adil. f) Merdeka. g) Mampu melaksanakan amanat khilafah. Sedangkan syarat *afdhaliyah* dari bai’at khilafah adalah; a).Tidak disyaratkan harus seorang

mujtahid. b). Tidak disyaratkan harus seorang yang pemberani dan politikus yang hebat dalam mengatur urusan rakyat dan kepentingan-kepentingan lain. c). Tidak disyaratkan harus seorang keturunan Quraisy. d). Tidak disyaratkan harus seorang keturunan Bani Hasyim atau keturunan Ali.

Adapun yang dimaksud dengan khilafah ialah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin didunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam kesegenap penjuru dunia. Seperti halnya dengan pengangkatan khilafah, dalam kekhilafahan pun terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Kekuasaan negeri itu haruslah mandiri (otonomi penuh), yaitu hanya bersandar kepada kaum muslimin, bukan kepada salah satu Negara kafir atau berada di bawah pengaruh Negara-negara kafir.
2. Keamanan bagi kaum muslimin dinegeri itu adalah keamanan Islam bukan keamanan kufur .
3. Negeri tersebut segera menerapkan Islam secara serentak dan menyeluruh, serta segera mengemban dakwah Islam.
4. Khilafah yang dibai'at harus memenuhi syarat-syarat in'iqad, meskipun tidak memenuhi syarat afdhaliyah (keutamaan).

E. Bai'at

Bai'at adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bai'at dinyatakan sebagai hak kaum muslimin, karena fakta bai'at itu sendiri menunjukkan hal semacam itu. Sebab, bai'at diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah bukan dari khalifah kepada kaum muslimin. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan terjadinya bai'at kaum

muslimin kepada Rasulullah saw. Seperti hadits Bukhari yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, berkata :

“Kami telah membai’at Rasulullah saw. Untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, juga agar kami menegakkan atau mengatakan yang haq dimanapun kami berada dan kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela”.

Selain itu masih banyak lagi hadits yang menerangkan bahwa bai’at berada ditangan kaum muslimin bukan detangan pemimpin. Jadi, bai’at kepada khalifah berada ditangan kaum muslimin dan menjadi hak mereka. Kaum musliminlah yang melakukan pembai’atan, dan hanya dengan bai’at merekalah akad khilafah tersebut bisa terwujud bagi seorang khalifah.

Sedangkan bai’at dapat dilkukan dengan secara langsung, yaitu dengan berjabat tangan atau secara tertulis melalui surat. Diperbolehkan pula bai’at dilaksanakan dengan cara lain dan sarana yang memungkinkan (misalnya telepon, faksimili, telegram dan lain-lain).Hanya saja disyaratkan agar bai’at itu dilaksanakan oleh orang yang sudah baligh. karena itu, berarti bai’at yang dilakukan oleh anka kecil hukumnya tidak sah.

Adapun lafadz bai’at tidak disyaratkan terikat dengan lafadz-lafadz tertentu. Akan tetapi harus mengandung makna “mengamalkan kitabullah dan sunah Rasulnya” bagi khalafah, dan harus mengandung makna “sanggup mentaati dalam

keadaan sudah ataupun senang, sulit ataupun lapang” bagi kaum muslimin yang membai’at.

F. Ahlul Halli wal Aqdi

Ahlul Halli wal Aqdi dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridha kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin. Seperti dalam hal pembai’atan, *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* dapat membai’at calon khalifah yang telah memenuhi syarat. Karena *ahlul halli* dianggap telah mewakili ridha kaum muslimin itu sendiri.

Maka ketika kita tarik pengertian *ahlul halli wal aqdi* tersebut kepada sistem pemerintahan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa MPR dan DPR merupakan *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* bagi segenap lapisan masyarakat.

SIYASAH DAULIYAH

A. Pengertian Siyasaah Dauliyah

Siyasah berasal dari kata يسوس، ساس (mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan), atau ساس القوم (mengaturkaum, memerintah dan memimpinnya). Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Siyasaah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.

Siyasaah dauliyah juga mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Dalam hubungan Internasional asas damai merupakan asas hubungan international. Alasannya adalah perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, dalam rangka mempertahankan diri. Konsekuensi dari asas damai sebagai hukum asal dalam hubungan internasional adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan maka :

- a) Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.
- b) Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh.
- c) Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai
- d) Memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi.

Subjek hukum dalam siyasah dauliyah adalah Negara, setiap Negara mempunyai kewajiban. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak-hak Negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Semua Negara yang ada di dunia ini adalah bertetangga, karena itu dalam hubungan antar Negara diterapkan kewajiban menghormati Negara sebagai tetangga Negara kita. Landasan dari kewajiban tersebut adalah: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatuapun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

B. Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah

1. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapakan hidup bahagia dan damai dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan

pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

2. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu

3. *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan adalah mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak didalam kesederajatan antarnegara dan antarbangsa

4. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara.

5. *Tasamuh* (Toleransi)

Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan

pada tempatnya setidaknya akan menetralsir ketegangan.

6. Kerja Sama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini.

7. Kebebasan, Kemerdekaan/ *Al-Huriyah*

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan bisa diperinci seperti kebebasan berfikir, kebebasan baragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta.

8. Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlakul Karimah*)

Prilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini selain itu prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi termasuk flora dan fauna.

C. Sejarah Siyasaah Dauliyah

1. Pada Masa Sebelum Islam

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber

terpenting dalam hubungan damai antar negara masa ini.

Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai peperangan. Perang sudah menjadi olahraga bagi suku-suku bangsa tersebut. Perjanjian antara Ramses III (Firaun Raja Mesir) dengan Kheta (Raja Asia Kecil) pada abad III sebelum Masehi, ini merupakan perjanjian yang paling tua di antara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya.

2. Pada Masa Islam

Pada umumnya, para penulis hukum internasional jarang sekali mengemukakan peran atau pengaruh hukum Islam terhadap hukum internasional. Padahal, kekuasaan sosial politik Islam pada masa kurang lebih tujuh ratus tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, dan masih banyak lagi. Ali Mansur berpendapat bahwa hukum Islam besar pengaruhnya terhadap hukum internasional, dengan alasan :

a. Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada peradaban yang datang kemudian. Jadi kebudayaan Islam akan memberi pengaruh kepada budaya Barat yang akan datang.

b. Selain sentuhan-sentuhan budaya pada waktu damai. Terutama dengan melalui perguruan Islam pada masa itu, seperti telah disinggung terjadi pula sentuhan budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu perang Salib.

D. Pembagian Negara Islam

Jumhur ulama membagi negara menjadi dua bagian, yaitu *dar al-Islam/dar al-waqf* (Syiah Zaidiyah)/*dar al-tauhid* (Khawarij sekte Ibadiyah), dan *dar al-harb/dar al-fasiq* (Syiah Zaidiyah)/*dar al-syirk* (Khawarij sekte Ibadiyah). Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan kategori *dar al-'ahd* atau *dar al-aman* disamping keduanya. *Dar al-'ahd* adalah negara-negara yang berdamai dengan *dar al-Islam*, dengan perjanjian tersebut maka semua penduduk *dar al-'ahd* tidak boleh di ganggu jiwanya, hartanya, dan kehormatan kemanusiaannya.

E. Pembagian Penduduk

Penduduk *Dar al-Islam* terdiri dari muslim, *ahl al-zimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari muslim dan *harbiyun*.

1. Muslim

Berdasarkan tempat penetapnya, muslim dapat dibedakan antar satu dengan yang lainnya. Pertama mereka yang menetap di *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan *Dar al-Islam*. Kedua muslim yang tinggal menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan untuk berhijrah ke *dar al-Islam*.

2. Ahl al-Zimmi

Kata *dzimmah* berarti jaminan atau perjanjian dan keamanan. Disebut demikian karena mereka mempunyai jaminan perjanjian (*'ahd*) Allah dan Rasul-nya, serta jama'ah kaum muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lindungan masyarakat Islam. Mereka (orang-orang kafir ini) berada dalam jaminan kaum muslim berdasarkan akad *zimmi*.

3. *Musta'min*

Menurut Ahli Fikihi, *musta'min* adalah orang-orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari keamanan setempat, baik dia muslim maupun *harbiyun*.

4. *Harbiyun*

Kafir Harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian (*dzimmah*) kaum muslim, baik orang itu kafir *mu'ahid* atau *musta'min*, atau pun bukan kafir *mu'ahid* dan kafir *musta'min*.

SIYASAH MALIYAH

A. Pengertian Siyasaah Maliyah

Secara etimologi *Siyasaah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasaah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

B. Sumber dan Konsep Keuangan Negara

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber

pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.

- b. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya *jizyah* (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
- c. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.
- d. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.

1. Baitul Mal (*Wilayah Maliyah*)

Ketentuan syariat, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw., yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini, memang tidak ada ketentuan syar'i. Yang diperoleh hanya dari atsar para Khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara,

yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukanya, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah baitul mal ini. Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukannya. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluannya dan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal.

Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan Usman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal, baik untuk keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarga familinya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Arqam, kepala baitul mal pusat di Madinah, menolak permintaan khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya itu, sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan khalifah dalam menggunakan harta kekayaan negara, Abdullah bin Arqam mengundurkan diri dan berhenti sebagai kepala baitul mal.

Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini, di samping mengingat pentingnya posisi lembaga baitul mal di dalam sistem negara Islam, ada beberapa usulan:

Lembaga baitul mal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

1. Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mal tidak sah.
2. Secara horisontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau walikota.
3. Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya, serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
4. Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul mal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.
5. Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura.
6. Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
7. Lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukannya kepada mahkamah agung.

Adapun Ibnu Humam, pengarang kitab *Al Bada'i* berkata bahwa: harta yang dimasukan pada kas negara (baitul mal) ada tiga macam (konsep Baitul Mal):

Pertama, harta zakat binatang, ternak dan pertanian dan harta yang di pungut dari para pedagang muslim.

Kedua, harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayar pajak, harta shadaqah karena terjadi perdamaian antara bani hijran dan bani hilal dan bani taghlin dan harta yang di pungut dari para pedagang non muslim (seperti orang-orang kafir zimmi, musta'min dan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam).

Ketiga, harta pusaka milik orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan ahli waris, atau meninggal suami atau istri.

Dengan demikian, seluruh sumber keuangan negara Islam sama-sama dipergunakan demi kepentingan umum. Hanya saja setiap penyaluran sumber keuangan itu tidak menetapkan secara pasti terhadap kepentingan umum.

Jizyah

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.

Jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun. Hukum *jizyah* adalah wajib berdasarkan nash Al-Quran. Allah swt. berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (al-Taubah; 29)

Dari penjelasan ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir mendefinisikan *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka

Kaitannya dengan penetapan *jizyah* bagi kelompok nonmuslim ini, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, antara lain:

1. Orang-orang Arab Musyrik. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak mengambil atau menerima *jizyah* dari mereka, sebab bagi mereka hanya ada dua pilihan yaitu masuk Islam atau diperangi.
2. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai golongan ahlul kitab berdasarkan ketetapan nash Al-Quran, sehingga dari kelompok ini diterima pengeluaran *jizyah*nya.
3. Orang-orang Majusi dan Shabi'un dapat diterima *jizyah*nya berdasarkan kesepakatan sahabat, karena Rasulullah-pun sendiri berdasarkan riwayat beberapa hadist pernah menerima dan mengambil *jizyah* dari kelompok ini.

4. Orang-orang non Muslim lainnya seperti penyembah patung dan sebagainya tidak ada ketentuan yang pasti untuk pengambilannya, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun al-Hadis.

Dalam hal ini masalah penerimaannya adalah bersifat ijtihadi, tergantung pada kemaslahatan dan pertimbangan yang berwenang (*ulil amri*). Dengan demikian yang dimaksud dengan ahlu dzimmah disini adalah setiap warga negara Islam dari kalangan non muslim yang berasal dari golongan ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani), ataupun yang berasal dari kelompok non ahlu kitab seperti Majusi, Shamiri maupun Shabi'ah, baik yang berasal dari bangsa Arab ataupun yang lainnya seperti Bani Tughlab dan Najran. Dinamakan demikian karena mereka menjadi tanggungan kaum muslimin untuk memberikan perlindungan atas jiwa, kehormatan dan harta mereka.

Jizyah ditinjau dari kadarnya ada dua macam, yaitu:

1. *Jizyah Shulhiyah*

Jizyah shulhiyah yaitu *jizyah* yang dikenakan berdasarkan perdamaian sudah tentu kadarnya sesuai dengan apa yang disepakati. Rasulullah saw. pernah melakukan *jizyah* yang semacam ini dengan Nasrani Najron yaitu dengan membayar persalinan pakaian. Umar pernah pula melakukannya dengan mewajibkan mereka dengan dua kali lipat dari yang diambil dari muslim.

2. *Jizyah Ghair Shulhiyah*

Jizyah ghair shulhiyah dalam hal ini membagi golongan dzimmi menjadi tiga kriteria, yaitu:

- a. Golongan orang-orang kaya bagi mereka dikenakan 48 dirham.
- b. Golongan menengah yang dikenakan kepada mereka 24 dirham.

- c. Golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 dirham. (Menurut pendapat Imam Hanafi)

Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, yang memiliki 200 dirham ke atas adalah golongan menengah, dan yang kurang dari 200 dirham adalah fakir.

Menurut As-Syafi'i, *jizyah* ditentukan minimalnya 1 dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad saw. dan pada masa khalifah Abu Bakar, penetapan besar kadar *jizyah* ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang sepiantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan. Barulah pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar *jizyah* yang berbeda, yang kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi seperti yang dipaparkan di atas.

Disamping itu, ia juga menetapkan bahwa daerah-daerah yang menggunakan mata uang emas, seperti mesir dan syiria, pembayaran *jizyah*nya dalam bentuk uang emas (dinar). Sedangkan untuk wilayah yang menggunakan mata uang perak (dirham), seperti Mesopotamia, Bahrain, dan beberapa daerah lain, pembayaran *jizyah*nya dengan menggunakan dirham dengan perbandingan satu dinar ditetapkan sama dengan 12 dirham

Fai'

Harta *fai'* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan.

Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka – contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi. Inilah makna *fai'* yang dimaksud oleh firman Allah swt. dalam surat al Hasyr, yaitu:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya :

Dan apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. al-Hasyr: 6)

Hal ini telah terjadi pada harta Bani Nadhir dan Fadak, yang diperoleh tidak dengan pengerahan pasukan berkuda maupun unta kaum Muslim. Oleh karena itu harta ini benar-benar menjadi milik Rasulullah saw. Harta ini sebagian dibelanjakan oleh

beliau saat masih hidup untuk keperluan keluarganya selama setahun, dan sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata yang akan digunakan dalam perang di jalan Allah. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melanjutkan apa yang telah beliau lakukan.

Harta *fai'* adalah salah satu pos pendapatan Baitul Mal dalam Daulah Khilafah. Harta *fai'* sendiri bisa diperoleh ketika Daulah Khilafah telah ditegakkan. Sebelum Khilafah ada, maka konsep *fai'* belum bisa diterapkan. Karena itu termasuk kebijakan negara. Diantara pembagian dan prosedur pembagian harta *Fai'* antara lain:

1. $1/5$ (ditasharufkan)
2. $4/5$ diperuntukkan bagi :
 - a) Para pejuang perang
 - b) Para pejuang yang sudah gugur
 - c) Hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan orang mu`min.

Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam.

Kharaj pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah perang *khaibar*. Pada saat itu rasulullah saw. memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintah Islam *kharaj* merupakan sumber keuangan Negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *kharaj* sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap.

Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim. Kewajiban membayar *kharaj* hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkannya bisa tiga atau empat kali setahun.

Jumlah pajak yang pernah dipraktikkan dalam pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Khalifah Umar, misalnya menetapkan jumlah *kharaj sawad al-iraq* dengan ketentuan satu dirham untuk setiap *jarib* dan satu *qafidz* gandum untuk tanah yang terdiri dari sejumlah sungai dan kanal. Untuk tanah *sawad*, komposisi jumlah pajak perjarib adalah sebagai berikut:

1. Anggur, 10 dirham
2. Kurma, 8 dirham
3. Tebu, 6 dirham
4. Gandum, 4 dirham
5. Kapas, 5 dirham

Menyangkut teknis pengumpulan *kharaj* biasanya dilakukan oleh sebuah tim atau dewan yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, Sa'ad bin Abi Waqqash menetapkan pengumpulan dan pembayaran pajak tanah sawad dikoordinir oleh para tuan tanah. Bahkan pada tahun 20 H., Umar membentuk satu lembaga kementerian khusus (*Diwan al-Khawaraj*) yang dipercayakan melakukan tugas pengumpulan pajak hasil bumi.

Menurut Sayyid Sabiq, ulama Mesir kontemporer, jika *kharaj* ini merupakan sewa tanah maka ukuran atau besarnya pajak diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Karenanya *kharaj* bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan waktu serta tempat. Ketentuan ini tidak harus mengacu kepada kebijaksanaan Umar.

CORAK PEMIKIRAN POLITIK KHAWARIJ, SUNNI, SYI'AH DAN MU'TAZILAH

A. Corak Pemikiran Politik Khawarij

Khawarij merupakan kelompok Islam yang dikenal sangat ekstrim dalam pandangan teologis dan politiknya. Khawarij muncul sebagai sebuah kelompok politik setelah berakhirnya perang Shiffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakhir dengan arbitrase. Pada awalnya Khawarij adalah pengikut Ali yang setia, tetapi kemudian mereka memisahkan diri dari kelompok Ali setelah tidak puas dengan kebijakan politik Ali yang menerima arbitrase. Bahkan, Khawarij juga yang akhirnya membunuh Ali.

Setelah perang Shiffin pada tahun 37 H/875 M., Muawiyah dan para pengikutnya pulang ke suriah, sementara Ali dan para pengikutnya pulang ke suriah, sementara Ali dan pengikut-pengikutnya kembali ke Kufah, Irak. Namun bedanya, kubu Muawiyah pulang dalam keadaan terpecah-belah. Barisan yang masih setia kepada Ali dan mereka yang nantinya keluar dari kubu kubu Ali saling menyalahkan sepanjang perjalanan pulang. Ketika Ali masuk ke Kufah, kelompok penentang arbitrase yang jumlahnya sekitar 12.000 orang tersebut berhenti di sebuah desa dekat Kufah bernama Harura. Mulai dari situ mereka

dinamakan Haruriyah atau Khawarij karena keluar (*kharaja*) dari kubu Ali.

Mereka mendakwa Ali telah mengkhianati tanggung jawabnya dan menodai kesucian tugasnya sebagai pemimpin masyarakat Muslim pilihan dengan menerima Arbitrase. Mereka berpendapat tidak ada alasan untuk mengijinkan arbitrase dengan orang-orang yang telah memisahkan diri. Mereka menyalahkan Ali dan memaksa agar dia menyesali dosa besar tersebut. Kemudian mereka mendeklamasikan lebih baik berperang. Disisi lain Ali berpendapat, walaupun ide arbitrase tidak ia senangi, namun dia tidak dapat menempuh cara lain dalam mengakhiri perselisihan dngan kubu Muawiyah, sehingga memaksa diangkatnya dua orang arbitrer (peleraai atau hakim).

Pada perkembangannya, Khawarij merupakan kelompok politik yang pembicaraan-pembicaraannya terbatas pada masalah kekhalifahan. Mereka menggambarkan prinsip-prinsip ekstrim. Teori mereka mengenai kekhalifaan mengenai kekhalifaan merupakan teori-teori kepemimpinan masyarakat muslim (imamah) bisa berlaku bagi setiap orang Arab. Jika khalifah sepatutnya di pilih, maka dia seharusnya tidak turun tahta dan tidak melepaskan haknya dalam hal apapun juga. Meskipun demikian, jika dia bersifat tidak adil, dia seharusnya di pecat atau bahkan di bunuh jika keadaan memaksa.

Khawarij mencari kepastian tentang tuntutan pertama mereka dengan mengadopsi Islam dan keadilan sebagai pengganti Arabisme dan kebebasan, khususnya banyak umat Islam non-Arab mengikuti barisan mereka. Kekhalifaan boleh berlaku bagi suku Quraisy seperti berlaku bagi orang-orang Islam yang lain, seperti halnya orang-orang bebas dan budak

belian, berlawanan dengan pandangan Syi'ah yang menekankan bahwa kekhalifaan seharusnya terbatas bagi anggota-anggota suatu keluarga untuk mengangkat seorang pemimpin masyarakat muslim karena Allah sendiri bisa memutuskan (*la hukma ilaih*). Begitulah mereka memprotes tentang arbitrase. Segolongan dari kelompok Khawarij mendasarkannya pada pernyataan *la hukma ilaih* bahwa tidak ada pemerintah kedaulatan dan tidak ada kebutuhan terhadap seorang imam (pemimpin) masyarakat Muslim. Mendengar pernyataan itu Ali kemudian berkata, "tidak ada pemerintahan (*la imarata*), sebuah kata yang benar berarti kebohongan. Syahrastani berkata, tetapi harus ada pemerintahan (*imarata*) baik atau buruk."

Tentang sikap dan pandangan politik Khawarij secara umum dapat dikemukakan bahwa mereka mengikuti keabsahan kekhalifaan Abu Bakar, Umar dan Utsmani pada tahun-tahun pertama dia memerintah, serta Ali sampai dia menerima keputusan Arbitrator. Dalam hal jabatan khalifah mereka berhaluan sangat demokratis. Menurut mereka jabatan khalifah itu terbuka bagi tiap orang laki-laki muslim yang berkebangsaan Arab dan merdeka, bukan monopoli bagi suku atau keluarga tertentu.

Setelah banyak orang Islam non Arab menggabungkan diri dengan barisan Khawarij, maka terjadi perubahan terhadap syarat yang pertama untuk dapat menduduki jabatan khalifah. Calon khalifah tidak harus orang laki-laki Islam yang berbangsa Arab dan merdeka. Tiap laki-laki muslim yang mampu berlaku adil dapat menduduki kursi khalifah. Dengan adanya perubahan tersebut,

menurut Khawarij jabatan khalifah terbuka bagi setiap laki-laki muslim, baik merdeka atau budak.

Intisari perundang-undangan Khawarij adalah:

1. Menunjuk dan menetapkan seorang imam (menegakkan suatu Negara) menurut mereka adalah wajib menurut syariat. Tapi adapula sebagian dari mereka menganggap secara mutlak tidak ada seorang imam, sehingga apabila umat sendiri tidak dapat menegakkan dasar-dasar keadilan, maka penunjukan seorang imam adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak perlu.
2. Pemilihan umum diserahkan kepada umat dan imam tidak sah, kecuali dengan pemilihan umat. Beberapa dari kaum Mu'tazilah menambahkan syarat lainnya yaitu untuk berlangsungnya imamah secara sah harus ada kesepakatan umat secara keseluruhan dan seorang imam tidak di pilih dalam keadaan sedang berlangsungnya kekacauan atau pertikaian di kalangan umat.
3. Umat dapat memilih seorang dari kalangan kaum muslimin yang di anggap paling baik dan paling memiliki keahlian tanpa terikat dengan persyaratan apakah ia seorang suku Quraisy atau bukan, atau apakah ia seorang Arab atau Ajam.

Bahkan, sebagian dari mereka telah bertindak ekstrim dan berkata bahwa mengangkat seorang imam non Arab adalah lebih utama dan lebih baik. Apabila seorang imam di pilih dari kaum mawali, yaitu orang-orang berasal dari negeri yang telah diduduki oleh kaum muslimin, maka yang demikian itu lebih afdhal dan lebih utama. Sebab sekiranya imam itu berasal dari kelompok yang lain dan berjumlah sedikit, niscaya akan menjadi lebih mudah memakzulkan apabila ia bertindak zhalim.

B. Corak Pemikiran Politik Sunni

Komunitas Sunni di kenal juga dengan nama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Pondasi pemikiran politik mereka dibentuk selama periode akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga periode awal Bani Abbasiyah. Pondasi itu didirikan di atas prinsip pengembangan syariat (fikihi).

Sebuah teori politik yang cukup artikulatif dari kalangan Ahlu Sunnah pada akhirnya muncul di paruh pertama abad ke 11, doktrinnya mengenai kekhalifahan memuaskan dahaga komunitas agama yang sedang galau karena menurunnya harapan mereka secara drastis kepada lembaga kekhalifahan, seraya tetap memelihara legitimasi Abbasiyah sebagai pemimpin umat Islam. Empat khalifah pertama (*al-khulafa al-Rasyidin*) mendapatkan sebuah kategori khusus. Dorongan utama teori ini adalah melindungi kekhalifaan Abbasiyah dari alternatif-alternatif lain Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Ismailiyah dan khususnya dari keluarga Fathimiyyah yang mungkin tampil sebagai pemimpin sah di mata rakyat muslim.

Secara khusus, para *fuqaha* membicarakan cara-cara menetapkan khalifah dan dasar-dasar untuk memecat atau membatalkan kekuasaannya. Menurut al-Baqillani (wafat thn 1013 H., seorang pengikut Asy'ariyah) pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengangkatnya sebagai khalifah (seperti pendapat Syi'ah). Namun pengangkatannya bisa dilakukan dengan melalui penunjukan yang di sertai dengan perjanjian (*'ahd*). Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat (*ahl al-halli wa al-aqdi*) terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka, tetapi bisa dipastikan

meliputi ulama senior. Pemilihan (*ikhtiyar*) semacam ini di anggap sah, bahkan bila di laksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Lagi-lagi, gagasan ini mendukung praktik Abbasiyah, pandangan serupa yang mengacu kepada al-Asy'ari dilontarkan juga oleh al-Baghdadi. Untuk menjadi Imam, seseorang tidak perlu seperti Syi'ah terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan (maksud) atau memiliki karakter yang istimewa. Menurut al-Baqillani, ia hanya perlu memiliki pandangan yang tegas tentang perang dan mampu menengahi perselisihan. Karena itu, dasar-dasar untuk mencari khalifah banyak dikurangi. Al-Baqillani berpendapat bahwa *bai'at* dapat dicabut kembali hanya jika khalifah melakukan bid'ah, melakukan kejahatan serius (yang tidak diterima oleh kebanyakan *fuqaha* Sunni), secara fisik tidak mampu atau karena ditawan (sebuah pertimbangan yang berhubungan dengan ancaman dari Fathimiyah). Karakteristik umum dan signifikansi dari pemikiran Sunni adalah bahwa tak ada prosedur baku untuk memecat khalifah. Pendekatan mereka yang kering dan tentu saja legalistik bertolak belakang dengan teori imamah yang cenderung metafisik yang diyakini oleh para pengikut Syi'ah dan sebagian filosof.

Pandangan Ahli Sunnah mengenai khalifah dikembangkan lebih jauh oleh seorang pengikut as-Syafi'i yaitu Abu Hasan Ali al-Mawardi (974-1058 M). Ia berusaha mengatasi kesenjangan yang cukup tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasaan koersif dengan cara menghubungkan kembali para penguasa *de facto* para sultan dan Amir dengan kekhilafahan Abbasiyah. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara keduanya dalam kerangka syari'at, sehingga memasukkan kembali keduanya

kedalam sistem agama. Proyek intelektual ini muncul dari kehendak khalifah yang baru diangkat. Khalifah itulah yang menugaskan al-Mawardi untuk melakukan negosiasi dengan penguasa Buwaihi dan menjalankan berbagai misi diplomatik antara tahun 1030-an dan 1040-an.

Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut *ijma'*.

Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan, maka kewajibannya adalah wajib *kifayah*, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan. Jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur atas orang lain dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya, maka kewajibannya ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. *Pertama* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam. *Kedua* adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan ini.

Orang yang berhak di calonkan sebagai kepala negara harus memiliki syarat berikut:

1. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan, dsb., sehingga ia

dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya.

4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma' ulama tentang masalah itu.

Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara:

1. Dengan cara dipilih oleh kalangan *ahl al-halli wa al-aqdi*.
2. Dengan menyerahkan mandat dari kepala negara sebelumnya.

Tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada sepuluh hal, yaitu:

1. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam.
2. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
3. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
4. Menjalankan hukum had sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman

tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.

5. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum muslim atau kalangan kafir mu'ahad (yang diikat janjinya).
6. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya sehingga masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau dzimmah.
7. Menarik *fai'* dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.
8. Menentukan gaji dan besarnya *atha'* (pemberian) kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul mal, tanpa berlebihan atau kekurangan dan memberikannya pada waktu, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.
9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada dibawah wewengannya, sehingga tugas-tugas dapat di kerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya.
10. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan

kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus di laksanakan. Oleh karena itu, perlu di lakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-mustahiqqin*) untuk memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum muslimin kepada seseorang, untuk menugaskan kepada orang yang di tangannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling (*ashlah*) yang mampu mengemban tugas dan tidak menyerahkannya kepada seseorang yang meminta kedudukan (*thalaba al-walayati*) atau yang mengajukan diri meminta kedudukan.

Apabila mengalihkan suatu jabatan dari seseorang yang sebenarnya lebih layak dan tepat untuk mendudukinya kepada orang lain karena faktor ikatan keluarga, loyalitas, persahabatan atau kesamaan asal daerah, mazhab, satu aliran atau satu suku bangsa atau karena adanya uang sogokan (*suap*), ataupun kepentingan-kepentingan tertentu, atau sebab-sebab yang lain, merasa iri terhadap orang yang lebih berhak dan layak menduduki posisi tersebut. Semuanya itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada Allah dan rasulnya dan kaum mukminin. Hal ini tergolong larangan sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu

mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.(QS. Al-Anfal:27-28).

Sedangkan orang yang melaksanakan amanat sekalipun itu bertentangan dengan hawa nafsunya, maka Allah akan meneguhkannya, menjaga dan memelihara keluarga serta harta bendanya. Sementara terhadap orang yang memperturutkan hawa nafsunya, Allah akan menyiksanya dengan menakdirkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari tujuannya, yakni menimpakan kehinaan kepada keluarganya dan sekaligus melenyapkan hartanya.

C. Corak Pemikiran Politik Syi'ah

Syi'ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad saw. telah mendominasi dalam percaturan politik Islam. Munawir Sjadzali mengatakan lahirnya Syi'ah berawal dari ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Para ahli penulis sejarah sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Islam* sebagian menganggap Syi'ah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah, yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan Dar al-Nadwa di Madinah. Sebagian ahli sejarah menganggap Syi'ah lahir pada masa akhir khalifah Usman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Namun pendapat yang paling populer adalah bahwa Syi'ah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan

Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Shiffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa *Tahkim* atau *arbitase*. Abu Zahroh memperkuat atas pendapat ini dengan mengatakan bahwasannya Syi'ah adalah mazhab politik pertama lahir dalam Islam, mazhab mereka tampil pada akhir pemerintahan Utsman, kemudian tampil pada akhir masa Ali.

Di kalangan kelompok Syi'ah hampir tidak dikenal istilah pemisahan agama dan politik atau Negara baik dalam tataran konseptual, maupun praktik politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan ritual politik. Jika politik di artikan sebagai suatu bentuk perjuangan atau perlawanan aktif terhadap suatu tatanan yang dinilai tidak adil, maka agaknya benar klaim bahwa Syi'ah lebih politis ketimbang Sunni. Syi'ah lahir karena faktor kekuasaan yaitu siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin dalam Islam.

Pada awalnya yang disebut Syi'ah adalah orang yang menolak Umayyah dan Abbasiyah sebagai pemimpin umat yang sah karena keduanya dianggap tidak beriman dan amoral. Alasan lainnya, mereka meyakini bahwa sejak kematian Nabi Muhammad saw. kepemimpinan diwariskan kepada Ali dan keturunannya. Mazhab-mazhab Syi'ah yang ada meyakini berbagai opini yang berbeda, seperti tentang siapa yang seharusnya menjadi imam pada masa tertentu dan bagaimana memilih seorang imam. Satu-satunya persamaan adalah mereka meyakini bahwa imamah merupakan suatu keniscayaan dan perilaku muslim.

Pada perkembangan selanjutnya, aliran Syi'ah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte, hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda dikalangan mereka mengenai sifat imam ma'shum atau

tidak dan perbedaan didalam menentukan pengganti imam.

Kaum Syi'ah menetapkan bahwa seorang imam:

1. Harus ma'shum (terpelihara) salah, lupa, dan maksiat.
2. Seorang imam boleh membuat hal luar biasa dari adat kebiasaan.
3. Seorang iam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syari'at.
4. Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestarian agar terhindar dari penyelewengan.

Tidak seperti kelompok syi'ah lainnya Syi'ah Zaidiyah tidak menganut paham dan teori imam bersembunyi. Bagi mereka imam harus memimpin umat dan berasal dari keturunan Ali dan Fatimah, Syi'ah Zaidiyah tidak meyakini bahwa Nabi telah menetapkan orang dan nama tertentu untuk menjadi imam. Nabi hanya menetapkan sifat-sifat yang mesti dimiliki seorang imam yang akan menggantikan beliau. Terjadinya pengkultusan terhadap diri Ali oleh kaum Syi'ah sebagaimana dijelaskan oleh suyuti merupakan tidak bisa lepas dari pendapat Khawarij yang mengkafirkan Ali sejak peristiwa tahkim (arbitrase). Tentunya untuk mengimbangi pernyataan dari kaum yang mereka anggap berseberangan dengan mereka ini maka kelompok Syi'ah membuat doktrin untuk menyeimbangi hal tersebut, yaitu mengangkat dan mengkultuskan pada tingkat ma'shum, dan mendoktrin bahwa ia telah ditetapkan melalui wasiat Nabi sebagai imam untuk pengganti Nabi.

Iqbal menulis, secara sosio-politik, berkembangnya doktrin Syi'ah dipengaruhi oleh beberapa factor :

1. Imam-imam Syi'ah, selain Ali Ibn Abi Thalib, tidak pernah memegang kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani permasalahan politik riil. Ketika mereka melihat realitas politik tidak sesuai dengan nilai-nilai keIslaman sebagaimana mereka inginkan, maka mereka mengembangkan doktrin kema'shuman imam.
2. Sebagian pengikut Syi'ah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syi'ah, yang diketahui mereka dahulukalanya yakni mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci, hal ini terlihat pada salah satu kelompok ini yang mempunyai suatu paradigma yakni imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad sendiri.
3. Pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syi'ah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi berkembangnya doktrin *al-Mahdi al-Muntatazhar* yang akan melepaskan mereka dari penderitaan.

Dari sekian banyak kelompok ditubuh Syi'ah, Iqbal mengelompokkan golongan ini menjadi tiga aliran: *Pertama*: Moderat, umumnya memandang Ali sebagai manusia biasa, dapat menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. *Kedua*: Ekstrem, menempatkan Ali sebagai seorang nabi yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sendiri, bahkan ada yang menganggap Ali sebagai penjelmaan tuhan. *Ketiga*: diantara kedua kelompok diatas, Ali sebagai pewaris yang sah jabatan khalifah dan menuduh Abu Bakar dan Umar telah merebutnya dari tangan Ali, tidak memperlakukan Ali

tidak seperti nabi yang lebih utama dari Nabi Muhammad, apa lagi penjelmaan Tuhan.

Diantara sekian banyak sekte, terdapat 3 sekte besar dan berpengaruh dalam mazhab Syi'ah hingga sekarang yaitu: Zaidiyyah, Ismailiyyah (Sab'iyyah), dan Imamiyyah (Isna' Asy'ariyah).

1. Zaidiyyah: Ali bin Abi Thalib, Hasan ibn Ali, Husein ibn Ali, Ali Zaenal Abidin, Zaid ibn Ali.
2. Isma'iliyyah atau Sab'iyyah: Ali bin Abi Thalib, Hasan ibn Ali, Husein ibn Ali, Ali Zaenal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Isma'il ibn Ali.
3. Imamiyyah atau Isna 'Asyariyyah: Ali bin Abi Thalib, Hasan ibn Ali, Husein ibn Ali, Ali Zaenal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Musa al-Kadzim, Ali al-Ridho, Muhammad al-Taqi', Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, Muhammad al-Mahdi.

D. Corak Pemikiran Politik Mu'tazilah

Mu'tazilah pertamanya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang "gerah" terhadap kehidupan politik umat Islam pada pemerintahan Ali. Sebagai reaksi atas ini, mereka sengaja menghindar (i'tizala) dan memperdalam pemahaman agama serta meningkatkan hubungan kepada Allah. Dalam penamaannya sebagai Mu'tazilah terjadi perbedaan pendapat antara Washil bin Atha' dan gurunya Hasan al-Bisri tentang orang yang berdosa besar apakah masih layak dikatakan mukmin atau tidak. Perbedaan pendapat inilah yang menjadi awal lahirnya kelompok Mu'tazilah dalam Islam.

Sikap politik Mu'tazilah terdapat kondisi yang berklembang sejak masa 'Ali. Mereka memandang tokoh-tokoh yang terlibat perselisihan dan

pertentangan pada pemerintahan Ali adalah sahabat-sahabat Nabi yang saleh. Kemudian kelompok ini berkembang menjadi sebuah aliran teologi rasional. Pemikiran mereka kemudian merambah kelapangan siyasah. Mu'tazilah beranggapan bahwa akallah yang menjadi ukuran untuk menentukan pembentukan lembaga khalifah, walaupun pemikiran ini sama dengan Khawarij tetapi Mu'tazilah memberikan argumentasi atau alasan secara filosofis dan teologis.

Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalnya manusia dapat mengetahui empat hal yaitu, Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, kebaikan dan kejahatan, serta kewajiban menjalankan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Hal ini bermakna bahwa kewajiban mendirikan negara pemerintahan tidak didasarkan pada perintah syar'i perundingan akal. Al-Jabbar menyatakan syarat-syarat terpilihnya kepala negara, yaitu:

1. Merdeka. Karena pada saat tersebut perbudakan belum hilang.
2. Mempunyai kekuatan akal dan nalar yang sehat dan lebih dari yang lain.
3. Menganut doktrin *al-adl wa al-tawhid*, sebagaimana ajaran Mu'tazilah
4. Bersifat wara'. Tidak bertindak menyalahi wewenang.

Sudirman M. Johan mengemukakan beberapa cara dalam pandangan Mu'tazilah memilih kepala negara:

- Pertama, pengangkatan jumlah orang yang diakui oleh masyarakat
- Kedua, dengan jalan musyawarah yang diikuti oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan wawasan politik yang luas.

Apabila telah disetujui secara aklamasi maka kandidat tersebut langsung diangkat sebagai kepala negara, tetapi apabila cara ini tidak tercapai maka diajukan beberapa calon nama kepala negara dan dipilih oleh anggota musyawarah. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan dipilih sebagai kepala negara. Maka dari itu kita perlu memberikan catatan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang mengangungkan akal. Tetapi ketika berbicara tentang pertanggungjawaban kepala negara kepada rakyatnya, Mu'tazilah mundur kebelakang dengan mengabaikan akal.

PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN

A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H bertepatan tanggal 27 Mei 1332 M. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari golongan Arab Yaman di Hadramaut. Baru setelah Islam mengalami kehilangan kekuasaan di Andalusia, seluruh keluarganya pindah ke Tunisia.

Secara garis besar kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi empat fase:

Fase pertama, fase pertumbuhan dan studi yang dimulai dari tahun 732 H hingga akhir tahun 751 H. Seperti kebiasaan pada waktu itu, sang ayah adalah guru pertamanya. Setelah itu, ia belajar di luar dengan beberapa guru. Dalam ilmu bahasa, ia belajar dengan Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bahr. Ilmu fikih ia pelajari dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir. Selain mempelajari ilmu agama, ia juga belajar ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Fase kedua, keterlibatan dalam dunia politik. Kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik. Khaldun tidak mengelak dalam berbagai intrik politik

tersebut. Latar belakang pendidikannya telah membedakan Khaldun dengan tokoh politik kala itu. Disamping terlibat penuh dalam dinamika intrik, ia juga menyempatkan diri sebagai pengamat perilaku-perilaku politik kaum elit.

Karier politik Khaldun dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibn Tafrakin ditaklukkan Abu Zaid, dalam sebuah intrik dan perebutan kekuasaan, Khaldun melarikan diri dan bekerjasama dengan sultan Abu Inan di Tlemeen sebagai sekretaris. Selanjutnya Khaldun melibatkan diri ke dalam sebuah intrik politik dimana ia bekerjasama dengan rival Sultan Abu Inan, Amir Abu Abdullah Muhammad untuk merebut kekuasaan sang sultan. Intrik ini melahirkan malapetaka bagi Khaldun. Ia dipenjara Sultan Abu Inan selama dua tahun begitu persekongkolan politik dan kekuasaan tersebut ditumpas. Selanjutnya Khaldun mengabdikan pada Abu Salim penguasa Maroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya.

Setelah Abu Salm wafat pada tahun 1362, Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhamamad V dari Granada. Sang raja menjadikannya duta besar. Tugas yang pernah diembannya adalah sebagai utusan Sultan Muhammad V untuk menemui Pedro dari Castilla, Spanyol. Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatangan perjanjian perdamaian antara kedua Negara.

Karena tidak sepaham dengan sebagian pembesar Granada, Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-hafsi sebagai perdana menteri. Di tengah jalan, intrik dan pergolakan politik yang tidak kenal henti yang melanda kerajaan-kerajaan Islam menjadikannya beralih loyalitasnya kepada Abu

Abbas, sepupu Muhammad Al-Hafsi, yang merebut kekuasaan.

Fase ketiga, Khaldun mengembangkan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Ini dilakukan setelah fase pengabdianya kepada kekuasaan dalam berbagai pemerintahan. Nampaknya Ibnu Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendiri guna menyusun karya-karyanya di benteng Banu Salamah. Dalam masa kontemplasi yang relatif singkat inilah Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, *Al-Ibar* beserta *Muqaddimah*-nya.

Fase keempat adalah babak akhir kehidupannya. Khaldun mulai mengundurkan diri dari dunia politik. Khaldun dengan serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya, menyelesaikan karya monumental yang dianggap masih tersisa. Seluruh karya yang dihasilkan diberikan kepada penguasa. Intrik politik tidak selesai melandanya. Ia menjadi sasaran tembak para elit dalam lingkaran kekuasaan. Pembesar negeri tersebut telah merusak persahabatannya dengan sultan Abu Al-Abbas. Kenyataan inilah yang mendorongnya meninggalkan wilayah kekuasaan itu.

Khaldun membuat kamufase dengan meminta izin kepada sultan untuk pergi haji. Dalam kenyataannya, Ibnu Khaldun tidak mengarahkan kakinya ke Mekkah. Ia ke Iskandaria. Khaldun diterima oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir Barquq. Sultan mengagumi pemikiran Khaldun dan menjadikannya sebagai hakim agung.

Dalam periode ini Khaldun bertemu Timur Lenk-sang penakluk dan penguasa baru yang sangat terkenal dalam sejarah kekuasaan dan peradaban Islam di Timur Tengah- di Syiria. Seperti sultan lainnya,

Timur Lenk mengagumi pemikiran Khaldun hingga ia menawarkan Khaldun untuk bekerja di istananya. Tampaknya fase kontemplasi Khaldun tidak menyisakan nafsu politik dan kekuasaan lagi. Akhirnya Khaldun menolak tawaran yang menggiurkan itu.

Khaldun pada akhirnya tak lagi menghiraukan godaan-godaan kekuasaan di akhir fase kehidupannya. Bahkan ia tak lagi bergeming untuk memberikan reaksi terhadap pancingan lawan-lawan politiknya. Khaldun tetap menjadi ilmuwan dan hakim agung sampai akhir hayat.

B. Filsafat Politik Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengemukakan suatu bahasan tentang filsafat politik, yakni paling tidak, terdapat empat sub tema ketika mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu asal mula timbulnya negara, konsep kepala negara, pengaruh faktor geografis terhadap politik, dan solidaritas kelompok.

1. Asal Mula Timbulnya Negara

Ibnu Khaldun seorang kritikus dan pakar sosiologi, berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli sosiologi, bahwa manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*) atau makhluk sosial. Manusia akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia hidup sendirian tanpa adanya institusi yang mengorganisasikannya. Fenomena riil inilah yang akhirnya mengilhami Ibnu Khaldun untuk memikirkan tentang asal mula negara dan menjadi embrio konsep negara menurut Ibnu Khaldun. Karena negara dalam skala makro menempati posisi organisasi kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan

kodrati manusia. Gagasan ini juga serupa dengan yang telah diungkapkan terlebih dahulu oleh Plato.

Ikatan bermasyarakat,, bernegara dan ber peradaban pada umumnya sebagai sesuatu yang tumbuh dan tenggelam lepas dari soal apakah agama dalam pengertian nubuwwah datang atau tidak, Karena ia mengakui bahwa banyak peradaban dan Negara tumbuh dan tenggelam tanpa didatangi oleh ajaran-ajaran nabi. Bagi Khaldun, adanya masyarakat, Negara dan peradaban tidak bergantung pada adanya agama. Meski di lain pihak Khaldun adalah seorang yang ditandai oleh ajaran-ajaran agama Islam, terutama fikih dan tafsir. Ini mempengaruhi sikapnya terhadap tuhan, manusia dan masyarakat.

Ibnu Khaldun telah membedakan antara masyarakat dan Negara. Menurut pemikiran Yunani Kuno bahwa Negara dan masyarakat adalah identik. Adapun Khaldun, ia berpendapat bahwa berhubungan dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia itu memerlukan masyarakat, artinya bahwa manusia itu memerlukan kerjasama antara sesamanya untuk dapat hidup; baik untuk memperoleh makanan maupun mempertahankan diri. Sungguhpun ada perbedaan antara Negara dan masyarakat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalam zamannya disebut daulah merupakan bentuk masyarakat. Sebagaimana bentuk suatu benda tidak dapat dipisahkan dari isi, maka demikian pulalah keadaannya dengan Negara dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menetap, yang telah membentuk peradaban, bukan yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan nomaden di padang pasir.

Menurut Khaldun, kehidupan padang pasir itu belumlah disebut Negara. Negara mengandung peradaban dan ini hanya mungkin tercapai dengan kehidupan menetap. Negara pun harus mengandung kekuasaan, kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa dan kekuasaan inilah dasar perbedaan Negara dan masyarakat.

2. Konsep kepala Negara

Negara menurut Khaldun adalah suatu makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua dan akhirnya hancur. Negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya. Khaldun berpendapat bahwa umur suatu Negara adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. ketiga generasi tersebut ialah:

- a. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitive yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir.
- b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan Negara, sehingga generasi ini berlihi dari kehidupan primitive yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.
- c. Generasi ketiga, Negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

Negara dalam perkembangannya melalui lima tahap:

- a. Tahap Pendirian Negara, tahap untuk mencapai tujuan, meaklukkan segala halangan dan rintangan, menguasai kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan ashabiyah. Khaldun berpendapat bahwa ashabiyah yang

membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh.

- b. Tahap Pemusatan Kekuasaan, pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan ashabiah, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota ashabiyah dari roda pemerintahan.
- c. Tahap Kekosongan dan Kesantiaian, tahap untuk menikmati buah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya.
- d. Tahap Ketundukan dan Kemalasan, pada tahap ini, Negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi, Negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya.
- e. Tahap Foya-foya dan Penghamburan Kekayaan, negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan terus menuju keruntuhan.

Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad keempat belas. Dengan melihat keruntuhan dan kelemahan yang menimpa dunai Islam pada umumnya ketika itu, serta mengamati sendiri kemunduran kebudayaan Arab-Islam di Andalusia di bawah tekanan pasukan Spanyol, tidaklah mengherankan

bilamana ia berpendapat bahwa segala sesuatu akan hancur.

Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan kepala negara sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bahkan keniscayaan bagi kehidupan bersama umat manusia dalam suatu komunitas masyarakat (negara). Jabatan kepala negara merupakan lembaga yang alamiah dan natural bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang kepala negara yang sebenarnya, harus memiliki superioritas dan keunggulan serta kekuatan fisik agar keputusan atau kebijakan yang diambil dapat berlaku secara efektif. Seorang kepala negara harus memiliki tentara yang kuat dan loyal kepadanya guna menjamin keamanan negara dari ancaman luar. Selain itu ia harus berkuasa menarik dana bagi pembiayaan operasional negara.

Kebijakan pemerintah yang diambil melalui kepala negara meski didasarkan pada peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang tidak merugikan bagi sebagian atau keseluruhan rakyat. Kebijaksanaan politik itu dapat diambil dari beberapa sumber, yaitu pertama, rekayasa para intelektual, cendekiawan, pemuka masyarakat, dan orang pandai di antara mereka. Kedua, ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada utusan-utusanannya.

Secara sistematis, Ibnu Khaldun telah memberi kriteria tertentu bagi seseorang yang akan menduduki jabatan kepala negara, yaitu bahwa ia harus (a) berilmu, (b) adil, (c) mampu, (4) sehat badan, dan (5) dari keturunan Quraiys (keluarga terhormat).

3. Pengaruh faktor geografis terhadap politik

Ibnu Khaldun mensinyalir bahwa keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental, dan perilaku

manusia itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang beriklim ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, baik peradaban maupun budayanya tidak akan dapat berkembang secara dinamis. Sebaliknya suatu bangsa akan dapat memberikan kontribusinya kepada sejarah dan kebudayaan dunia manakala terletak di bagian bumi yang beriklim sedang.

Teori ini dipergunakan oleh para ahli hukum Islam sebagai salah satu dasar argumentasi bahwa pelaksanaan ajaran Islam dan hukumnya yang universal itu dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena perbedaan lingkungan, kondisi, adat istiadat, dan tradisi.

4. Solidaritas kelompok

Menurut Khaldun, suatu suku mungkin dapat membentuk dan memelihara suatu Negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial-politik tertentu, yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan *Ashabah*. karakteristik ini justru berada hanya dalam kerangka kebudayaan desa. Oleh karena itu penguasaan atas kekuasaan dan pendirian Negara, sehingga munculnya kebudayaan kota akan membuat sirnanya *ashabiyah* yang mengakibatkan melemahnya Negara.

Ashabiyah adalah kekuatan penggerak Negara dan merupakan landasan tegaknya suatu Negara atau dinasti. Bilamana Negara atau dinasti tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan *ashabiyah*. Ashabiyah mempunyai peran besar dalam perluasan Negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya Negara tersebut. Bila *ashabiyah* itu kuat, maka Negara yang muncul akan luas, sebaliknya bila *ashabiyah* lemah, maka luas Negara yang muncul relative terbatas.

Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*) sangatlah diperlukan karena dapat melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu serta rasa ikut malu dan tidak rela jika di antara mereka diperlakukan tidak adil atau hendak dihancurkan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun untuk menguraikan teori *'ashabiyyah* ini, antara lain:

- a. Secara alamiah solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia.
- b. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan dalam membangun suatu negara.
- c. Seorang kepala negara, agar dapat secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, harus mampu menumbuhkan solidaritas kelompok.
- d. Solidaritas kelompok dapat melahirkan pemimpin yang unggul dan superior

Khaldun tidak hanya menjelaskan konsep *ashabiyyah* sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun disamping itu juga menghadapkannya dengan konsep-konsep yang telah ada dan berkembang pada waktu itu

1. Idealisme Vs Realisme

Di kalangan Umat Islam terdapat paham akan datangnya Ratu Adil (Imam Mahdi) yang terkenal dengan sebutan *'mohdiisme'*. Paham ini terutama berkembang di kalangan Syiah. Merekalah kelompok pertama dalam Islam yang merasakan ketidakadilan di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Selain kaum Syi'ah paham tersebut juga berkembang pada kaum sufi waktu itu. Meskipun keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam hal ini. Syiah berpendapat bahwa Mahdi adalah seorang tokoh historis yang hidup pada masa lampau kemudian menghilang, dan

sendang menunggu perintah dari Allah untuk muncul kembali sebagai juru selamat.

Sedangkan kaum Sufi berpendapat bahwa Mahdi itu manusia biasa yang akan dilahirkan pada suatu masa yang akan datang, dan setelah dewasa ia akan muncul mengemban misinya membebaskan masyarakat.

Paham akan datangnya Imam Mahdi tampaknya timbul akibat kesenjangan yang lebar antara prinsip ideal dan kenyataan aktual dari kehidupan masyarakat yang berkembang. Untuk merekonsiliasi antara ideal yang lama dengan real yang ada kini, masyarakat biasanya terpaksa mengacu kepada doktrin masa depan berupa harapan adanya kedatangan Ratu Adil.

Ibnu Khaldun secara terang-terangan menolak kedatangan Imam Mahdi. Ia meyakini bahwa masyarakat itu diatur oleh proses dialektis. Ibnu Khaldun berbeda dengan dialektika sufi yang terlalu banyak unsure idealisme. Pendorong utama di balik konsep dialektika Ibnu Khaldun adalah ashabiyah. Ia berpendapt bahwa Mahdi yang baik ialah Mahdi yang dapat mengarahkan ashabiyah yang tumbuh ke tujuan yang alami.

Ibnu Khaldun lebih menyukai mereka yang bergerak mengikuti, daripada mereka yang menentang dialektika social (bergerak melingkar dari baik ke buruk, kemudian menjadi baik kembali) sebagaimana konsep kaum sufi. Kalu boleh dibandingkan kritik IbnuKhaldun terhadap kaum sufi mirip dengan kritik Marx terhadap Hegel yang menolak konsep idealisme Hegel dan menggantinya dengan realisme.

2. Kekuasan Vs kebenaran

Khaldun tidak menyederhanakan persoalan hnaya dengan menyatakan bahwa kekuatan ashabiyah yang akan menghasilkan kebenaran. Ia melihat

ashabiyah dalam konteks nomadek. lebih lanjut ia mengatakan syeikh nomadis yang mempunyai ashabiyah yang kuat biasanya juga seorang pemimpin yang baik. Pribadi kekuatandan kebenaran biasanya berjalan seiring. Ashabiyah yangkuat juga menunjukkan watak yang baik dan kualitas kepemimpinan yang tinggi.

Kemudian Khaldun mengklasifikasikan raja kedalam pemimpin danpenguasa. Ternyata ashabiyah tidak memperoleh tempat bila kekuasaan memegang peranan. Apabila kekuasaan mulai mengganti kepemimpinan, ashabiyah setahap demi setahap kehilangan kekuatan dan akhirnya mati.

2. Islam Vs Nomadisme

Khaldun mengklasifikasikan dari sudut pandang kontrol sosial, menjadi dua tipe ; badarah dan hadharah (primitif dan peradaban). Di kalangan masyarakat primitive hubungan darah lebih diutamakan, kontrol sosialnya masih cukup tinggi.

Sebaliknya dalam masyarakat berperadaban, control social lebih rendah. Teori tersebut dalam sosiologi modern dikembangkan oleh Emile Burkheim dengan istilah solidaritas mekanis(sama dengan badawa) dan solidaritas organis (sama dengan hadharah).

Dalam hubungan ashabiyah dan agama, menurut Khaldun terdapat dampak timbal balik diantara keduanya. Lebih lanjut, Khaldun berupaya untuk mengkonpromikan antara prisnsip ashabiyah dan prinsip Islam. Menurutny ashabiyah yang dilarang adalah ashabiyah yang berkembang pada zaman jahiliyah yang timbul dari kesombongan dan keinginan untuk bergabung pada suku-suku yang terkuat dan terhormat. Sedangkan ashabiyah yang

didasarkan atas faktor-faktor keagamaan dan faktor duniawi yang legal, maka diperbolehkan.

Ibnu Khaldun sendiri menganggap *ashabiyah* sebagai suatu kekuatan dan pengaruh didasarkan atas kesamaan. Kesamaan itu tidak hanya kesamaan yang didasarkan atas ikatan darah, tetapi juga didasarkan atas pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.

Beberapa pemikiran politik Ibnu Khaldun lainnya :

- a. Politik amat penting. Politik itu tidak kotor, tetapi yang kotor adalah sifat manusia.
- b. Politik merupakan mekanisme yang mengajarkan manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dalam politik manusia harus berusaha keras untuk mempertahankan diri dari serangan orang luar, dan itu merupakan jihad.

Ibnu khaldun sangat terpengaruh dengan kondisi sosial pada waktu itu, dimana terjadi pertentangan antara kelompok nomaden dengan penduduk kota karena terjadi penyerangan oleh kelompok nomaden tadi.

- c. Negara merupakan lembaga yang tepat untuk mengatur urusan masyarakat dan mekanisme memilih pemimpin. Tanpa Negara yang terorganisir dengan baik maka kehidupan manusia belum lengkap. Hanya saja seringkali mengalami masalah ketika ada *ashabiyah* dan krisis moral di kalangan masyarakat (umat Islam).
- d. Negara muncul karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk kebutuhan makan, keamanan, dan lainnya, manusia memerlukan orang lain. Karena itu diperlukan perasaan persatuan dan solidaritas yang kuat antar sesama.

- e. Agama merupakan alat yang sangat ampuh untuk menyatukan manusia. Agamalah yang menghindarkan manusia dari persaingan tidak sehat, justru untuk kebaikan dan kebenaran.

Secara sederhana, Ibnu Khaldun menggabungkan konsep sosiologis dan agama dalam membangun negara. Bagi beliau, manusia bersatu dalam sebuah negara karena ada kebutuhan satu sama lain terhadap hukum. Dalam hal ini hukumlah yang akan menjaga hidup, harta, mata uang, bahkan kebijaksanaan para pemimpin. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, tetapi tidak menyebabkan rakyat harus membayar pajak yang lebih mahal atau bahkan terjadi persaingan tidak sehat antara pemerintah dengan swasta.

- h. Ketika negara dan kepemimpinan sudah terbentuk, maka seorang pemimpin harus ditaati agar tidak muncul kekacauan, anarkhi, dan ketidaknyamanan. Dan hubungan yang terbentuk antara penguasa dengan rakyat adalah hubungan yang bersifat relational, penguasa memiliki rakyat dan rakyat memiliki penguasa. Jadi kekuasaan tidak sebagai atribut, melainkan lebih sebagai aktor kepercayaan masyarakat (relasi yang demokratis).
- i. Seorang pemimpin hendaklah orang yang mempunyai kelebihan, tetapi tidak terlalu pintar dibandingkan rakyatnya, "kalian harus memimpin dengan bahasa kaummu". Jika seorang pintar yang memimpin justru menghambat komunikasi dengan rakyat.

PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL AFGHANI

A. Riwayat Hidup Jamaluddin Al-Afghani

Nama sebenarnya Jamaluddin al-Afghani adalah Jamaluddin Bin Safdar. Nasabnya sampai kepada Ali Al-Tirmidzi, seorang ahli hadist yang terkenal, lalu terus sampai nasabnya kepada Sayyidina Hasan Bin Ali Bin Abi Talib. Keluarganya berkuasa dan memerintah sebahagian tanah Afghanistan, hingga akhirnya kekuasaan mereka dirampas oleh Raja Muhammad Khan. Bapak dan keluarganya pun dipindahkan ke kota Kabul. Jamaluddin al-Afghani dilahirkan disebuah kampung bernama Asad Abad dalam jajahan negeri Iran pada tahun 1839 Masehi.

Semasa kecil Jamaluddin telah mendapat didikan agama yang mantap. Beliau berbakat dan cerdas, pintar dan berwawasan tinggi. Mulanya beliau belajar ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf dan sastra lalu mengkaji pula ilmu-ilmu syariat seperti tafsir, hadist, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, tasawuf, sejarah, falsafah, mantik, politik, akhlak, ilmu jiwa, ilmu falak dan teori-teori kedokteran serta ilmu kajian tubuh manusia.

Setelah itu, Jamaluddin merantau ke negeri India dan di sanalah beliau belajar ilmu matematika. Pada tahun 1857 Masehi, Jamaluddin telah pergi menunaikan ibadah Haji dan tinggal di Hijaz selama setahun. Setelah itu beliau telah merantau ke Baitul Maqdis.

Semasa pengembaraannya ke negeri-negeri Islam pada waktu itu Jamaluddin merasakan kesedihan yang luar bias melihat kondisi umat Islam di negeri-negeri yang dilewatinya. Sekembali ke negerinya, Jamaluddin mengabdikan dirinya di pemerintahan. Dalam masa pemerintahan inilah, Inggris telah memecahbelah rakyat dengan rajanya hingga terjadi fitnah diantara keluarga raja sendiri, yang akhirnya Mohammad A'azam Khan dapat menguasai kota Kabul. Jamaluddin lalu dilantik menjadi orang pertama menjadi penasihatpemerintah. Dikarenakan fitnah-fitnah dan usaha-usaha jahat yang dilakukan oleh Inggris, menjadikan Jamaluddin sangat benci terhadap kerajaan Inggris.

Akhirnya Pemerintah Muhammad A'azam mengalah dan lari ke negeri Iran. Walaupun Jamaluddin tidak ikut sama melarikan diri tetapi akhirnya membuat keputusan untuk keluar meninggalkan tanah airnya. Jamaluddin berpindah-pindah menyebarkan seruannya ke mana saja beliau pergi. Beliau telah melawat negara-negara Arab, Mesir, Turki, Iran, Iraq, negeri Eropa, Rusia, Inggris dan dari Paris hingga ke Amerika.

Jamaluddin lalu menulis masalah dan krisis di surat-surat kabar di negeri Arab dan Eropa. Beliau fasih dalam berbahasa Arab, Persi, Turki, Inggris, Perancis dan Rusia hingga menyebabkan beliau mudah berkomunikasi dengan ahli-ahli fikir dan tokoh-tokoh sastra, falsafah dan politik di Timur dan di Barat.

Pengalaman, pemikiran serta keahliannya menjadikan beliau sebagai seorang tokoh besar dunia di waktu itu. Ketika beliau berada di Mesir, beliau telah bertugas di University Al Azhar. Disebabkan pengaruhnya yang mendalam serta pengalamannya yang sangat meluas, kuliah-kuliahnya telah mendapat sambutan yang hangat dari golongan cerdik pandai.

Di mana pun tempat beliau memberi kuliahnya, maka orang ramai akan datang membanjiri tempat itu. Semasa di Mesir, Jamaluddin telah memberi semangat dan dorongan kepada siapa saja. Di antaranya; Saud Zaghulul Pasha yang ingin membebaskan negerinya dari kuasa penjajahan, dan Muhammad Abduh yang menjadi muridnya yang setia. Pada tahun 1870 Jamaluddin al-Afghani di angkat menjadi Dewan Pendidikan Usmaniah resmi yang reformis.

B. Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani

1. Gagasan Pan Islamisme

Pan Islamisme (*Al-jami'iyyah Al-Islamiyyah*) adalah rasa solidaritas seluruh umat Islam di dunia. Semangat Pan Islamisme ini diserukan ke seluruh negara Islam yang sedang mengalami kemunduran dan intervensi Barat. Pan Islamisme dicetuskan Al-Afghani untuk memajukan dan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia dalam menghadapi dunia Barat .

Pan-Islamisme lahir disebabkan, paling tidak, oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal.

1. Faktor internal disebabkan oleh kondisi umat Islam yang berada dalam kondisi yang memprihatinkan; dalam bidang pemikiran mereka stagnan, dan dalam bidang sosial mereka sering bertikai, dan bidang politik sering terjadi perebutan kekuasaan yang tidak jarang terjadi peperangan antara sesama umat Islam.

2. Faktor eksternal datang dari luar Islam, yaitu dari barat; baik itu alam bentuk imperialisme, sekularisasi (penyebaran paham yang menjauhkan dari agama), ataupun westernisasi (pembaratan).

Inilah dua latar yang paling signifikan dalam membangkitkan semangat Pan-Islamisme sebagai gerakan pemikiran dan politik.

Ada dua substansi Pan-Islamisme itu, yaitu *al-wihdah al-Islamiyyah* (kesatuan yang Islami) dan *al-wihdah al-siyasah* (kesatuan kepemimpinan). Di samping itu, Pan-Islamisme ini juga didasarkan pada pengalamannya pemikiran dan gerakannya, terlebih ketika melihat dominasi Barat (Kristen) di India dan Mesir, di mana hal ini tidak terlepas dari semangat perang salib yang masih tetap berkobar. Gagasan Pan-Islamisme dapat dinyatakan sebagai gerakan internal dalam rangka menghadapi musuh yang datang dari Barat.

Gibb menyatakan bahwa meskipun Pan-Islamisme itu, dari sisi politik, dimaksudkan untuk menentang penetrasi Eropa, ia mengandung aspek reformasi internal juga. Jamaluddin menyerang, dengan kegigihan yang sama, penyalahgunaan-penyalahgunaan Islam yang dilihatnya dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Islam. Inti pokok pemikirannya adalah bahwa umat Islam harus membersihkan diri mereka sendiri dari kesalahan-kesalahan dan percampur-adukan agama; para ulama Muslim harus tampil menghadapi arus-arus pemikiran modern, dan negara Islam harus tampil sebagai ekspresi politik dan sarana untuk menyuarakan ajaran-ajaran ortodoks Islam.

Pan-Islamisme, dalam pandangan al-Afgani, didasarkan pada ideologi, yaitu al-Qur'an dan

Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan politik dan kekuasaan harus dipegang sebagai norma yang transformasional. Di dalam *Mafahim Islamiyyah* dijelaskan bahwa gerakan pembaharuan Jamaluddin al-Afgani, yang bergerak sejak pertengahan kedua abad 19 merupakan gerakan tajdid pemikiran Islam dengan kembali kepada sumber primer, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, serta *manahij al-salaf al-shalih*.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa inti gerakan Pan-Islamisme ini berkisar pada tiga hal, yaitu :

1. Membebaskan pemikiran dari ikatan taklid (*tahrir al-fikr min qayd al-taqlid*)
2. Memperbaiki sistem bahasa Arab dalam rangka emansipasi
3. Menjelaskan hak hukum atas umat, dan hak umat akan keadilan.

Agak berbeda dengan kesimpulan Nawawi, bahwa inti gerakan Pan-Islamisme itu ialah:

1. Menyatukan ideologi umat Islam kepada dasarnya
2. Melaksanakan dakwah yang lengkap dan lurus bebas bid'ah
3. Melakukan pembinaan dan pendidikan akhlak
4. Menyalakan api semangat kebersamaan dan perjuangan menuju umat yang unggul dan tunggal.

Dalam Majalah *Al-Bayan* dijelaskan, bahwa al-Afgani adalah seorang aktivis gerakan politik yang menghimbau orang-orang Timur untuk bangkit dari kejumudan mereka, yang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ia menghubungi para penguasa, dan membangkitkan semangat seluruh umat Islam, menghidupkan sistem khilafah, mendasarkan

pemerintahan pada dasar-dasar Islami (*ta'sis Islami*), yang menyebabkan dunia Barat menjadi goncang.

Demikian dalam konsep *al-wihdah al-siyadah*, tidak dapat dilepaskan dari prinsip *al-wihdah al-Islamiyyah*. Dengan kata lain, kesatuan sebagai sesuatu yang dituntut agama membutuhkan kekuasaan yang akan memperjuangkan terciptanya kesatuan, sebab kesatuan itu sendiri tidak bisa terjadi dengan sendiri tanpa kekuasaan mengiringinya. Dengan kata lain, kesatuan dan kekuasaan bagai dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dan karena itu, keduanya menjadi wajib untuk diupayakan.

Dalam rangka konsolidasi pemikiran dan kejiwaan umat Islam, Jamaluddin menempuh dua cara yang prinsip, yaitu *pertama*, dengan menerbitkan majalah *Al-'Urwah al-Wutsqa* yang disebar ke berbagai negeri Islam secara gratis. Secara umum isinya tidak lain menyerukan perlunya persatuan menyeluruh, berpegang pada prinsip-prinsip Islam, dan mengungkapkan berbagai aspek andil penjajah yang menuntut adanya kekuatan global yang bersifat politis dari dalam dunia Islam ; *kedua*, menempuh cara pengiriman aktivis *Jam'iyyah al-'Urwah al-Wutsqa* ke berbagai negeri, sejalan dengan penyebaran majalah tersebut.

Al-Afgani sendiri, dengan kapasitasnya sebagai seorang tokoh pembaharu, mendatangi berbagai negeri dan bahkan menemui tokoh atau penguasa dan mengadakan negosiasi, akan tetapi satu-satunya hasil yang signifikan ialah hampir terciptanya kontak al-Afgani dengan Sultan Usmani, Abudl Hamid III, akan tetapi hubungan di antara keduanya tidaklah terbangun.

2. Konsep Negara

Selain Pan-Islamisme, Al-Afghani juga mengajukan konsep negara republik yang demokratis, dan meninggalkan sistem lama yang bersifat otokratis. Dengannya konsep musyawarah dan kebebasan mengeluarkan pendapat dapat diberlakukan, dan adanya kewajiban kepada negara untuk tunduk pada undang-undang dasar.

Di dalam pemerintahan absolut dan otokrasi tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya pada raja atau kepala negara untuk bertindak yang tidak diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, corak pemerintahan absolut dan otokrasi diganti dengan corak pemerintahan demokrasi.

Pemerintahan otokrasi yang cenderung meniadakan hak-hak individu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghargai hak-hak individu. Pemerintahan otokrasi yang mawujud dalam institusi khilafah saat itu harus diganti dengan pemerintahan yang bercorak demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individu.

Dalam rangka membasmi taklid, al-Afghani menyeru umat Islam agar di setiap negeri terdapat sekelompok dari mereka yang secara khusus mempelajari ajaran Islam secara mendalam dan kemudian menyebarkanluaskannya kepada seluruh umat. Menurutnya, taklid hanya membuat kerja akal menjadi lamban dan melaksanakan fungsi berfikirnya, dan hal ini akan menggiring umat kepada kelemahan yang menyulitkan orang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dapat disimpulkan :

1. Keyakinan terwujudnya Islam yang bangkit dan berjaya apabila umat Islam kembali kepada ajaran

Islam yang murni dan meneladani kehidupan sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin.

2. Melawan kolonialisme dan dominasi Barat, dalam segala aspek baik politik, ekonomi maupun budaya.
3. Mengakui kemajuan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, umat Islam harus belajar dari Barat dalam dua bidang tersebut tetapi harus tetap sesuai dengan ajaran Islam.
4. Menentang sistem pemerintahan yang otoriter, absolut, dan berkuasa dengan sewenang-wenang. Menggantinya dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan musyawarah.
5. Menganjurkan Pan Islamisme yang menyatukan seluruh umat Islam termasuk Persia dengan menggunakan bahasa Arab.
6. Melakukan perubahan kekuasaan secara revolusi

Menurut Al-Afghani, pembaharuan politik yang harus dilakukan yaitu merubah pemerintahan otokrasi ke dalam bentuk pemerintahan demokrasi. Kepala negara harus melakukan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Awalnya al-Afghani menginginkan kekhalifan terpadu, kesatuan kekuasaan umat muslim, namun karena adanya perbedaan pandangan dengan Khalifah Turki Usmani yaitu Khalifah Abdul Majid, sehingga Afghani mengalihkan keinginannya kepada kesatuan jiwa (*The World Spirit*) yang nantinya disebut nasionalisme agama disamping nasionalisme tanah air.

PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD ABDUH DAN RASYID RIDHA

A. Muhammad Abduh dan Pemikiran Politiknnya

Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 M dan wafat pada tahun 1905 M. Ayahnya, Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sedangkan ibunya, mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam, Umar bin Khattab.

Pendidikan pertama yang ditekuni Muhammmad Abduh adalah belajar Al-Qur'an, dan berkat otaknya yang cemerlang maka dalam waktu dua tahun, ia telah hafal kitab suci dalam usia 12 tahun. Pendidikan formalnya dimulai ketika ia dikirim oleh ayahnya ke perguruan agama di masjid Ahmadi yang terletak di desa Thantha. Namun karena sistem pembelajarannya yang dirasa sangat membosankan, akhirnya ia memilih untuk menimba ilmu dari pamannya, Syekh Darwisy Khidr di desa Syibral Khit yang merupakan seseorang yang berpengetahuan luas dan penganut paham tasawuf. Selanjutnya, Muhammad Abduh melanjutkan

studinya ke Universitas Al Azhar, di Kairo dan berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1877.

Ketika menjadi mahasiswa di Al-Azhar, pada tahun 1869 Abduh bertemu dengan seorang ulama' besar sekaligus pembaharu dalam dunia Islam, Jamaluddin Al-Afghany dalam sebuah diskusi. Sejak saat itulah Abduh tertarik kepada Jamaluddin Al-Afghany dan banyak belajar darinya. Al-Afghany adalah seorang pemikir modern yang memiliki semangat tinggi untuk memutus rantai-rantai kekolotan dan cara-cara berfikir yang fanatik.

Udara baru yang ditiupkan oleh Al-Afghany, berkembang pesat di Mesir terutama di kalangan mahasiswa Al-Azhar yang dipelopori oleh Muhammad Abduh. Karena cara berpikir Abduh yang lebih maju dan sering bersentuhan dengan jalan pikiran kaum rasionalis Islam (Mu'tazilah), maka banyak yang menuduh dirinya telah meninggalkan madzhab Asy'ariyah.

Pada sisi lain pertemuan Abduh dengan Al-Afgani menjadikan Abduh aktif dalam berbagai bidang sosial dan politik, dan kemudian mengantarkannya untuk bertempat tinggal di Paris, menguasai bahasa Prancis, menghayati kehidupan masyarakatnya, serta berkomunikasi dengan pemikir-pemikir Eropa ketika itu

Islam dalam pemahaman Abduh tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna, bahwa apapun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian dia mampu mengantisipasi perkembangan zaman.

Pandangan Abduh bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan mempunyai kesamaan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Keduanya sama-sama tidak mementingkan bentuk pemerintahan dan sama-sama berpendapat bahwa sistem pemerintahan disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad serta tidak berdasarkan kepada sistem syari'at yang kaku. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama memelihara dasar-dasar agama, dan menafsirkannya selama ia berkaitan dengan masalah keduniaan. Produk dari pemahaman itu tidak bertentangan dengan salah satu pokok-pokok agama. Dalam kepala merekalah bentuk pemerintahan. Artinya merekalah yang menentukan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki.

Pemunculan ide Afghani tersebut sebagai reaksi kepada salah satu sebab kemunduran umat Islam yang bersifat politik, yaitu pemerintahan absolut. Abduh pun melihat sikap jumud merupakan penyebab kemunduran umat Islam, akibat dari pemerintahan sewenang-wenang, absolut, juga tidak terlepas dari pengertian Islam yang dipahaminya.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa mengadakan musyawarah adalah melatih rakyat terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Mereka tidak terikat kepada pendapat seorang kepala Negara sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang ikut dalam forum musyawarah, akan terhindar dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya kepada umat. Seorang pengurus yang tidak dibatasi undang-undang dan hak kritik rakyat cenderung mempertahankan status quo dengan berbagai cara. Syura akan menghilangkan kesewenang-wenangan

pengusa terhadap kebebasan berpendapat. Ia juga akan menumbuhkan kesadaran politik rakyat untuk menyampaikan saran kepada pemerintahan, dan sebagai media untuk mewujudkan keserasian kerjasama antara pemerintah dan rakyat.

Muhammad Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang demokratis. Syura juga penting dilaksanakan untuk memilih khalifah dan menetapkan peraturan termasuk soal agama yang tidak punya nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi Abduh, pemerintahan otokrasi yang cenderung meniadakan hak-hak individu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghargai hak-hak individu. Maka pemerintahan otokrasi harus diganti dengan pemerintahan yang bercorak demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individu. Abduh juga mencita-citakan pemerintahan yang demokratis. Ridha yang tetap mempertahankan system khilafah, tetapi menginginkan adanya perbaikan dalam pemerintahan tersebut, yaitu melaksanakan syura dalam pemilihan khalifah, yang selama ini berjalan secara turun-temurun.

Mengenai sumber kekuasaan, Abduh menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah. Karenanya rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka. Sumber kekuasaan adalah rakyat. Islam tidak mengenal kekuasaan agama seperti yang terdapat dalam Kristen ketika gereja berkuasa di masyarakat barat. Islam tidak memberi kekuasaan kepada seorangpun selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak menghendaki seseorang mempunyai kekuasaan terhadap akidah dan keimanan orang lain. Gagasan Abduh ini dapat

dikatakan sebagai desakralisasi terhadap pendapat bahwa kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan yang berlandaskan agama. Islam adalah agama dan kedaulatan.

Prinsip toleransi yang dibawa Islam merupakan landasan pemikiran Muhammad Abduh. Toleransi menurut Abduh menunjukkan ketinggian peradaban Islam sampai abad modern sekarang. Karena itu ia merupakan pendukung Negara kesatuan berdasarkan kebangsaan dan tidak menjadikan agama sebagai penghambat persatuan. Sikap ini tampak dalam tulisannya mengenai nasionalisme (*al-wathaniyat*) yang jauh dari agama dan ia aktif di partai nasional (*Al-Hizb al-Wathani*) Mesir.

Meskipun Abduh meniadakan wujud kekuasaan agama dan memahami kekuasaan politik sebagai urusan dunia semata, namun tidak berarti ia memisahkan antara urusan agama dan dunia secara mutlak. Abduh, sebagaimana pemikir muslim lainnya berpendapat, Islam menggabungkan antara urusan agama dan dunia. Islam, kata Abduh, adalah agama dan dunia. Karena Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban kepada rakyat dan pemerintah, dan pemerintah wajib menegakkan keadilan yang dituntut oleh agama dan rakyat. Ini memang merupakan cita-cita Islam, menyeimbangkan antara urusan dunia dan agama dan menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak.

Menurut Abduh, kekuasaan politik menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak dan wewenang memerintah. Tapi Islam tidak memberi peluang akan munculnya sistem teokrasi. Usaha pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Tampak sekali pengaruh pemikiran keagamaan Abduh yang rasional terhadap pemikiran politiknya. Persepsinya tentang Negara dan pemerintahan mencerminkan bahwa ia tidak menghendaki pemerintahan eksklusif untuk umat Islam, juga ia dapat menerima Negara kesatuan nasional yang berkembang di zaman modern.

Pemikiran Muhammad Abduh mengenai khilafah dapat dirangkum dalam dua hal, yaitu : *Pertama*, Apapun bentuk sistem pemerintahan yang relevan dianut, terutama jika bentuk khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat. Ini mengandung makna bahwa apa pun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. *Kedua*, Prinsip negara demokrasi harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah secara bersama-sama seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

B. Muhammad Rasyid Ridha dan Pemikiran Politikanya

Muhammad Rasyid Ridha lahir di al-Qalamun di pesisir Laut Tengah, Syiria pada tanggal 23 September 1865 M. Dan dia wafat pada tahun 1935 M. Ia masih keturunan Nabi Muhammad saw. dari garis Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pendidikannya dimulai di Madrasah al-Kitâb di al-Qalamun kemudian dilanjutkan di Madrasah al-Rasyidiyyah di Tripoli. Pada usia 18 tahun ia melanjutkan pendidikan di *Madrasah al-Wathaniyyah al-Islâmiyyah*, kemudian melanjutkan di al-Azhar pada tahun 1898 M.

Muhammad Rasyid Ridha sangat mengagumi pemikiran dan gerakan Jamaluddin al-Afghani serta seorang muridnya, Muhammad Abduh. Melalui majalah *al-'Urwatul Wuśqa*, Ridha mengenal pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani serta muridnya tersebut. Sejak itu ia ingin sekali bertemu dengan kedua idolanya tersebut agar ia bisa menimba pengalaman dari keduanya. Ia sempat ingin bergabung dengan al-Afghani saat tokoh ini menetap di Istambul, tetapi niat itu tidak pernah tercapai. Sewaktu Abduh diasingkan ke Beirut, kesempatan itu dipergunakan oleh Rasyid Ridha untuk menemuinya. Semenjak itu ia lebih mengenal Abduh bahkan menjadi salah satu murid setianya.

Bersama-sama Abduh, Rasyid Ridha menerbitkan majalah *al-Manâr*. Majalah ini memiliki tujuan yang sama dengan *'Urwatul Wuśqa*, di antaranya adalah pembaruan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan faham fatalisme, serta faham-faham yang dibawa tarekat.

Rasyid Ridha juga berjasa besar dalam melanjutkan usaha gurunya dalam penafsiran al-Qur'an secara modern. Tafsir itu kemudian dikenal dengan nama Tafsir *al-Manâr*. Tafsir *al-Manâr* ini disusun Rasyid Ridha berdasarkan ceramah-ceramah Muhammad Abduh. Sebelum menyelesaikan tafsir seluruh ayat Al-Qur'an, Muhammad Abduh meninggal dunia. Oleh karenanya Rasyid Ridha kemudian menyelesaikannya.

Di antara pemikiran-pemikiran Muhammad Rasyid Ridha adalah:

1. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat.
2. Umat Islam harus meninggalkan sikap fatalisme (Jabariyyah).

3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis tanpa meninggalkan prinsip umum.
4. Jika ingin maju, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi.
5. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam.
6. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh melalui hukum alam yang diciptakan Allah.
7. Perlunya menghidupkan kembali sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin.
8. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang menguasai bidang agama dan politik.
9. Khalifah harus seorang mujtahid besar yang dibantu para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

Rasyid Ridha justru tampil dengan vokal untuk menghidupkan kembali khilafah yang memelihara kekuasaan absolut, yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Untuk itu Ridha sengaja menulis buku yang berjudul *al-Khilafatawa al-Imamat al-Uzhmat*. Karena jabatan khalifah baginya adalah wajib syar'i, dan eksistensi khilafah sangat penting dalam rangka penerapan hukum syari'at Islam. Ini sejalan dengan pandangannya, bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik dan pemerintahan. Bila demikian, berarti bentuk pemerintahan lain bagi Ridha tidak bisa menerapkan syariat Islam.

Untuk mendukung pendapatnya itu, Ridha memberikan pengertian yang satu kepada *khilafat*, *imamat al-uzhmat* dan *imarat al-mu'minin*, yakni kepala pemerintahan untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunia.

Karena itu Ridha menggarisbawahi pendapat Al-Taftazani yang mengatakan, imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang diwarisi dari Nabi. Ia juga sependapat dengan Al-Mawardi yang mengatakan, imamah itu ditegakkan sebagai pengganti Nabi dalam memelihara urusan keagamaan dan keduniaan.

Rasyid Ridha juga mengedepankan pendapat dan argumentasi Al-As'ad tentang khilafah sebagai kewajiban syar'i, yaitu adanya ijma' sahabat dalam hal pengukuhan Abu Bakar sebagai khalifah atau (pengganti) Nabi sampai mereka mendahulukannya dari pada penguburan Nabi. Dengan adanya imam, pelaksanaan hukum syari'at terjamin dan terhindar dari berbagai mudarat. Adanya kewajiban taat pada Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah memang menghendaki diangkatnya seorang imam.

Pemikiran politik Rasyid Ridha tentang khilafah dapat disimpulkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Khalifah yang ideal adalah seseorang yang memiliki sifat adil, memiliki kemampuan dan mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Fungsi khalifah antara lain menyebarkan kebenaran, menegakkan keadilan, memelihara agama, dan bermusyawarah tentang masalah yang tidak dijelaskan nash. Khalifah bertanggungjawab kepada dewan pengawas.
2. Khalifah merupakan pemimpin umat Islam, oleh karena itu harus ditaati semasa pemerintahannya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Menentang pemerintahan absolut kerajaan Usmani dan menentang politik Inggris dan Perancis yang ingin membagi Arab di bawah kekuasaan Inggris dan Perancis.

4. Mempersatukan umat Islam. Tetapi ia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme, karena menurutnya nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan umat Islam seluruh dunia. Karena dalam Islam, persaudaraan umat Islam tidak mengenal perbedaan bahasa, bangsa, ataupun tanah air.
5. Hukum dan Undang-Undang tidak bisa dilaksanakan tanpa kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk negara. Bentuk negara yang dianjurkan Rasyid Ridha adalah bentuk khilafah. Kepala negaranya adalah khalifah yang mempunyai kekuasaan legislatif. Khalifah tidak boleh absolut dan harus mempunyai sifat mujtahid. Kedaulatan umat berada di tangan umat dan berdasarkan prinsip musyawarah. Idenya mengenai kekhalifahan tersebut, ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul *al-Khilafah*.

Pandangan dan argumentasi Rasyid Ridha menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemikir konservatif. Ia masih terikat pada pendapat-pendapat ulama pada abad pertengahan. Padahal ia telah berhadapan dengan zaman modern dan menyaksikan kebobrokan system khilafah yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Dengan demikian ia tidak memunculkan pemikiran politik yang orisinal. Sebab ia masih ingin mempertahankan eksistensi khilafah yang dalam prakteknya cenderung absolut dan otokrasi, pasca khilafah Khulafa' al-Rasyidin.

Hingga pada akhirnya, dua pioner Islam kontemporer ini telah membuka jalan bagi terjadinya Islamic Renaissance dengan mengupayakan penyatuan modernitas Barat dengan tradisi Islam klasik. Hal ini terjadi pada fase kedua kebangkitan Islam Arab antara tahun 1870 hingga 1900. Abduh dan Ridho saat itu berupaya menafsirkan ulang Islam agar senantiasa sesuai dengan kehidupan modern .

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ABDUL WAHAB KHALLAF

A. Biografi Abdul Wahab Khallaf

Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb memiliki nama lengkap Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi. lahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah Barat laut kota Riyadh, Arab Saudi. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya. Sedangkan kakaknya adalah seorang qadhi (mufti besar), tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama.

Berkat bimbingan kedua orangtuanya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menghafal 30 juz Al-Qur’an sebelum ia berusia sepuluh tahun. Setelah itu, beliau diserahkan oleh orangtuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimnya untuk belajar ke luar daerah. Di Madinah, ia berguru pada dua orang ulama besar yaitu Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif an-Najdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi.

Muhammad bin Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar'iyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah dan berjihad serta mengabdikan sebagai menteri penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sampai usia 92 tahun, beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 H., bersamaan dengan tahun 1793 M., dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dar'iyah (Najd).

B. Pemikiran Politik Abdul Wahab Khallaf

Muhammad bin Abd al-Wahhab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Para pendukung pergerakan ini sesungguhnya menolak disebut *Wahabbi*, karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai *Salafis* atau *Muwahhidun* yang berarti "satu Tuhan".

Abdul Wahab Khallaf adalah seorang pakar hukum Islam pada Fakultas Hukum di Universitas Cairo, Mesir. Sejauh ini kita mengenal Prof. Abdul Wahab Khallaf sebagai ahli dalam bidang hukum Islam terutama kajian *Ushul al-Fikih* (Dasar-dasar hukum Islam). Abdul Wahab Khallaf juga banyak mengamati Hukum Tata Negara dan Aliran Politik Islam. Hal itu dapat dilihat pada bukunya yang berjudul *al-Siyasat al-Syar'iyah*, ia membahas dasar-dasar politik dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Pembahasannya ia kaitkan dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam dan kemaslahatan umat, artinya untuk melaksanakan dari segi siyasah syar'iyah

memerlukan adanya lembaga instrumen pelaksanaanya yaitu Pemerintahan.

Menurut Khallaf, bentuk suatu pemerintahan tercermin pada hubungan kuat antara penguasa dan rakyat, serta keseimbangan kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits. Pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk *dusturiyah* (konstitusional) dan bukan *istibdadiyat* (tirani).

Aspek-aspek penting dari asas *siyasa dusturiyah* menurut Khallaf adalah : bentuk pemerintahan, hak-hak individu, dan bidang-bidang kekuasaan. Sedangkan Islam menghendaki pemerintahan konstitusional, sebab urusan pemerintahan bukan urusan dan hak monopoli orang-orang tertentu, melainkan urusan dan hak ummat atau rakyat. Karena itu pula, pertanggung jawaban pemerintahan ada pada umat. Hal ini di jelaskan oleh nash yang menuntut rakyat agar menggunakan hak berpendapat untuk memberi nasehat atau kontrol sosial terhadap *wulat al-amri* (pemegang kekuasaan). Nabi bersabda:

"Sesungguhnya Allah menyukai bagi kamu tiga perkara dan membenci atas kamu tiga perkara: Dia menyukai agar kamu menyembah-Nya dan jangan menyekutukanNya, kamu berpegang kepada agama Allah dan jangan berpecah belah, dan kamu menasehati orang-orang yang ditakdirkan Allah mengurus urusan kamu."

Hal ini mengisyaratkan bahwa syariat menjamin adanya kebebasan berpendapat. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap umat dilakukan dengan jalan musyawarah.

Sendi-sendi pemerintahan dalam Islam adalah *syura'* sebagai hukum dasar. Mengenai rinciannya diserahkan kepada ummat untuk menetapkan

sistemnya yang sesuai dengan keadaan, menentukan sistem pemilihan, syarat-syarat bagi orang yang akan dipilih dan teknis pelaksanaannya. Sendi kedua dan ketiga adalah adanya pertanggungjawaban kepala Negara dan kewenangan kepala Negara berasal dari baiat rakyat. Masalah tentang apa dan bagaimana sistem dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada umat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan.

Demikian pula, hak menentukan kepala Negara ada pada rakyat yang didelegasikan kepada lembaga *al-hall wa al-aqd* untuk melaksanakannya. Wewenang yang diberikan kepada kepala Negara adalah memelihara agama dan mengatur urusan dunia.

Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa dalam pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh undang-undang, kebebasan perorangan dan persamaan individu-individu dalam hak-hak sipil dan politik harus dijamin oleh Negara. Hak-hak kebebasan perorangan terdiri dari kebebasan yang dibatasi oleh perintah dan larangan undang-undang baik yang berasal dari syariat agama maupun yang dibuat oleh penguasa, kebebasan atau tempat tinggal, kebebasan memiliki, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kebebasan belajar. Sedangkan kebebasan individu-individu dalam hak-hak sipil dan politik, setiap individu sama dalam ketaatan terhadap undang-undang, tidak ada yang kebal hukum, tidak boleh seseorang memperoleh hak yang istimewa, kepala Negara dan pejabat serta rakyat sama kedudukannya, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintahan dalam Islam menghendaki pemerintahan konstitusional yang bersendikan musyawarah, kewenangan kepala Negara berasal dari rakyat.

Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan Negara yang dapat didelegalisasikan kepada:

1. Kekuasaan membuat undang-undang (*al-sulthat al-tasyri'iyat* atau biasa disebut Legislatif).
2. Kekuasaan peradilan atau kehakiman (*al-sulthat al-Qadhiyat* atau biasa disebut Yudikatif)
3. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (*al-sulthat al-tanfiziyyat* atau biasa disebut Eksekutif).

Sumber hukum dalam pemerintahan Islam adalah :

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Ijtihad Penguasa (*wulat al-amr*) yang tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum hasil ijtihad *wulat al-amr* bersifat memaksa dan mengikat untuk dipatuhi penguasa dan aparatnya serta rakyat selama ia tidak bertentangan dengan substansi hukum dasar kemaslahatan rakyat.

PEMIKIRAN POLITIK 'ALI ABD AL-RAZIQ

A. Biografi 'Ali Abd Al-Raziq

Nama lengkap Ali Abd Al-Raziq adalah Syeikh Ali Abd Al-Raziq. Lahir di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888. Keluarga feodal ayahnya yang bernama Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr, adalah seorang pembesar yang terpandang di daerah pinggiran. Ia berasal dari keluarga hartawan dengan tanah-tanah pertanian yang luas. Ia keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya bergelut dalam dunia politik bahkan ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*) pada tahun 1907. Setelah revolusi tahun 1919, Al-Asharar Al-Dusturiyah, partai ini adalah partai kelanjutan *Hizbu Al-Ashrar al Ummah* yang mempunyai dukungan yang rapat dengan Inggris. Pendiri partai ini antara lain ialah Hassan Ali Abd al Raziq saudara Ali Syaikh Abd al Raziq.

Usia sepuluh tahun, Ali Abd. Raziq masuk al-Azhar dan menghadiri beberapa kuliah umum yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Pemikiran-pemikiran progresifnya, tak pelak lagi, dipengaruhi oleh sang Imam. Pada tahun 1910, ia masuk ke

Universitas Mesir dan berkesempatan mendengarkan ceramah ilmiah yang disampaikan oleh beberapa orientalis Barat yang dihadirkan di universitas itu. Ia mendapat ijazah al-Azhar pada tahun 1911 dan dua tahun kemudian mendapat kesempatan beasiswa belajar di Oxford, Inggris. Ia mengambil jurusan Ekonomi dan Ilmu Politik.

Sekembalinya dari Oxford tahun 1915, ia diangkat menjadi hakim (*qadhi syar'i*) di Alexandria dan wilayah sekitarnya. Disamping itu, ia mengajar Sejarah Peradaban Arab Islam di sebuah perguruan tinggi al-Azhar cabang Alexandria. Di kota inilah ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk bukunya yang terkenal, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Batsun fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan: Kajian tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam) yang diterbitkan beberapa tahun kemudian. Selain buku ini, Abd al-Raziq menulis beberapa buku lain, di antaranya, *al-Ijma' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (konsensus dalam hukum Islam) yang diterbitkan pada tahun 1947.

B. Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq

1. Konsep Khilafah

Masalah pokok dan mendasar tentang khilafah yang dibahas Ali Abd al-Raziq dalam bukunya merupakan jawaban atas pertanyaan: apakah sistem khilafah termasuk dasar pemerintahan dalam Islam? Menurutnya, pernyataan bahwa mendirikan khilafah itu tidak wajib, telah membawa konsekuensi mendasar tentang apa itu Islam. Apakah Islam itu agama saja atau agama dan dunia? Apakah dalam Islam ada pemisahan antara agama dan negara?

Menurut Ali Abd al-Raziq, Negara memiliki dua tugas yaitu:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan manusia dan golongan-golongan kearah yang tercapai tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Bahkan ketika Nabi Muhammad membangun komunitas politik di Madinah, dia tidak pernah mengemukakan satu bentuk pemerintahan politik standar yang harus diikuti oleh para penerusnya kemudian. Apa yang disebut politik Islami tidak lebih dari ijihad politik para elit Islam sepeninggal Muhammad.

Ali Abd al-Raziq memandang Rasulullah bukanlah seorang pewaris sistem pemerintahan melainkan hanya seorang utusan yang membawa risalah untuk umatnya. Baginya, pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa agama dan politik atau negara itu harus dipisahkan. Islam tidak mengajarkan tentang politik. Khalifah hanyalah sebuah sistem yang manusia ciptakan sesuai dengan kondisi saat itu. Oleh karenanya, Ali Abd.al-Raziq menolak sistem pemerintahan khilafah karena dianggap sudah tidak relevan dengan zaman pada saat itu.

Islam tidak mengajarkan bentuk-bentuk pemerintahan yang harus diikuti pemerintah. Karena sesuatu yang sentral dalam agama adalah iman (keyakinan), dan negara bukanlah sebuah tempat untuk membentuk keyakinan agama. Negara adalah sesuatu yang manusiawi dengan pola pikir manusia sendiri.

Berkaitan dengan agama, Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa mereka mesti taat lahir batin sebab

taat pada pemimpin berarti taat pada Allah dan membangkang pada pemimpin berarti tidak taat pada Allah. Mentaati pemimpin dan perintahnya adalah suatu kewajiban seorang muslim. Pendapat ini dipahami dari pernyataan Ali Abd. al-Raziq bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul untuk mendakwahkan agama semata-mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwakan berdirinya negara.

Sebagian besar ulama menyepakati wajibnya khilafah. Sebagian menggunakan dalil akal dan logika (dalil *'aqli*), sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun tentang adanya ijmak Sahabat dan ijmak tabi'in. Ijmak versi Ibnu Khaldun ini didasarkan atas tinjauan sosiologis, yaitu keharusan adanya kumpulan manusia dan ketidakmungkinan hidup menyendiri, sehingga diperlukan *al-hakim* atau *al-wazir*; jika tidak demikian, akan terjadi kekacauan sosial, padahal memelihara eksistensi sosial termasuk di antara tujuan syara' yang mutlak.

Sebagian lagi berargumentasi dengan dalil syar'i, baik dengan nash Al-Qur'an, hadits maupun ijmak versi ahli Ushul al-Fikih. Golongan ketiga berargumentasi dengan dalil aqli dan syar'i secara bersama-sama. Pendapat kedua menyatakan bahwa khilafah bukan merupakan dasar pemerintahan dalam Islam. Dengan kata lain, sebagai sistem pemerintahan, khilafah termasuk persoalan yang diserahkan kepada kaum Muslimin. Sebagian kaum Mu'tazilah dan Khawarij Al-Najdat berpendapat bahwa pendirian khilafah tidak wajib, yang wajib adalah terlaksananya hukum syari'ah.

Ali Abd. al-Raziq menolak dalil ijma' sebagai hukum syara' atau hujjah agama, baik ijma' sahabat dan tabi'in, maupun ijma' seluruh kaum muslimin. Ia

membuktikannya dengan argumen historis secara rasional terhadap pembantaian Yazid. Menurutnya, bagaimana ada ijma' yang sebenarnya karena saat itu ada intimidasi. "Siapa yang menolak baiat, inilah bagiannya," kata protokol upacara sambil menunjuk pedangnya. Pendapat ini dibantah oleh Al-Rais. Menurutnya, yang dimaksud dengan ijma' adalah ijma' sahabat dan tabi'in. Al-Rais mengatakan bahwa nilai ijmak yang tertinggi dan terkuat dalam syari'ah Islam ialah ijma' sahabat. Selanjutnya Al-Rais menerangkan bahwa yang dimaksud ijma' menurut pemahaman ulama adalah dalam kewajiban untuk menegakan khilafah, bukan dalam memilih orangnya (khalifah). Dalam memilih orangnya itu cukup dengan suara mayoritas; hal itu terjadi berulang kali dalam sejarah.

2. Konsep Negara

Negara menurut Ali Abd. Al-Raziq adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara/pemerintah dengan gelar khalifah. Khalifah adalah pengganti Nabi Muhammad saw., dengan kewenangan mengatur kehidupan dan urusan rakyat/umat, baik keagamaan maupun keduniawian yang hukumnya wajib dipatuhi dan ditaati.

Pada dasarnya, Ali Abd. Al-Raziq sebagaimana ulama lainnya mengakui bahwa Islam memerlukan adanya sistem pemerintahan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Al-Raziq mengakui, bahwa nabi telah mendirikan suatu Negara di Madinah bagaimanapun sederhananya. Sebab, pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintahan sudah ada dizaman Nabi Muhammad saw. Tetapi dalam hal ini, al-Raziq menyatakan sulitnya membuat kesimpulan bagaimana prosedur penetapan hukum yang ditempuh

Nabi. Bidang-bidang tugas yang dilakukan Nabi seperti ekspedisi militer untuk membela diri, distribusi zakat, *jizyah* dan ghanimah, pemberian delegasi kepada sahabat untuk melaksanakan berbagai bidang tugas, memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad saw. disamping sebagai seorang Rasul juga sebagai pemimpin politik.

Ali Abd. Al-Raziq berpendapat, bahwa pemerintahan yang dilaksanakan Rasul bukanlah bagian dari tugas kerasulannya. Pemerintahan yang pernah dibentuk Nabi adalah amalan duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya.

Ali Abd. Al-Raziq mengemukakan pendapatnya tentang konsep Negara dalam QS. al-Nisa: 59 dan 83 yang menyebutkan kata ulil 'amri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil al-Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

Terjemahnya :

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka

menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

Ali Abd. Al-Raziq mengakui bahwa ada diantara mufasir yang menafsirkan kata *ulil amri'* pada ayat pertama dengan penguasa kaum muslimin pada masa rasul dan pada masa sesudah rasul termasuk para khalifah, para qadli dan panglima perang. Ada juga yang menafsirkan dengan ulama syara'. Sedangkan kata *ulil amri* pada ayat kedua ditafsirkan dengan sahabat senior atau para pemimpin mereka. Akan tetapi menurutnya, tidak ada seorangpun yang menganggap kedua ayat tersebut diatas sebagai dalil wajibnya mendirikan khilafah atau negara.

Jadi menurutnya, kedua ayat ini masih belum memadai sebagai dalil adanya khilafah atau negara. Namun kandungan ayat tersebut ialah membuktikan adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memilih sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Makna ini jelas lebih umum dan luas dibandingkan dengan makna yang disebutkan. Malahan pengertian seperti itu satu sama lain berbeda jauh.

Demikian pula, menurut Ali Abd. Al-Raziq tidak ditemukan hadis atau sunnah yang berbicara tentang pendirian khilafah. Seandainya ada hadits atau sunnah yang dapat dijadikan dalil khilafah, maka tentu akan didahulukan daripada ijma sahabat.

PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL (1888-1956 M)

A. Biografi Muhammad Husain Haikal

Muhammad Husein Haikal dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbilawain di Propinsi Dagahlia, Delta Nil Mesir, 20 Agustus 1888. Setelah belajar mengaji di sebuah madrasah di desanya, Muhammad Husein Haikal melanjutkan pendidikan sekolah dasarnya di Kairo, lalu sekolah menengah sampai 1905. Kemudian, ia belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang hukum (1909) dan meneruskannya ke Fakultas Hukum di Universitas De Paris, Prancis. Setamat dari Fakultas Hukum, ia pun melanjutkan pendidikannya sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik hingga memperoleh gelar Ph.D (1912). Muhammad Husain Haikal adalah orang Mesir pertama yang meraih gelar keserjanaan seperti ini. Pada tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansurah, kemudian di Kairo sampai tahun 1922.

Profesi lain yang pernah digelutinya selain pengacara adalah sebagai dosen, aktivis partai dan pemimpin surat kabar harian, bahkan pernah dipercaya menjabat Menteri Pendidikan Mesir (1938-1945), kemudian Ketua senat (1945-1950). Ia dikenal sebagai

penulis yang produktif di bidang sastra, sejarah, agama, dan politik. Bukunya yang terkenal adalah *Hayat Muhammad*, adalah pokok-pokok pikirannya tentang politik dan kenegaraan yang termuat dalam karyanya yang berjudul: *al-Hukumat al-Islamiyat* (Pemerintah Islam).

B. Pemikiran Politik Muhammad Husain Haikal

Husain Haikal berpandangan bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, tetapi meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah. Menurutny, kehidupan bernegara bagi umat Islam baru mulai setelah Nabi dan pengikutnya berhijrah. Untuk keperluan kehidupan bernegara ini Nabi meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan keluarga, pembagian waris, perdagangan dan jual beli berdasarkan wahyu-wahyu Ilahi.

Kaidah-kaidah pokok tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi dan budi pekerti ini, menurut Husain Haikal tidak memberikan rincian tentang asas mendirikan Negara, dan tidak pula menyinggung secara langsung tentang sistem pemerintahan, bahkan dua ayat (QS. Ali Imran (3): 159 dan QS. al-Syura (42):38 yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kedua ayat ini tidak menggambarkan mengenai sistem pemerintahan tertentu. Kedua ayat tersebut tidak menggambarkan secara rinci bahkan tidak terkait dengan sistem pemerintahan. Menurut Haikal bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku, umat Islam bebas menganut

sistem pemerintahan, asal sistem tersebut menjamin persamaan antara warganya. Baik hak dan kewajiban termasuk persamaan di muka hukum, pengelolaan suatu negara diselenggarakan berdasarkan *syura* (musyawarah) dengan berpegang pada tata nilai, etika dan moral yang diajarkan oleh Islam bagi peradaban manusia.

Muhammad Husain Haikal membagi prinsip-prinsip Islam bagi peradaban manusia yang bersifat spiritual adalah :

1. Prinsip Tauhid, yaitu Iman kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia Maha Esa yang wajib disembah. Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Iman kepada Allah inilah merupakan suatu ideologi negara. Supaya negara menjadi kuat, maka ia harus mempunyai satu ideologi ideal yang umum sifatnya dapat dijadikan keyakinan masyarakat dan semua bersedia membelanyadengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada.

Apabila ada orang yang menentang ideologi umum yang harus menjadi dasar negara ini maka mereka termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang mau menyebarkan benih-benih perang saudara dan fitnah yang merusak. Bagi yang melakukan pembangkangan tetapi masih dapat dikendalikan, diwajibkan membayar *jizyah* dengan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku. Menurut Haikal bahwa iman merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan Islam, karena menurut Haikal bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu menyebabkan keresahan dalam suatu masyarakat atau Negara. Oleh karena itu Islam mengajak umat manusia untuk menyetujui keyakinan dasar yang menjadi azas tunggal bagi kehidupan bersama.

2. Prinsip Sunnatullah, yaitu tetapnya hukum alam, artinya tidak menerima perubahan. Dalam hubungan ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak akan dapat menemukan pengganti perubahan bagi sunnah (Hukum) Allah. Dalam hubungan ini sebagaimana dikutip oleh Munawir Syadzali bahwa pengelolaan suatu negara atau masyarakat harus diperhatikan watak-wataknya sesuai dengan fitrah alaminya, dan jangan dipaksakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ajaran Islam, tugas penguasa yang utama adalah mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

3. Prinsip persamaan antar manusia di depan Allah, menuntut ketaatan mereka secara sama terhadap hukum-Nya. Kemudian atas dasar prinsip inilah orang-orang Arab menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang pernah berperang dengan mereka pada periode pertama. Dengan demikian seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk masuk agama Allah dengan pedang atau senjata. Mereka bebas untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Prinsip ini harus dijadikan sebagai dasar sistem Islam bagi pemerintahan.

Bagi Muhammad Husain Haikal, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berusaha merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berpijak pada keyakinan yang benar pada Allah, mengakui Sunnah-Nya di alam semesta yang dapat di peroleh oleh akal bebas manusia dan memikirkannya secara kontinyu, saling tolong-menolong dan kerja sama atas

dasar saling mencintai. Setiap individu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat, dan masyarakat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan individu seluruhnya atas dasar persamaan.

Hal ini menunjukkan bahwa bagi Haikal, system bukanlah hal yang penting, melainkan terealisirnya prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebab, sistem pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah tidak hanya di tentukan oleh prinsip-prinsip ajaran saja (faktor interen), tetapi juga di pengaruhi oleh situasi lingkungan, sejarah, budaya dan tingkat perkembangan peradaban dan intelektual.

Pengaruh lingkungan setempat, perkembangan tingkat pe-radaban dan intelektual serta budaya asing tentu tak dapat dihindari, karenanya menurut Haikal, sistem pemerintahan yang dibuat hendaknya tidak menyalahi prinsi-prinsip ajaran Islam. Prinsip persamaan menjadikan seluruh manusia mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui Musyawarah. Ia juga membuat penguasa dan rakyat sama derajatnya di depan undang-undang dan di depan perintah dan larangan Allah. Tujuan akhir dari sistem yang dibuat itu adalah untuk merealisir prinsip-prinsip tauhid,sunnatullah, persamaan, persaudaraan, bebas memilih akidah, bebas berpendapat, bebas dari rasa takut dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
 A.Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, cet.1 Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Abd. Al-Raziq, Ali. *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Beirut : Maktabah al-Hayah : 1966.
- Ahmad, Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983.
- Al-Akkad, Abbas Mahmoud. *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, terj. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Bana, Gamal. 2006. *Relasi Agama dan Negara*. Jakarta : Mata Air Publishing, 2006.
- Al-Buraey, Muhammad A. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Al-Maududi, *Sistem-Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1775.
- Al-Rais, Dhiyauddin. *al-Islam wa al-Khilafah fi al-'Ashr al-Hadits*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dengan judul *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, Ali Abdul Raziq. Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Raziq, Ali Abdul. *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*. Mesir Math Ba'ah, 1925.
- Amin Samsul, Munir. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam*, Jilid III; Al-Qahirat: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyah, 1979.
- Ar- Rais, Dhiya Ad-Din. 1985. *Islam dan Khilafah*. Bandung: Pustaka.

- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Siyasaḥ Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.th.
aweygaul.wordpress.com/.../konsep-negara-menurut-al-maududi-dan-ali
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Bachtiar, Effendy. "Islam and Democracy : In Search of Viable Synthesis", *Studia Islamica*, Vol.2, Number 4, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
chans-home.blogspot.com/.../sejarah-dan-pemikiran-ali-abdul-raziq.html
- Dahlan, Abd. al-Azis. et. el. (editor). *Ensiklopedi Islam*. Jilid I. Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1996.
- Davis, Charles. "The Political Use and Misuse of Religious language," *Journal of Ecomenical Studies*, 26:3, Summer, 1989.
- Djazuli, A. *Fikih Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
dorokabuju.blogspot.com/.../ali-abd-al-raziq-khilafah-dan.html
- el-Affendi, Abdelwahab. *Masyarakat tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta : LkiS, 1991.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 10, PT Cipta Adi Perkasa, Jakarta, 1998.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Haikal, Muhammad Husain, *al-Hukumatul Islamiyah*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- . *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antarnusa, 1990.

Hamidullah, dkk. *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*. Terj. Jamaluddin kafe, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

<http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-teori-kenegaraan-dalam-Islam.html>

<http://gebypurnama.blogspot.com/2012/11/teori-teori-kenegaraan-dalam-Islam.html>

<http://rasyidbungadawah.blogspot.com/2010/03/pulau-gebe-halmahera-tengah.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2011

<http://zahraturunisa.blogspot.com/2010/05/fikih-siyasah.html>, diakses apada tanggal 28 Juni 2011.

Ibnu Khaldun. *Muqaddimat*. Dar Al-Fikr, t.t.

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, penerjemah : Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Imarah, Muhammad. *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abd. al-Raziq*. Beirut : T. tp., 1972.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Iqbal. Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khallaf, Abd. Al-Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.

Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Luthfi asy-Syaukanie, Ali Abd Al-Raziq (1888-1966) *Peletak Dasar Teologi Negara Modern*, <http://www.islamlib.com/tokoh>.

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran – Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam : Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Pulungan., J. Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rapar, JH. 1995. *Filsafat Politik Agustinus*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Redaksi Ensiklopedi Islam Ringkas, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Januari 1999, jilid keenam.
- Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan kedua.
- Ridha, Muhammad. *Utsman bin Affan*. Mishr: Isa al-Babi al-Halabiy, 1964.
- Ridha, Rasyid. *Al-Khilafat au al-Imamat al-Uzhmat*. Al-Qahirah: Al-Manar, t.t.
- Schmandt, Henry J. 2002. *Filsafat Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran,, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1990.
- Smith, Donald Eugene. *Religion and Political Development*. Boston : Little, Brown and Co., 1978.
- Wahid, N. Abbas. *Kazanah Sejarah Kebudayaan Islam*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Rajawali Pres, 2010.
- Zada, Mujab ibnu Syarif dan Khamami. *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

- Zahrah, Imam Muhammad, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, terj. Abd.Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Logos, 1996.
- Zahrah, Abu. *Al-Alaqah Al-Dawliyah Fiy Al-Islam*. Alih bahasa Muhammad Ziem Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.